

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Pendekatan Teori dan Studi Kasus

Meidawati Suswandari, M.Pd

PERSEMBAHAN

Buku ke-empat ini, penulis persembahkan pada:

*Pendamping hidupku Valend Pangumban R
Anakku Rendra Aureannora Silalahi
Orang tua dan keluarga di Dagan dan Kedoya*

KATA PENGANTAR

Pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Keduanya sangat erat sekali hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lainnya. Seperti dalam sebuah peribahasa:

“Adakah kayu di rimba sama tinggi”.

Artinya bahwa semua yang ada di dunia ini diciptakan Tuhan dengan segala perbedaannya dengan tujuan untuk saling melengkapi.

Oleh sebab itu, pendidikan dan masyarakat menjadi satu kesatuan yang saling simbiosis mutualisme. Pendidikan yang muncul dalam tri pusat pendidikan (informal, formal, dan nonformal) dibentuk dan ada karena masyarakat. Ilmu tentang masyarakat diistilah sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang membahas tentang interaksi atau hubungan dan pergaulan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam kelompok dan struktur sosialnya. Sementara itu, pendidikan merupakan usaha sadar dan sengaja melalui proses interaksi atau tingkah laku antara dua/lebih individu dalam mengembangkan potensi diri menuju arah lebih baik. Pendidikan sekarang sedang berkembang ke arah kemajuan untuk meningkatkan nilai-nilai kehidupan umat manusia dan sebagai bekal bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita simpulkan bahwa sosiologi pendidikan memberikan penggambaran pada ilmu yang berbicara pada masalah-masalah pendidikan yang berisi tentang tingkah laku manusia dan institusi pendidikan sebagai percampuran dengan lingkungan sosial budaya, politik, ekonomi dalam totalitas kehidupan bermasyarakat.

Buku ini menyajikan konsep dasar tentang sosiologi pendidikan dengan pembahasan secara definisi, histori, dan ruang lingkup maupun pendekatan sosiologi pendidikan. Belajar pada buku sosiologi ini memberikan gambaran pada unsur-unsur yang terkait dalam ranah kajian sosiologi pendidikan yang meliputi tujuh unsur yaitu mengenai apa dan bagaimana peserta didik, pendidik, hubungan guru dan murid yang terangkum dalam istilah interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, serta alat dan metode pendidikan.

Apa dan bagaimana juga dibahas dalam buku ini mengenai hubungan pendidikan dengan masyarakat yang disajikan dalam bentuk definisi pendidikan, definisi masyarakat, serta studi kasus hubungan pendidikan dengan masyarakat. Sosiologi pendidikan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat, mengembangkan ide dan gagasan pada efek samping ataupun tujuan pendidikan itu sendiri dalam pengaruhnya di masyarakat. Sebagai faktor maupun dampak pendidikan, masyarakat masih mengiyakan adanya sistem penghargaan tertentu dari pendidikan. Maka, dalam buku ini juga memberikan gambaran bagaimana kaitannya pendidikan sebagai salahsatu saluran atau jembatan bagi seseorang untuk menaikkan status tertentu dan berpindah pada status tertentu pula di masyarakat. Pendidikan terhadap status dengan berpindah ataupun naik turunnya status diistilahkan dengan stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Disamping itu, pendidikan sebagai faktor yang diharapkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi seseorang. Harapan tersebut berasumsi bahwa semakin tinggi pendidikan, ada harapan untuk semakin tinggi taraf ekonomi seseorang. Linearitas hubungan pendidikan dengan stratifikasi, mobilisasi,

dan ekonomi tersebut tidak lupa mengarahkan pada pembahasan pada kondisi masyarakat saat ini. Modernitas salahsatunya yang perlu dibahas dalam buku ini, dikarenakan semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan rasa optimis pada manusia untuk lebih dinamis, kreatif dan inovatif khususnya dalam bidang pendidikan.

Penulis menyadari bahwa dalam buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk meningkatkan kualitas secara isi dan penyajiannya, penulis mengharapkan saran dan kritik positif dari pembaca sebagai bahan perbaikan pada penerbitan yang akan datang.

Sukoharjo, Februari 2016.

Penulis

DAFTAR ISI

Persembahan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
BAB I. Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan	1
A. Konsep Sosiologi Pendidikan	1
B. Histori Sosiologi Pendidikan	10
C. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan	12
D. Benang Merah Sosiologi Pendidikan.....	16
E. Uji Kompetensi	18
BAB II. Unsur Pendidikan dalam Kajian Sosiologi.....	21
A. Peserta Didik.....	21
B. Pendidik.....	27
C. Interaksi Edukatif.....	42
D. Tujuan Pendidikan.....	55
E. Materi Pendidikan.....	57
F. Alat dan Metode Pendidikan	60
G. Lingkungan Pendidikan.....	62
H. Benang Merah Unsur Sosiologi Pendidikan.....	72
I. Uji Kompetensi	74
BAB III. Pendidikan dan Masyarakat	77
A. Konsep Pendidikan.....	77
B. Konsep Masyarakat.....	94

C.	Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat.....	99
D.	Benang Merah Hubungan Pendidikan dan Masyarakat.....	108
E.	Fenomenologi Hubungan Pendidikan dan Masyarakat.....	109
F.	Uji Kompetensi	118
BAB IV.	Pendidikan Sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilisasi.....	121
A.	Pendidikan dan Stratifikasi Sosial	124
B.	Pendidikan dan Mobilitas Sosial	133
C.	Benang Merah Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilisasi.....	138
D.	Fenomenologi tentang Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilitas Sosial.....	141
E.	Uji Kompetensi	146
BAB V.	Pendidikan dan Ekonomi.....	149
A.	Pendidikan sebagai Investasi Sumber Daya Manusia (SDM)	149
B.	Fungsi Laten Pendidikan, Ekonomi, dan Kenyataan.....	153
C.	Benang Merah Hubungan Pendidikan dan Ekonomi.....	161
D.	Fenomenologi Hubungan Pendidikan dengan Ekonomi.....	162
E.	Uji Kompetensi	167

BAB VI. Pendidikan dan Modernisasi.....	169
A. Konsep Modernisasi.....	169
B. Pendidikan dan Modernisasi.....	176
C. Benang Merah Hubungan Pendidikan dan Modernisasi.....	181
D. Fenomenologi Hubungan Pendidikan dan Modernisasi.....	183
E. Uji Kompetensi.....	194
 Daftar Pustaka	 197
Tentang Penulis.....	205

BAB I

KONSEP DASAR SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Kompetensi Dasar :

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Memahami konsep Sosiologi Pendidikan.
2. Mengidentifikasi sejarah Sosiologi Pendidikan.
3. Menjabarkan Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan.
4. Memaknai Sosiologi Pendidikan secara garis besar.
5. Menjawab soal latihan mengenai Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan.

Disiplin ilmu sosial yang pada umumnya kita ketahui terdiri dari ilmu geografi, ilmu sejarah, dan ilmu ekonomi. Seiring perkembangan pola pikir dan ilmu pengetahuan manusia, merujuk pada gagasan bahwa manusia juga mempelajari tentang kehidupan dirinya juga kelompoknya atau yang biasa disebut dengan masyarakat. Ilmu tentang masyarakat ini diistilahkan dengan sosiologi. Sosiologi juga memiliki bagian secara khususnya yaitu ada sosiologi linguistik, sosiologi pendidikan, sosiologi hukum, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sosiologi yang akan kita bahas yaitu sosiologi pendidikan.

A. Konsep Sosiologi Pendidikan

Sosiologi pendidikan merupakan penggalan dari dua suku kata yaitu sosiologi dan pendidikan. Yang pertama, Sosiologi berasal dari kata latin *socius* yang berarti “kawan” dan *logos* yang berarti “kata” atau “berbicara”. Jadi sosiologi berarti “berbicara mengenai masyarakat”. Bagi Comte sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil

Sosiologi Pendidikan

perkembangan ilmu pengetahuan dan sosiologi harus di bentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat bukan merupakan spekulasi (Soerjono Soekanto, 1981: 9).

Sosiologi yang merupakan penggambaran dari kehidupan yang ada dimasyarakat maka pada dasarnya objek sosiologi itu sendiri yaitu masyarakat. Sementara itu yang dimaksud masyarakat adalah manusia yang sadar hidup bersama dalam satu kesatuan untuk kurun waktu yang cukup lama.

Mengawali makna sosiologi sebagai bagian dari ilmu yang mempelajari masyarakat, sosiologi juga dikategorikan dalam ilmu pengetahuan, hal ini dipersepsikan bahwa:

- a. Sosiologi bersifat empiris, ilmu pengetahuan itu didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
- b. Sosiologi bersifat teoritis, ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi dan menyusunnya menjadi sebuah teori.
- c. Sosiologi bersifat kumulatif, teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti diperbaiki, memperluas dan memperhalus teori yang lama.
- d. Sosiologi bersifat non-etis, yang mempersoalkan fakta tertentu untuk tujuan menjelaskan fakta tersebut secara analitis (Soerjono Soekanto, 1981: 10).

Kesimpulan di atas mengarah pada penjelasan sosiologi merupakan disiplin ilmu sosial yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat nyata bukan teori karena masyarakat terlihat ada dan terlihat sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama dengan tujuan tertentu dan dalam kurun waktu yang lama.

Bab I Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan

Setelah penjelasan di atas mengenai makna dari sosiologi, selanjutnya penggalan kedua dari sosiologi pendidikan yaitu arti pendidikan. Kerangka UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan adalah:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan dalam undang-undang pendidikan nasional menyatakan sebagai usaha manusia yang secara sadar dan sengaja untuk direncanakan dengan harapan menjadi manusia, masyarakat, dan warga negara yang berpendidikan, berkepribadian, cerdas dan terampil. Pendidikan tersebut digambarkan menjadi suatu proses yang membutuhkan waktu tertentu dan sebagai hasilnya memiliki tujuan tertentu pula.

Menurut Tirtarahardja, Umar dan La Sulo (2005: 3-4) deskripsi tentang pendidikan meliputi kegiatan proses dan hasil, berikut proses dan hasil dari pendidikan: **Pertama**, pendidikan merupakan proses transformasi budaya. Transformasi ini diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain seperti dari generasi tua ke generasi muda. Adapun bentuk-bentuk transformasi budaya yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, disiplin, mandiri, dan sebagainya.

Kedua, pendidikan merupakan proses pembentukan kepribadian peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan

Sosiologi Pendidikan

terarah. Proses pembentukan pribadi melalui 2 sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri.

Ketiga, pendidikan merupakan proses penyiapan dan pembekalan manusia menjadi warga negara yang baik secara terencana. diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana.

Keempat, pendidikan merupakan hasil dari penyiapan, pembekalan, dan bimbingan manusia (peserta didik) untuk bekal hidup selanjutnya atau untuk orientasi bekerja. Pembekalan dasar meliputi pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja.

Pendidikan pada dasarnya adalah proses komunikasi yang didalamnya mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan-ketrampilan, di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat, dari generasi ke generasi (Dwi Siswoyo dkk, 2008: 25).

Pendapat lain dari Shударsono Saliman (1993 : 178) bahwa pendidikan adalah semua perbuatan dan usaha dari seorang pendidik untuk mengolah pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, serta keterampilannya. Sementara itu, pendidikan berupa dialog antara peserta didik dengan pendidik yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang dikehendaki oleh pendidik agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat (Satori Djam'an , 2007 : 1.15).

Lain halnya dengan pendapat Mudyahardjo (2002: 46) bahwa pendidikan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya yang

Bab I Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan

berlangsung tidak dalam batas usia tertentu tetapi berlangsung sepanjang hidup sejak lahir hingga akhir hayat (mati).

Pendidikan sepanjang hayat (*life long education*) adalah sebuah sistem pendidikan yang dilakukann oleh manusia ketika lahir sampai meninggal dunia. Konsep pendidikan sepanjang hayat tidak mengenal batas usia, semua manusia baik yang masih kecil hingga lanjut usia tetap bisa menjadi peserta didik, karena cara belajar sepanjang hayat dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Menurut pendapat Sudjana (2001: 217-218) pendidikan sepanjang hayat memberikan arah supaya pendidikan nonformal dikembangkan di atas prinsip-prinsip pendidikan di bawah ini :

1. Pendidikan hanya akan berakhir apabila manusia telah meninggal dunia.
2. Pendidikan sepanjang hayat merupakan motivasi yang kuat bagi peserta didik untuk merencanakan dan melakukan kegiatan belajar secara terorganisasi dan sistematis.
3. Kegiatan belajar bertujuan untuk memperoleh, memperbaharui, dan meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang telah dimiliki.
4. Pendidikan memiliki tujuan-tujuan berangkai dalam memenuhi kebutuhan belajar dan dalam mengembangkan kepuasan diri setiap manusia yang melakukan kegiatan belajar.
5. Perolehan pendidikan merupakan prasyarat bagi perkembangan kehidupan manusia, baik untuk meningkatkan kemampuannya, agar manusia selalu melakukan kegiatan belajar guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sosiologi Pendidikan

Pengertian di atas memberi makna bahwa pendidikan sebagai bagian belajar yang dilalui beberapa tahapan. Menurut Moh. Padil triyo dan Supriyatno (2007: 87) proses belajar yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar berlangsung melalui enam tahapan yaitu :

- a) Motivasi adalah keinginan untuk mencapai suatu hal. Apabila dalam diri peserta didik tidak ada minat untuk belajar, tentu saja proses belajar tidak akan berjalan dengan baik. Jika demikian halnya, pendidik harus menumbuhkan minat belajar tersebut dengan berbagai cara, antara lain dengan menjelaskan pentingnya pelajaran dan mengapa materi itu perlu dipelajari.
- b) Perhatian pada pelajaran yaitu peserta didik harus dapat memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Apabila hal itu tidak terjadi maka proses belajar akan mengalami hambatan. Perhatian peserta ini sangat tergantung pada pembimbing.
- c) Menerima dan mengingat artinya setelah memperhatikan pelajaran, seorang peserta didik akan mengerti dan menerima serta menyimpan dalam pikirannya. Tahap menerima dan mengingat ini harus terjadi pada diri orang yang sedang belajar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan dan pengingatan ini, seperti struktur, makna, pengulangan pelajaran , dan interverensi.
- d) Reproduksi yaitu proses belajar seseorang tidak hanya harus menerima dan mengingat informasi baru saja, tetapi ia juga harus dapat menemukan kembali apa-apa yang pernah dia terima. Agar peserta didik mampu

Bab I Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan

melakukan reproduksi, pendidik perlu menyajikan pengajarannya dengan cara yang mengesankan.

- e) Generalisasi yaitu peserta didik harus mampu menerapkan hal yang telah dipelajari di tempat lain dan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Generalisasi juga dapat diartikan penerapan hal yang telah dipelajari dari situasi yang satu ke situasi yang lain.
- f) Menerapkan apa yang telah diajarkan serta umpan balik yaitu tahapan dimana peserta didik harus sudah memahami dan dapat menerapkan apa yang telah diajarkan. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa peserta didik telah benar-benar memahami, maka pembimbing dapat memberikan tugas atau tes yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Tes yang diberikan pun dapat berupa tes tertulis maupun lisan. Kemudian, pendidik berkewajiban memberikan umpan balik berupa penjelasan mana yang benar dan mana yang salah. Manfaat umpan balik seperti itu, peserta didik dapat mengetahui seberapa ia memahami apa yang diajarkan dan dapat mengoreksi dirinya sendiri.

Tujuan dari proses belajar sepanjang hayat adalah untuk mengembangkan diri, memberikan kemampuan peserta didik untuk berbuat seperti orang lain, membebaskan dari kebodohan, menjadi manusia yang kreatif, sensitif, dan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan. Untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan diri, memberikan kemampuan kepada peserta didik agar dapat berbuat seperti orang lain, menumbuhkan sikap mandiri, terampil, terbuka terhadap perubahan kemajuan teknologi, untuk mendorong inklusi sosial

Sosiologi Pendidikan

dan keperluan masyarakat, bagaimana pendidikan masyarakat dapat berkontribusi untuk membangun masyarakat yang demokratis dan adil (Hill, Lilian H, 2005: 55).

Penjelasan di atas telah dipisahkan berdasarkan komponen istilah sosiologi dan pendidikan. Oleh sebab itu, penjabaran sosiologi pendidikan merupakan cakupan dari dua istilah keilmuan. Pendapat S. Nasution (2011: 48) mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk memperoleh perkembangan kepribadian individu yang lebih baik.

FG.Payne (Abu Ahmadi, 2007: 19) berpendapat tentang sosiologi pendidikan pada dasarnya sebagai ilmu yang tidak hanya mempelajari masalah-masalah sosial dalam pendidikan saja, melainkan juga tujuan pendidikan, bahan kurikulum, strategi belajar, sarana belajar, dan sebagainya.

Lain halnya dengan pendapat Ravik Karsidi (2007: 1) sosiologi pendidikan lebih menekankan pada implikasi dan akibat sosial pendidikan dan melibatkan masalah-masalah pendidikan dilihat dari aspek sosial kebudayaan, politik, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ravik Karsidi juga berpendapat bahwa obyek studi dari sosiologi pendidikan berupa tingkah laku manusia dan institusi (lembaga) yang terikat khususnya di bidang pendidikan.

Pendapat serupa di atas, pendapat Dodson (Ravik Karsidi, 2007: 3) bahwa “sosiologi pendidikan mempersoalkan pertemuan dan percampuran dari lingkungan sekitar kebudayaan secara totalitas sedemikian rupa sehingga terbentuknya tingkah laku tertentu dan sekolah atau lingkungan pendidikan dianggap sebagai bagian dari *total cultural milieu*”.

Bab I Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan

Beberapa argumen para tokoh di atas, dapat kita simpulkan bahwa penjelasan sosiologi pendidikan memberikan penggambaran pada ilmu yang berbicara pada masalah-masalah sosial pendidikan yang berisi tentang tingkah laku manusia dan institusi pendidikan sebagai percampuran dengan lingkungan sosial budaya, politik, ekonomi dalam totalitas kehidupan bermasyarakat.

Adapun tujuan dari sosiologi pendidikan (Ary H.Gunawan, 2000: 50-53) yaitu:

- 1) Sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis proses sosialisasi anak khususnya pada lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis perkembangan (dinamisme) dan kemajuan sosial di masyarakat.
- 3) Sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis status (*prestise*) pendidikan dalam masyarakat.
- 4) Sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis partisipasi (ikut serta) orang berpendidikan dalam kegiatan sosiologi.
- 5) Sosiologi pendidikan bertujuan membantu menemukan dari tujuan pendidikan itu sendiri.

Sementara itu, dalam pandangan Abu Ahmadi (2007: 18-19) tujuan sosiologi pendidikan di Indonesia adalah :

- 1) Memahami peranan sosiologi dalam kegiatan sekolah terhadap masyarakat, terutama apabila sekolah ditinjau dari segi kegiatan intelektual.
- 2) Memahami seberapa jauh guru dapat membina kegiatan sosial anak didiknya untuk mengembangkan kepribadian anak.
- 3) Mengetahui pembinaan ideologi Pancasila dan kebudayaan nasional Indonesia di lingkungan pendidikan dan pengajaran.

Sosiologi Pendidikan

- 4) Mengadakan integrasi kurikulum pendidikan dengan masyarakat sekitarnya agar pendidikan mempunyai kegunaan praktis di masyarakat dan negara.
- 5) Menunjang pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak.
- 6) Memberi sumbangan yang positif terhadap perkembangan ilmu pendidikan.
- 7) Memberi pegangan terhadap penggunaan prinsip-prinsip sosiologi untuk mengadakan sosialisasi sikap dan kepribadian anak didik.

B. Histori Sosiologi Pendidikan

Sejarah lahirnya sosiologi pendidikan bermula dari lahirnya ilmu sosiologi itu sendiri. Sosiologi lahir pada abad ke-19 di Eropa yang pada masa itu adanya pergeseran pandangan tentang masyarakat sebagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan kokoh. Istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh August Comte (1798-1857) pada tahun 1839 (Tirtarahardja, Umar dan La Sulo, 1994: 96). Sedangkan tokoh sosiologi di Perancis, pelopor sosiologi pendidikan yang terkemuka adalah Durkheim (1858-1917). Sementara itu, di Jerman sebagai tokoh pelopornya yaitu Max Weber (1864-1920) menyoroti keadaan dan penyelenggaraan pendidikan pada masyarakat dengan latar belakang sosial budaya serta tingkat kemajuan berbeda.

Selanjutnya di negara Inggris, kajian sosiologi khususnya pembahasan pada pendidikan kurang diminati, yang pada saat itu dipelopoti oleh Herbert Spencer (1820-1903) yang dikarenakan lebih pada kajian Darwinisme Sosial. Akan tetapi, lambat laun di Inggris muncul aliran sosiologi yang memfokuskan perhatian

Bab I Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan

pada pendidikan pada kajian mikro, yaitu mengenai interaksi sosial yang terjadi dalam ruang belajar. Tokoh pelopornya adalah Berstein dengan berusaha menyajikan lukisan tentang kenyataan dan permasalahan yang terdapat dalam sistem persekolahan dengan tujuan agar para pengambil keputusan menentukan langkah-langkah perbaikan yang tepat. Pendekatan Berstein tersebut dikenal dengan beberapa istilah, yaitu *atheoretical, pragmatic, descriptive, and policy focused* (Rochman Natawidjaja dkk, 2007: 80).

Istilah keilmuan sosiologi pendidikan di Indonesia pertama dikenalkan sekitar tahun 1900 yang memusatkan perhatian pada peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat untuk mengingatkan kembali pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Masa penjajahan Belanda kita masih ingat dengan “politis etis” atau politik balas budi. Kaum intelektual Indonesia memiliki keinginan dan mendesak agar pemerintah jajahan melakukan politik balas budi untuk memerangi ketidakadilan melalui edukasi, irigasi, dan emigrasi. Meskipun pada mulanya program pendidikan itu terlalu idealis dan elitis, lama kelamaan meluas dan meningkat ke arah yang makin populer dan merakyat sampai penyelenggaraan wajib belajar dewasa ini. Lantas pelopor pendidikan pada saat itu antara lain: Van Deventer, R.A.Kartini, dan R.Dewi Sartika.

Selain itu, dalam pendapat Ary H. Gunawan (2000: 60) menyatakan bahwa sejarah sosiologi pendidikan terdiri dari 4 fase, yaitu: ***fase pertama***, sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama filsafat umum. Pada fase ini sosiologi merupakan cabang filsafat sehingga diistilahkan dengan filsafat sosial. ***Fase kedua*** yaitu mulai adanya keinginan-

keinginan untuk membangun susunan ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa nyata (empiris). Fase ini mulai adanya keinginan memisahkan diri antara filsafat dengan sosial. **Fase ketiga** yaitu awal mula sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Salah satu orang yang berkecimpung pertama kali adalah Auguste Comte kemudian dijuluki sebagai “bapak sosiologi”. **Fase keempat** yaitu keinginan untuk bersama-sama memberikan batas yang tegas tentang obyek sosiologi, sekaligus memberikan pengertian-pengertian dan metode-metode sosiologi yang khusus. Tokoh pada fase ini sekitar akhir abad 18 dan awal 19 antara lain adalah Fichte, Novalis, Adam Muller, dan Hegel.

C. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan

Berbicara tentang ruang lingkup sosiologi pendidikan sama artinya dengan sosiologi dikaitkan dalam lingkup institusi pendidikan formal, yang meliputi:

1. Sosiologi untuk guru.
2. Sosiologi sekolah.
3. Sosiologi mengajar (Moh. Padil Triyo dan Supriyatno, 2010: 30).

Di Indonesia penggunaan sosiologi pendidikan merupakan penjabaran dari *educational sociology*. Menurut Vembriarto ada tiga kajian sosiologi pendidikan. *Pertama*, golongan yang terlalu menitikberatkan pandangan pendidikan daripada pandangan sosialnya. *Kedua*, golongan yang terlalu menitikberatkan pandangan sosiologi daripada pendidikan. *Ketiga*, golongan yang menitikberatkan pada teori. Maka dari itu penyelidikan dan pengembangan sosiologi pendidikan selalu berpusat pada

Bab I Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan

masalah-masalah, mana yang dianggap penting, benar, dan harus diterapkan dalam menyusun ruang lingkup sosiologi pendidikan (Moh. Padil Triyo dan Supriyatno, 2010: 32).

Ruang lingkup sosiologi pendidikan secara komplit disajikan dalam bentuk kajian ilmu sosiologi itu sendiri yang mencakup:

1. Konsep dasar sosiologi pendidikan
2. Tujuan, pendekatan, dan signifikansi sosiologi pendidikan
3. Sejarah dan tokoh sosiologi pendidikan
4. Teori sosiologi pendidikan
5. Pengembangan sosial peserta didik
6. Sosiologi bagi guru
7. Sekolah dan masyarakat
8. Sekolah dan tata sosial
9. Sosialisasi di sekolah, keluarga dan masyarakat
10. Hubungan guru, murid dan masyarakat
11. Organisasi sekolah
12. Sosiologi dan kurikulum
13. Proses belajar mengajar dari sudut sosiologi
14. Kebudayaan sekolah, masyarakat dan keluarga
15. Pola interaksi sekolah, keluarga, dan masyarakat
16. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat
17. Institusi masyarakat
18. Pendidikan *multi cultural* (Moh. Padil Triyo dan Supriyatno, 2010: 35).

Selain dari ruang lingkup di atas, berikut terdapat empat pendekatan dalam sosiologi pendidikan (Soerjono Soekanto, 1981: 11) yaitu:

Pertama, Pendekatan Imitasi.

Artinya bahwa melakukan pendekatan sosiologi pendidikan dalam masyarakat melalui proses saling mengimitasi (meniru) dari orang lain. Bahkan masyarakat baru menjadi masyarakat yang sebenarnya ketika manusia mulai mengimitasi kegiatan manusia lainnya. Proses meniru tersebut menggambarkan dalam peniruan fisik ataupun pola perilaku tertentu di suatu masyarakat khususnya dalam ranah pendidikan. Misalkan, proses peniruan yang dilakukan oleh individu dari lingkungan di sekitarnya. Seorang anak mengalami proses belajar (pendidikan) yang pertama adalah di keluarga. Orang tua memberi gambaran pola perilaku baik buruknya akan ditirukan oleh anaknya. Mereka akan menirukan segala sesuatu apa yang dilihat, dilakukan, dan didengar dari lingkungan sekitar anak. Sebagai contoh bahwa terdapat anak yang rajin sholat pada saat setiap kali melihat kedua orang tuanya rajin dan tekun melakukan ibadah sholat.

Kedua, Pendekatan Sugesti.

Artinya bahwa pendekatan sosiologi pendidikan yang berupa pengaruh psikis, baik yang datang dari diri sendiri maupun yang datang dari orang lain, umumnya sugesti diterima tanpa adanya kritik dari individu yang bersangkutan. Sugesti adalah suatu proses di mana individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Oleh sebab itu, proses belajar seorang individu berasal dari dorongan insting dalam melakukan suatu tindakan apapun. Sebagai contoh sugesti yang secara tidak sadar kita merasakannya yaitu sugesti berobat ke dokter. Pada saat kita akan berusaha melakukan penyembuhan dengan berobat ke tempat lembaga kesehatan, baik secara instansi seperti di rumah

Bab I Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan

sakit atau puskesmas, maupun langsung pada dokter praktek sekaligus. Setiap kali berobat memiliki kecocokan dan kenyamanan untuk sembuh dari penyakitnya. Kecocokan dan nyaman tersebut terkadang muncul suatu dorongan tertentu yang menjadikan setiap individu ada perasaan yang tidak bisa tersampaikan bahwa berobat ke ahli kesehatan akan merasa cepat sembuh dengan berobat ke dokter A dibandingkan ke dokter B. Sedangkan beberapa individu lain mengatakan hal sebaliknya, bahwa berobat ke dokter B lebih baik dibandingkan ke dokter A.

Ketiga, Pendekatan Identifikasi.

Artinya pendekatan sosiologi pendidikan yang merupakan dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Identifikasi hampir sama maknanya dengan imitasi. Dikarenakan keduanya terdapat keinginan untuk sama dari apa yang ada di masyarakat. Akan tetapi, keduanya berbeda yaitu jika imitasi merupakan suatu peniruan untuk menjadi sama namun hanya sebagian atau tidak totalitas. Sementara itu, identifikasi merupakan peniruan untuk menjadi sama namun secara totalitas. Misalkan, anak laki-laki yang begitu mengidamkan sosok ayah dalam kepemimpinan di keluarga sehingga ada keinginan untuk menjadi sama seperti sang ayah jika kelak besa nanti. Peniruan tersebut meliputi peniruan pada cara berpakaian sang ayah, cara berbicara, cara mendidik anak-anaknya, dan cara berperilaku sang ayah.

Keempat, Pendekatan Simpati.

Artinya adanya kecenderungan seseorang untuk tertarik pada orang lain, sedangkan orang yang memiliki kecenderungan menolak orang lain disebut antipati. Simpati akan menjalin hubungan saling pengertian yang saling mendalam dalam interaksi

antarindividu, ingin mengerti dan ingin kerja sama dengan orang lain serta saling melengkapi satu sama lain. Tertarik disini menjadi salah satu contoh menuju perdamaian. Sebagai contoh di suatu kelompok masyarakat terdapat konflik, dalam konflik ini akan mulai mereda manakala kedua kelompok yang berkonflik tersebut merasa satu bagian dari kelompoknya dikarenakan adanya ikatan pernikahan untuk menjadi satu dalam kekeluargaan.

D. Benang Merah Sosiologi Pendidikan

Sosiologi pendidikan menjadi salah satu bagian dari ilmu sosial terapan yang terdiri dari dua suku kata, yaitu sosiologi dengan pendidikan. Sosiologi pada dasarnya penggambaran dari kehidupan yang ada dimasyarakat yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat nyata bukan teori karena masyarakat terlihat ada dan terlihat sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama dengan tujuan tertentu dan dalam kurun waktu yang lama. Sementara itu, pendidikan merupakan usaha yang secara sadar dan sengaja untuk direncanakan dengan harapan menjadi manusia, masyarakat, dan warga negara yang berpendidikan, berkepribadian, cerdas dan terampil. Pendidikan tersebut digambarkan menjadi suatu proses yang membutuhkan waktu tertentu dan sebagai hasilnya memiliki tujuan tertentu pula. Tujuan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya yang berlangsung tidak dalam batas usia tertentu tetapi berlangsung sepanjang hidup sejak lahir hingga akhir hayat (mati). Oleh karena itu, sosiologi pendidikan dapat disimpulkan pada studi sosial yang lebih menekankan pada

Bab I Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan

implikasi dan akibat sosial pendidikan dan melibatkan masalah-masalah pendidikan yang dilihat dari aspek sosial kebudayaan, politik, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Sosiologi pendidikan di Indonesia pertama dikenalkan sekitar tahun 1900 yang memusatkan perhatian pada peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat untuk mengingatkan kembali pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Masa penjajahan Belanda kita masih ingat dengan “politis etis” atau politik balas budi. Sejarah sosiologi pendidikan terdiri dari 4 fase, yaitu: **fase pertama**, sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama filsafat umum. Pada fase ini sosiologi merupakan cabang filsafat sehingga diistilahkan dengan filsafat sosial. **Fase kedua** yaitu mulai adanya keinginan-keinginan untuk membangun susunan ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa nyata (empiris). Fase ini mulai adanya keinginan memisahkan diri antara filsafat dengan sosial. **Fase ketiga** yaitu awal mula sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Salah satu orang yang berkecimpung pertama kali adalah Auguste Comte kemudian dijuluki sebagai “bapak sosiologi”. **Fase keempat** yaitu keinginan untuk bersama-sama memberikan batas yang tegas tentang obyek sosiologi, sekaligus memberikan pengertian-pengertian dan metode-metode sosiologi yang khusus.

Ruang lingkup sosiologi pendidikan meliputi: Konsep dasar sosiologi pendidikan, Tujuan, pendekatan, dan signifikansi sosiologi pendidikan, Sejarah dan tokoh sosiologi pendidikan, Teori sosiologi pendidikan, Pengembangan sosial peserta didik, Sosiologi bagi guru, serta sekolah dan masyarakat. Selanjutnya ruang lingkup juga meliputi: Sekolah dan tata sosial, Sosialisasi di

Sosiologi Pendidikan

sekolah, keluarga dan masyarakat, Hubungan guru, murid dan masyarakat, Organisasi sekolah, Sosiologi dan kurikulum, Proses belajar mengajar dari sudut sosiologi, Kebudayaan sekolah, masyarakat dan keluarga, Pola interaksi sekolah, keluarga, dan masyarakat, Pengaruh sekolah terhadap masyarakat, Institusi masyarakat, dan Pendidikan *multi cultural*.

Selain itu, sosiologi pendidikan juga memiliki empat pendekatan, antara lain: pendekatan imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati.

E. Uji Kompetensi

Sosiologi Pendidikan secara kontekstual sudah dijabarkan dalam beberapa sub pokok bahasan sebelumnya. Tindak lanjut pemahaman dan analisis pokok bahasan Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan, berikut ini beberapa latihan kompetensi yang dapat dicari solusinya dalam teori dan kehidupan sehari-hari.

1. Sosiologi menjadi ilmu sosial terapan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan pada masa kini. Kegunaan sosiologi pendidikan menjadi bagian yang penting pula bagi seorang guru. Oleh sebab itu, gambarkan secara analisa Saudara bagaimana peran dan kedudukan sosiologi pendidikan bagi seorang guru?
2. Sosiologi pendidikan di Indonesia pertama dikenalkan sekitar tahun 1900 yang memusatkan perhatian pada peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat untuk mengingatkan kembali pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Masa penjajahan Belanda kita masih ingat dengan “politis etis” atau politik balas budi. Menurut argumen

Bab I Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan

Saudara politik balas budi apa yang kemudian bisa disajikan dalam porsi sosiologi pendidikan pada masa sekarang?

3. Pendekatan sosiologi pendidikan menekankan pada pendekatan imitasi, identifikasi, sugesti, dan simpati. Berikan tanggapan Saudara mengenai contoh-contoh keempat pendekatan tersebut di sekolah?

BAB II UNSUR PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI

Kompetensi Dasar:

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Memahami unsur dalam Sosiologi Pendidikan.
2. Mengidentifikasi makna peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi, alat dan, metode pendidikan.
3. Memaknai Unsur pendidikan dalam sosiologi secara garis besar.
4. Menjawab soal latihan mengenai unsur sosiologi pendidikan.

Pada bab pertama telah dijabarkan tentang konsep dasar sosiologi pendidikan beserta sejarah dan ruang lingkungannya. Berikut ini pembahasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang terlibat dalam proses pendidikan (Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo, 2005: 19) meliputi: *Pertama*, Subjek yang dibimbing (peserta didik). *Kedua*, Orang yang membimbing (pendidik). *Ketiga*, Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif). *Keempat*, Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan). *Kelima*,

Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan). *Keenam*, Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode). *Ketujuh*, Tempat dimana peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan).

Berikut ini deskripsi dari unsur-unsur pendidikan di atas, adalah sebagai berikut.

A. Peserta Didik

Menurut pasal 1 ayat 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), peserta didik

didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu dikembangkan. Potensi terdiri dari tiga kategori, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Artinya bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Definisi lain peserta didik yaitu orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi (kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan (Samsul Nizar, 2002: 25). Sementara itu, tulisan Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2002: 26) pengertian peserta didik adalah orang yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai suatu pribadi atau individu.

Penggunaan istilah peserta didik juga dikenal dengan istilah lain seperti Siswa, Mahasiswa, Warga Belajar, Pelajar, Murid serta Santri, yaitu:

1. Siswa adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2. Mahasiswa adalah istilah umum bagi peserta didik pada jenjang pendidikan perguruan tinggi.
3. Warga Belajar adalah istilah bagi peserta didik nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

4. Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat menengah maupun tingkat atas.
5. Murid memiliki definisi yang hampir sama dengan pelajar dan siswa.
6. Santri adalah istilah bagi peserta didik pada jalur pendidikan nonformal, khususnya pesantren atau sekolah-sekolah yang berbasiskan agama islam (<http://renizulianti.blogspot.com>).

Berdasarkan analisis beberapa tokoh di atas, dapat tarik simpulan bahwa peserta didik adalah warga belajar secara istilah murid, pelajar, siswa, santri, ataupun mahasiswa yang mengembangkan pendidikan pada jalur jenjang tertentu guna melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai makhluk Tuhan, manusia dan sebagai warga negara.

Selanjutnya berbicara tentang karakteristik peserta didik menurut Danim Sudarwan (2010: 4) yaitu:

- a. Kemampuan dasar, misalnya, kemampuan kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotor.
- b. Latar belakang kultural lokal, status sosial, status ekonomi, agama, dan sebagainya.
- c. Perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain.
- d. Cita-cita, pandangan ke depan, keyakinan diri, daya tahan, dan lain-lain.

Beberapa karakteristik di atas menyadari bahwa sebagai peserta didik juga diharapkan memiliki etika. Adapun etika peserta didik, meliputi:

- 1) Peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu.

Sosiologi Pendidikan

- 2) Tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi roh dengan berbagai sifat keutamaan.
- 3) Memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat.
- 4) Setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya.
- 5) Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah (Ramayulis, 2004: 119).

Asosiasi Nasional Sekolah Menengah (*Nasional Association of Hight School*) Amerika Serikat (Danim Sudarwan, 2010: 3) mengklasifikasikan kebutuhan-kebutuhan peserta didik dilihat dari dimensi pengembangannya, yaitu:

- a) Kebutuhan intelektual, dimana peserta didik memiliki rasa ingin tahu, termotivasi untuk mencapai prestasi saat ditantang dan mampu berpikir untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks.
- b) Kebutuhan sosial, dimana peserta didik mempunyai harapan yang kuat untuk memiliki dan dapat diterima oleh rekan-rekan mereka sambil mencari tempatnya sendiri di dunianya.
- c) Kebutuhan fisik, dimana peserta didik “jatuh tempo” perkembangan pada tingkat yang berbeda dan mengalami pertumbuhan yang cepat dan tidak beraturan.
- d) Kebutuhan emosional dan psikologis, dimana peserta didik rentan dan sadar sendiri, dan sering mengalami “*mood swings*” yang tidak terduga.
- e) Kebutuhan moral, dimana peserta didik idealis dan ingin memiliki kemauan kuat untuk membuat dunia dirinya

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

dan dunia di luar dirinya menjadi tempat yang lebih baik.

- f) Kebutuhan homodivinous, dimana peserta didik mengakui dirinya sebagai makhluk yang berketuhanan atau makhluk homoriligius alias insan yang beragama.

Setiap peserta didik secara kebutuhan pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Berikut ini hak dari peserta didik antara lain: (1) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. (2) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. (3) Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. (4) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. (5) Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

Demikian pula dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta didik, meliputi: **Pertama**, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. **Kedua**, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Ketiga**, warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 20 Tahun 2003).

Lain halnya kewajiban sebagai peserta didik khusus bagi mereka yang telah memasuki usia wajib belajar telah di atur

dalam PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Peraturan pemerintah tersebut menetapkan bahwa satuan pendidikan dasar menyelenggarakan program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan. Penerimaan peserta didik pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini. Selain itu jika satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi penyelenggara program wajib belajar yang melanggar ketentuan administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Sementara itu, menurut Samsul Nizar (2002: 38) menjabarkan beberapa kewajiban peserta didik antara lain:

- a) Peserta didik hendaknya membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu, hal ini disebabkan karena menuntut ilmu adalah ibadah dan tidak sah ibadah kecuali dengan hati yang bersih.
- b) Tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiari ruh dengan berbagai sifat keutamaan.
- c) Memiliki kemampuan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu diberbagai tempat.
- d) Setiap peserta didik wajib mengormati pendidiknyaa.
- e) Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar.

Adanya etika, hak dan kewajiban di atas menggambarkan bahwa sebagai peserta didik yang merupakan subyek yang belajar dan menuntut ilmu, tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat, wajib menghormati pendidiknya dan peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh. Peserta didik sebagai manusia merupakan pribadi yang utuh, yakni manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani. Kesatuan tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan intelektual, kebutuhan Sosial, dan kebutuhan untuk mendapatkan status.

B. Pendidik

Pendidik memiliki peran penting dalam majunya dunia pendidikan. Istilah pendidik biasa dikenal dengan nama “guru”. Menurut Zakiah Darajat (2006: 39) guru adalah pendidik profesional karena secara implisit dirinya telah merelaka, menerima dan memikul sebagian tanggung jawabnya pendidikan yang telah dipikul dipundak para orang tua.

WJS Poerwadarminta (2007: 393) dalam kamus umum bahasa memberi definisi bahwa guru adalah orang yang pekerjaanya mengajar. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 39, bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pandangan Agama Buddha, istilah guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran. Murid seorang guru memandang gurunya sebagai jelmaan *Buddha* atau *Bodhisattva*. Secara formal, guru adalah seorang pengajar di

sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yakni sebagaimana tercantum dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 sebagai berikut guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan para ahli di atas, ditarik simpulan bahwa seorang guru adalah tenaga kependidikan yang profesional sebagai orang tua kedua setelah di rumah dalam mengembangkan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing dan mengevaluasi peserta didik.

Oleh sebab itu, peran guru sangat penting dalam membentuk perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidup mereka. Hal ini bermula dari manusia sebagai makhluk yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir bahkan pada saat meninggal. Fenomena tersebut memberikan gambaran bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya. Demikian halnya peserta didik, ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah, pada saat itu juga ia menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal (E.Mulyasa, 2008: 35).

Suparlan menyebutkan peran dan fungsi guru dengan istilah *Educator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, Motivator, Dinamissator, Evaluator, dan Fasilitator* (EMASLIMDEF).

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

Tabel 2.1. Peran dan Fungsi Guru

No	Peran Guru EMASLIMDEF	Peran	Fungsi
1.	E	<i>Educator</i>	a. Mengembangkan Kepribadian b. Membimbing c. Membina budi pekerti d. Memberikan pengarahan
2.	M	<i>Manager</i>	Mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
3.	A	<i>Administrator</i>	a. Membuat daftar referensi b. Membuat daftar penilaian c. Melaksanakan teknik administrasi sekolah
4.	S	<i>Supervisor</i>	a. Membantu b. Menilai c. Memberi bimbingan tehnik
5.	L	<i>Leader</i>	Mengawal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tanpa harus mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
6.	I	<i>Innovator</i>	Melakukan kegiatan yang kreatif menentukan strategi, metode, cara-cara, konsep-konsep yang baru dalam pembelajaran
7.	M	<i>Motivator</i>	Memberi dorongan kepada siswa untuk dapat belajar lebih giat

Sumber: Suparlan (Ngainun Naim, 2009: 33)

Tugas, peran dan fungsi guru merupakan sesuatu kesatuan yang utuh. Maka dari itu penjabaran dari peran guru dalam pandangan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang Undang No. 14 Tahun 2005 peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi dari peserta didik (E.Mulyasa, 2007: 197-198).

Pertama, Guru Sebagai Pendidik.

Guru merupakan pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggungjawab, wibawa, mandiri dan disiplin, nilai-nilai, norma moral dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Sebagai pendidik guru harus berani mengambil keputusan secara mandiri berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan.

Kedua, Guru Sebagai Pengajar.

Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru sebagai pengajar, harus terus mengikuti perkembangan teknologi. Dengan demikian apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang terbaru dan tidak ketinggalan zaman. Perkembangan teknologi menimbulkan banyak buku dengan harga relatif murah dan peserta didik dapat belajar melalui internet dengan tanpa batasan waktu dan ruang, belajar melalui televisi, radio dan surat kabar yang setiap saat hadir di hadapan

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

kita. Guru memfasilitasi untuk memudahkan gaya belajar pada siswa (peserta didik).

Ketiga, Guru Sebagai Pembimbing.

Guru sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggungjawab. Artinya bahwa guru sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

Keempat, Guru Sebagai Pengarah.

Guru menjadi seorang pengarah bagi peserta didik seperti halnya menjadi orang tua. Sebagai pengarah guru harus mampu mengarkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya. Hal ini diharapkan guru mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, sehingga peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat.

Kelima, Guru Sebagai Pelatih.

Guru melakukan pelatihan melalui proses pendidikan dan pembelajaran siswa melalui latihan ketrampilan, baik intelektual maupun motorik. Kegiatan ini menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik.

Keenam, Guru Sebagai Penilai.

Kegiatan yang paling akhir dari seorang guru adalah menjadi seorang penilai. Penilaian atau evaluasi merupakan penilaian terhadap aspek pembelajaran yang melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Penilaian berupa proses dan hasil yang diambil melalui tes atau non tes.

Secara profesi, guru dituntut untuk profesional. Apa sebenarnya arti profesi itu? Dan seperti apa guru yang profesional? Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Hal ini juga pengaruh terhadap penampilan atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan di profesinya. Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus. Profesionalisasi adalah proses atau perjalanan waktu yang membuat seseorang atau kelompok orang menjadi profesional. Profesionalitas merupakan sikap para anggota profesi yang menguasai dan sungguh-sungguh kepada profesinya (Rusyan Tabrani, 1999: 79).

Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan anak usia dini. Sebagai seorang pendidik profesional maka guru dituntut untuk menguasai substansi kajian yang mendalam, dapat melaksanakan

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

pembelajaran yang mendidik, kepribadian, dan memiliki komitmen dan perhatian terhadap perkembangan peserta didik. Dengan demikian, guru sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian, membantu pengembangan dan pengelolaan program sekolah serta mengembangkan profesionalitas. Arti kata profesionalisme guru didukung oleh tiga hal yang amat sangat penting, tiga hal tersebut adalah keahlian, komitmen dan keterampilan. Untuk dapat meningkatkan tugasnya dengan baik pemerintah selalu memperbaharui undang-undang tentang keguruan baik secara langsung maupun yang diatur dalam permendiknas (Suparlan, 2006: 48).

Berdasarkan pembedaan istilah profesi, profesional, profesionalisme, profesionalisasi, dan profesionalitas di atas, pada dasarnya tidak semua pekerjaan bisa disebut sebagai profesi. Berikut ini 5 pekerjaan dapat dikategorikan sebagai sebuah profesi, yaitu:

- a. Adanya pengakuan oleh masyarakat dan pemerintah mengenai bidang layanan tertentu, dan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai keahlian tertentu pula.
- b. Bidang ilmu pengetahuan yang menjadi landasan teknik dan prosedur kerja yang unik yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang pekerjaan lainnya.
- c. Memerlukan proses persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum orang mengerjakan professional tersebut.
- d. Memiliki mekanisme yang diperlukan untuk melakukan seleksi secara efektif. Sehingga hanya mereka yang benar-

benar kompetitif diperbolehkan melaksanakan bidang tersebut.

- e. Memiliki organisasi profesi yang dapat melindungi anggotanya, serta berfungsi untuk menyakinkan pihak lain yang terkait bahwa para anggota profesi tersebut dapat menyelenggarakan layanan keahlian yang terbaik (E.Mulyasa, 2007: 79).

Profesionalnya seorang guru tidak lain merupakan rujukan dari Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan kepada seluruh pendidik untuk memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang meliputi:

- 1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Kualifikasi akademik dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan.
- 3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Kajian kompetensi guru secara teoritis dikaji secara terpisah berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa ada 4 standar kompetensi guru untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai tenaga kependidikan yaitu meliputi: 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional.

Pertama, Kompetensi Pedagogik.

Pedagogik mempunyai arti ilmu mendidik. Kompetensi pedagogik merupakan suatu performansi (kemampuan)

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

seseorang dalam bidang ilmu pendidikan. Menurut Valente (Matondang, 2008: 9) menyatakan bahwa *“This kind of competency is the main problem related to the didacted and methodology used in classroom teaching”*. Maka dalam kompetensi pedagogik meliputi pemahaman tentang: (a) sifat dan ciri anak didik serta perkembangannya, (b) konsep-konsep pendidikan yang berguna membantu anak didik, (c) metodologi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak didik, dan (d) sistem evaluasi yang baik dan tepat.

Pada bidang pedagogik, seorang guru harus memiliki kompetensi: (1) mampu mengidentifikasi dan memahami karakteristik peserta didik dari aspek sosial, moral, kultural, emosional dan intelektual, (2) mampu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, (3) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (4) mampu merancang pembelajaran yang mendidik, (5) mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, (6) mampu merancang penilaian proses dan hasil belajar, (7) mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, dan (8) mampu menggunakan hasil penilaian untuk berbagai kepentingan pembelajaran dan pendidikan.

Kedua, Kompetensi Kepribadian.

Kompetensi kepribadian bagi guru adalah pribadi guru yang terintegrasi dengan penampilan kedewasaan yang layak diteladani, memiliki sikap dan kemampuan memimpin yang demokratis serta mengayomi peserta didik. Jadi seorang guru harus memiliki kepribadian yang: a) mantap, b) stabil, c) dewasa,

d) arif, e)berwibawa, f)berakhlak mulia, dan g) dapat menjadi tauladan (E. Mulyasa, 2007:118).

Berdasarkan kompetensi kepribadian tersebut, seorang guru harus: (1)mampu bertindak secara konsiten sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, (2) mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, (3) mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia sebagai tauladan bagi peserta didik dan masyarakat, (4) mempunyai rasa bangga menjadi guru, dapat bekerja mandiri, mempunyai etos kerja, rasa percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi, (5)berperilaku jujur dan disegani, (6) mampu mengevaluasi diri dan kinerja secara terus menerus, (7)mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan dengan belajar dari berbagai sumber ilmu dan (8) menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Sedangkan menurut User Uzman (2003: 66) kompetensi kepribadian mencakup:

- a) Kemampuan mengembangkan kepribadian.
- b) Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi.
- c) Kemampuan bimbingan dan penyuluhan.
- d) Kemampuan yang terkait dengan administrasi sekolah.
- e) Kemampuan melaksanakan penelitian sederhana.

Ketiga, Kompetensi Sosial.

Menurut Ramly dan E. Trisyulianti (2006: 87) guru merupakan yang memberikan gambaran (pantulan diri) bagaimana dia memandang dirinya, masa depannya, dan profesi yang ditekuninya. Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan kompetensi sosial merupakan suatu kemampuan seorang guru dalam hal berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan:

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

a) peserta didik, b) sesama pendidik, c) tenaga kependidikan, d) orangtua/wali peserta didik, dan e) masyarakat sekitar (Depdiknas, 2003:27).

Jadi seorang guru harus: (1) mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, (2) mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, (3) mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, (4) bersikap kooperatif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi, dan (5) mampu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya.

Keempat, Kompetensi Profesional.

Kompetensi professional merupakan suatu kemampuan sesuai dengan keahliannya kepada peserta didik dalam rangka menjalankan tugas dan profesinya. Seorang guru memiliki kompetensi profesional bila guru tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar di bidangnya.

Bermula dari pengetahuan dan kemampuan tersebut, maka kompetensi profesional guru dapat dikategorikan atas: a) memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang keahliannya, b) mampu memilih dan mengembangkan materi pelajaran, c) menguasai materi, struktur, dan konsep pola pikir keilmuan yang mendukung bidang keahlian, d) menguasai metode untuk melakukan metode untuk melakukan pengembangan ilmu dan telaah kritis terkait dengan bidang keahlian, e) kreatif dan inovatif dalam penerapan bidang ilmu yang terkait dengan bidang

keahlian, f) mampu mengembangkan kurikulum dan silabus yang terkait dengan bidang keahlian, g) mampu melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran, h) mampu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan maupun tulisan, i) mampu memanfaatkan teknologi informasi dan pembelajaran, berkomunikasi dan mengembangkan diri sebagai seorang guru.

Sedangkan menurut Uzer Usman (2003: 66) bahwa kompetensi profesional meliputi aspek:

- 1) Menguasai landasan kependidikan,
- 2) Menguasai bahan pengajaran,
- 3) Mampu menyusun program pengajaran,
- 4) mampu melaksanakan program pengajaran, serta
- 5) mampu menilai hasil dan proses belajar mengajar

Seorang guru profesional, guru tidak hanya memiliki keahlian, keterampilan dan kemampuan, akan tetapi sebagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantara: "*Tut wuri handayani, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa*". Maknanya bahwa guru tidak cukup dengan menguasai materi pembelajaran akan tetapi mengayomi murid, menjadi contoh atau teladan bagi murid serta selaku mendorong murid untuk lebih baik dan maju. Guru profesional selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya, kemudian guru profesional rajin membaca literatur-literatur dengan tidak merasa rugi membeli buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan yang digelutinya.

1) Asas Tut Wuri Handayani

Tut Wuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru pendidik membantunya . Gagasan tersebut dikembangkan Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan.

Asas Tut Wuri Handayani memberi kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri, dan ada kemungkinan mengalami berbuat kesalahan, tanpa ada tindakan (hukuman) pendidik. Hal itu tidak menjadikan masalah, karena menurut Ki Hajar Dewantara, setiap kesalahan yang dilakukan anak didik akan membawa pidananya sendiri, kalau tidak ada pendidik sebagai pemimpin yang mendorong datangnya hukuman tersebut. Dengan demikian, setiap kesalahan yang dialami anak tersebut bersifat mendidik.

Tut Wuri Handayani di atas, diistilahkan dengan sistem pamong atau guru di sini lebih cenderung menjadi navigator peserta didik yang “diberi kesempatan untuk berjalan sendiri, dan tidak terus menerus dicampuri, diperintah atau dipaksa” (Tirtarahardja, Umar dan La Sulo, 2005: 120).

Pendidikan mengandung makna: momong, among, ngemong. Among mengandung arti mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup batin menjadi subur dan selamat. Momong mempunyai arti mengamati-anak agar dapat tumbuh menurut kodratnya. Ngemong berarti kita harus mengikuti apa yang ingin diusahakan anak sendiri dan memberi bantuan pada saat anak membutuhkan dan pendidikan menciptakan tertib dan damai.

Asas Tut Wuri Handayani mempunyai prinsip pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam menyampaikan ide-idenya ketika dalam proses pembelajaran.

Pendidik hanya mendorong dan mempengaruhi peserta didik dari belakang, jika peserta didik mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan idenya, barulah pendidik turut membantunya.

2) Asas *Ing Ngarso Sungtolodo*

Ing ngarso mempunyai arti di depan / di muka, *Sun* berasal dari kata *Ingsun* yang artinya saya, *Tulodo* berarti tauladan. Jadi makna *Ing Ngarso Sun Tulodo* adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga yang harus dipegang teguh oleh seseorang adalah kata suritauladan. Artinya bahwa yang disebut sebagai seorang pendidik atau guru adalah seorang pemimpin yang harus mampu memberikan suri tauladan bagi anak didiknya. Sebagai seorang pemimpin atau pendidik harus memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam segala langkah dan tindakannya agar dapat menjadi panutan bagi anak didiknya, dengan berbagai contoh teladan, baik di dalam maupun di luar sekolah (Tirtarahardja, Umar dan La Sulo, 2005: 123).

Asas ini lebih menekankan bahwa setiap manusia itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan sistematis untuk mendapatkan pengajaran, studi dan belajar kapan pun sepanjang hidupnya (*long life education*). Lingkungan juga turut mempengaruhi dalam belajar sepanjang hayat dari mulai lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

3) Asas *Ing Madyo Mangunkarso* (Asas Kemandirian Dalam Belajar)

Ing Madyo artinya di tengah-tengah, *mangun* berarti membangun atau membangkitkan atau menggugah dan *karso* diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari kata

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

itu adalah seorang pendidik ditengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat belajar anak didiknya. Guru harus bisa dan mampu memberikan inovasi-inovasi sekaligus motivasi kepada anak didiknya. Sebagai fasilitator, guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Sedangkan sebagai motivator, guru mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar itu.

Asas ini lebih menekankan bahwa siswa dituntut untuk aktif sendiri dalam kegiatan belajar tanpa ada bimbingan lagi dari seorang guru. Dalam asas ini peran guru hanya sebagai fasilitator. Akan tetapi, guru selalu siap untuk ulur tangan apabila diperlukan.

Ketiga asas ini saling berhubungan hendaknya menjadi acuan untuk menerapkan sistem pendidikan yang tepat bagi bangsa ini dan terus menjunjung tinggi kebudayaan nasional daripada kebudayaan asing. Semangat untuk terus melestarikan Tut Wuri Handayani dalam dunia pendidikan dirasa begitu penting, mengingat makna dari semboyan Ki Hadjar tersebut yaitu membuat orang menjadi pribadi yang mandiri.

Selanjutnya pengamalan tiga asas di atas, secara profesional dalam profesinya sebagai seorang guru, pada dasarnya guru juga terikat pada kode etikanya. Berikut ini kode etik seorang guru, adalah sebagai berikut:

- a) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.

Sosiologi Pendidikan

- b) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c) Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar-mengajar.
- e) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
- h) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian
- i) Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan (Uus Ruswandi dan Badrudin, 2010: 25).

C. Interaksi Edukatif

Unsur komponen dalam sosiologi pendidikan yang ketiga setelah peserta didik (siswa) dan pendidik (guru) selanjutnya hubungan antara keduanya yang biasa disebut dengan interaksi. Interaksi antara guru dan siswa bermakna interaksi edukatif.

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

Menurut Shuyadi dan Abu Achmadi (Syaiful Bahri Djamarah, 2000:11) pengertian interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan.

Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Artinya lebih spesifik pada bidang pengajaran dikenal dengan istilah interaksi belajar mengajar. Didalam interaksi belajar mengajar mengandung suatu arti adanya kegiatan interaksi dari pengajar yang melaksanakan tugas mengajar di suatu pihak dengan warga belajar (siswa, anak didik, subjek belajar) yang sedang melaksanakan kegiatan belajar dipihak lain. Menurut Ahmad Rohani (2004: 93) proses interaksi ini dapat terjadi dalam "ikatan suatu system" dari berbagai ragam proses interaksi itu terdapat jenis situasi khusus yaitu situasi pengajaran atau situasi instruksional. Interaksi yang terjadi dalam situasi pengajaran disebut interaksi pengajaran/interaksi intruksional, yaitu suatu proses yang diupayakan berdasarkan ikatan tujuan pengajaran (tujuan yang telah ditentukan/dan telah disistematikan secara terarah).

Interaksi belajar mengajar pada dasarnya fenomena terjadinya pengaruh-mempengaruhi antara guru yang mempengaruhi siswa, siswa yang mempengaruhi guru. Kegiatan mengajar selalu menuntut kehadiran siswa, tanpa siswa dalam kelas maka guru tidak bisa mengajar. Lain halnya dengan kegiatan belajar, siswa dapat belajar meskipun tanpa kehadiran guru (Ibrahim dan Nana Syaodih, 2003: 31-32).

Interaksi guru dengan siswa bukan hanya dalam penguasaan bahan ajaran, tetapi juga dalam penerimaan nilai-

nilai, pengembangan sikap serta dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Dengan demikian peran guru juga bukan hanya sebagai pengajar dan pelatih, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing (Ibrahim dan Nana Syaodih, 2003: 34).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi edukatif adalah hubungan aktif dua arah antara guru dengan siswa, siswa dengan guru dalam suatu ikatan kegiatan belajar mengajar dalam suatu tujuan pendidikan maupun tujuan pengajaran/instruksional.

Ikatan dua arah antara siswa dan guru di atas, tidak lain dilatarbelakangi dari beberapa faktor yang menjadi dasar terjadinya interaksi edukatif. Berikut ini faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi edukatif (Ahmad Rohani, 2004: 107-110) adalah sebagai berikut.

Pertama, Faktor Tujuan.

Tujuan pendidikan/pengajaran yang bersifat umum maupun khusus, umumnya berkisar pada tiga jenis :

1. Tujuan kognitif yaitu tujuan yang berhubungan dengan pengertian dan pengetahuan.
2. Tujuan efektif yaitu tujuan yang berhubungan dengan usaha merubah minat, setiap nilai, dan alasan
3. Tujuan psikomotorik yaitu tujuan yang berkaitan dengan keterampilan menggunakan telinga, tangan, mata, alat indra, dan sebagainya.

Kedua, Faktor Bahan Atau Materi Pengajaran.

Penguasaan bahan oleh guru seyogyanya mengarah pada spesifik berdasarkan ilmu kecakapan yang diajarkannya. Penyusunan unsur-unsur atau informasi-informasi yang baik untuk mempermudah peserta didik mempelajarinya, juga

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

memberikan gambaran yang jelas sebagai petunjuk dalam menetapkan metode pengajaran. Pilihan itu biasanya berdasarkan pada pedoman-pedoman tertentu agar keseluruhan bahan yang telah di tentukan itu teratur dan mencerminkan suatu hal yang integral bagi hidup peserta didik selama di sekolah sekarang, dan sesudahnya. Yang menentukan pedoman tersebut ialah pihak Depdikbud. Isi pedoman yang di maksud adalah di sekitar kesesuaian bahan pengajaran dengan tujuan institusional, tujuan kurikulum, tujuan pengajaran, serta tujuan pendidikan pada umumnya dan haluan negara.

Ketiga, Faktor Guru Dan Peserta Didik.

Guru dan peserta didik adalah dua subjek dalam berinteraksi pengajaran. Guru sebagai pihak yang berinisiatif awal untuk penyelenggaraan pengajaran, sedangkan peserta didik sebagai pihak yang secara langsung mengalami dan mendapatkan manfaat dari peristiwa belajar mengajar yang terjadi. Untuk menjadikan profesionalitas kerja guru setidaknya memiliki 4 bidang utama, antara lain:

1. Guru harus mengenal setiap peserta didik yang dipercayakan kepadanya
2. Guru harus memiliki kecakapan memberi bimbingan, sebab mengajar hakekatnya membimbing.
3. Guru harus memiliki dasar pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan/pengajaran.
4. Guru harus memiliki pengetahuan bulat dan baru mengenai ilmu yang di ajarkan.

Keempat, Faktor Metode.

Metode mengajar/pengajaran, selain ditentukan/ dipengaruhi oleh tujuan juga oleh faktor kesesuaian dengan

bahan, kemampuan guru untuk menggunakannya, keadaan peserta didik, dan situasi yang melingkupinya. Dengan kata lain, penerapan suatu metode pengajaran harus memiliki:

1. Relevansi dengan tujuan.
2. Relevansi dengan bahan.
3. Relevansi dengan kemampuan guru.
4. Relevansi dengan keadaan peserta didik.
5. Relevansi dengan situasi pengajaran.

Secara umum metode-metode pengajaran dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Metode pengajaran individual.
- b. Metode pengajaran kelompok/klasik.

Kelima, Faktor Situasi.

Situasi yang dimaksud adalah situasi dimana guru dapat menyediakan alternatif metode-metode mengajar dengan situasi kondusif yang saling tercipta interaksi pengajaran.

Kelima faktor interaksi edukatif tersebut membawa kita pada bagaimana bagian-bagian atau komponen terjadinya suatu kegiatan dan ikatan timbal balik antara guru dengan siswa, siswa dengan guru. Komponen yang menjadi bagian interaksi edukatif (Syaiful Bahri Djamarah, 1996:183-184) antara lain:

1) Tujuan

Tujuan merupakan hal yang pertama kali harus dirumuskan dalam kegiatan interaksi edukatif. Sebab, tujuan dapat memberikan arah yang jelas dan pasti kemana kegiatan pembelajaran dibawa oleh guru. Dengan berpedoman pada tujuan guru dapat menyeleksi tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang harus ditinggalkan.

2) Bahan Pelajaran

Bahan pelajaran adalah unsur inti dalam kegiatan interaksi edukatif, sebab tanpa bahan pelajaran proses interaksi edukatif tidak akan berjalan, dalam pemilihan pelajaran harus disesuaikan dengan kondisi tingkatan murid yang akan menerima pelajaran. Selain itu bahan pelajaran mutlak harus dikuasai guru dengan baik.

3) Metode

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karakteristik metode yang memiliki kelebihan dan kelemahan maka guru menggunakan metode yang bervariasi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih metode mengajar sebagai berikut:

- a) Tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya.
- b) Anak didik dengan berbagai tingkat kematangannya.
- c) Situasi dengan berbagai keadaannya.
- d) Fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya.
- e) Pribadi guru dan kemampuan profesinya yang berbeda-beda.

4) Alat

Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Alat nonmaterial dan alat material biasanya dipergunakan dalam kekuatan interaksi edukatif. Alat non material berupa suruhan, perintah, larangan, dan nasehat. Alat material berupa globe, papan tulis, batu kapur, gambar, diagram, lukisan dan video.

5) Sumber

Sumber belajar dapat diperoleh di sekolah, di halaman, dipusat kota, di pedesaan dan sebagainya. Pemanfaatan sumber pengajaran tergantung pada kreativitas guru, waktu, biaya dan kebijakan-kebijakan lainnya.

6) Evaluasi

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai seperangkat instrument penggali data seperti tes perbuatan, tes tertulis dan tes lisan.

Dalam rangka menjangkau dan memenuhi sebagian besar kebutuhan anak didik, dikembangkan beberapa prinsip dalam interaksi edukatif, dengan harapan mampu menjembatani dan memecahkan masalah yang sedang guru hadapi dalam kegiatan interaksi edukatif. Prinsip tersebut harus dikuasai oleh guru agar dapat tercapai tujuan pengajaran. Prinsip - prinsip interaksi edukatif (Syarif Bahri Djamarah, 2000: 93-96) yaitu:

Pertama, Prinsip Motivasi yaitu bertujuan setiap anak dapat memiliki motivasi dalam belajar. Apabila anak didik telah memiliki motivasi dalam dirinya disebut motivasi intrinsik, sangat memudahkan guru memberikan pelajaran, namun apabila anak tersebut tidak memilikinya, guru akan memberikan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang bersumber dari luar diri anak didik tersebut dan dapat berbentuk ganjaran, pujian, hadiah dan sebagainya.

Kedua, Prinsip Berangkat dari Persepsi yang Dimiliki. Artinya bila ingin bahan pelajaran mudah dikuasai oleh sebagian

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

atau seluruh anak, guru harus memperhatikan bahan apersepsi yang dibawa anak didik dari lingkungan kehidupan mereka. Penjelasan yang diberikan mengaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan anak didik akan memudahkan mereka menanggapi dan memahami pengalaman yang baru dan bahkan membuat anak didik memusatkan perhatiannya.

Ketiga, Prinsip Mengarah kepada Titik Pusat Perhatian Tertentu atau Fokus Tertentu. Artinya pelajaran yang direncanakan dalam suatu pola tertentu akan mampu mengaitkan bagian-bagian yang terpisah dalam suatu pelajaran. Tanpa suatu pola, pelajaran dapat terpecah-pecah dan para anak didik akan sulit memusatkan perhatian.

Keempat, Prinsip Keterpaduan yaitu keterpaduan dalam pembahasan dan peninjauan akan membantu anak didik dalam memadukan perolehan belajar dalam kegiatan interaksi edukatif.

Kelima, Prinsip Pemecahan Masalah yang dihadapi yaitu berkaitan dengan salah satu indikator kepandaian anak didik banyak ditemukan oleh kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pemecahan masalah dapat mendorong anak didik untuk lebih tegar dalam menghadapi berbagai masalah belajar dan anak didik akan cepat tanggap dan kreatif.

Keenam, Prinsip Mencari, Menemukan dan Mengembangkan Sendiri. Artinya guru yang bijaksana akan memberi kesempatan kepada anak didik untuk mencari dan menemukan sendiri informasi. Kepercayaan anak didik untuk selalu mencari dan menemukan sendiri informasi adalah pintu gerbang kearah CBSA yang merupakan konsep belajar mandiri yang bertujuan melahirkan anak didik yang aktif dan kreatif.

Ketujuh, Prinsip Belajar Sambil Bekerja. Artinya belajar sambil melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil untuk anak didik sebab kesan yang didapatkan anak didik lebih tahan lama tersimpan di dalam hati anak didik.

Kedelapan, Prinsip Hubungan Sosial. Hal ini bertujuan untuk mendidik anak didik terbiasa bekerja sama dalam kebaikan. Kerjasama memberikan kesan bahwa kondisi sosialisasi juga diciptakan di kelas yang akan mengakrabkan hubungan anak didik dengan anak didik lainnya dalam belajar.

Kesembilan, Prinsip Perbedaan Individual. Artinya sudut pandang untuk melihat aspek perbedaan anak didik adalah segi biologis, intelektual dan psikologis. Semua perbedaan ini memudahkan guru melakukan pendekatan edukatif kepada setiap anak didik. Banyak kegagalan guru menuntaskan penguasaan anak didik terhadap bahan pelajaran salah satunya disebabkan karena guru gagal memahami sifat anak didik secara individual.

Perbedaan dari kesembilan prinsip interaksi edukatif di atas, guru sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran dan pengajaran, pada dasarnya melalui tahapan-tahapan tertentu dari pra dan akhir pembelajaran interaksi edukatif. Berikut ini tahapan interaksi edukatif menurut R.D. Conners (Syaiful Bahri Djamarah, 2000: 112-113) antara lain:

a) Tahap Sebelum Pengajaran

Dalam tahap ini guru harus menyusun program tahunan pelaksanaan kurikulum, program semester atau catur wulan (*cawu*), program satuan pelajaran (*satpel*), dan perencanaan program pengajaran. Dalam merencanakan program-program tersebut di atas perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan :

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

- (1) Bekal bawaan anak didik.
- (2) Perumusan tujuan pembelajaran.
- (3) Pemilihan metode.
- (4) Pemilihan pengalaman-pengalaman belajar.
- (5) Pemilihan bahan dan peralatan belajar.
- (6) Mempertimbangkan jumlah dan karakteristik anak didik.
- (7) Mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia.
- (8) Mempertimbangkan pola pengelompokan.
- (9) Mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar.

b) Tahap Pengajaran.

Dalam tahap ini berlangsung interaksi antara guru dengan anak didik, anak didik dengan anak didik, anak didik dalam kelompok atau anak didik secara individual. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan apa yang telah direncanakan. Ada beberapa aspek yang perlu di pertimbangkan dalam tahap pengajaran ini, yaitu :

- (1) Pengelolaan dan pengendalian kelas.
- (2) Penyampaian informasi.
- (3) Penggunaan tingkah laku verbal non verbal.
- (4) Merangsang tanggapan balik dari anak didik.
- (5) Mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar.
- (6) Mendiagnosis kesulitan belajar.
- (7) Memperibandingkan perbedaan individual.
- (8) Mengevaluasi kegiatan interaksi.

c) Tahap Sesudah Pengajaran

Tahap ini merupakan kegiatan atau perbuatan setelah pertemuan tatap muka dengan anak didik. Beberapa perbuatan guru yang tampak pada tahap sesudah mengajar, antara lain :

- (1) Menilai pekerjaan anak didik.
- (2) Menilai pengajaran guru.
- (3) Membuat perencanaan untuk pertemuan berikutnya.

Tahapan interaksi edukatif tersebut mengindikasikan bahwa guru dan murid terjadi suatu kesinambungan dan berkelanjutan dalam proses belajar mengajar. Gambaran dari tahapan interaksi edukatif di atas mewujudkan suatu bentuk atau pola tertentu dalam berinteraksi edukatif. Menurut Ravik Karsidi (2007: 68-69): *Pertama*, komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satuarah menempatkan guru sebagai pemberi aksi dan anak didik sebagai penerima aksi. Guru aktif, dan anak didik pasif. Mengajar dipandang sebagai kegiatan menyampaikan bahan pelajaran. *Kedua*, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, guru berperan sebagai pemberi aksi atau penerima aksi. Demikian pula halnya anak didik, bisa sebagai penerima aksi, bisa pula sebagai pemberi aksi. Antara guru dan anak didik akan terjadi dialog. *Ketiga*, komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah, komunikasi tidak hanya terjadi antara guru dan anak didik. Anak didik dituntut lebih aktif dari pada guru, seperti halnya guru, dapat berfungsi sebagai sumber belajar bagi anak didik lain.

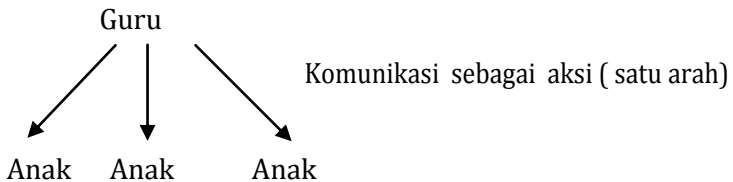
Sementara itu dalam pandangan Nana Sudjana (1989: 77) ,ada tiga pola komunikasi antara guru dan anak didik dalam proses interaksi edukatif yaitu :

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

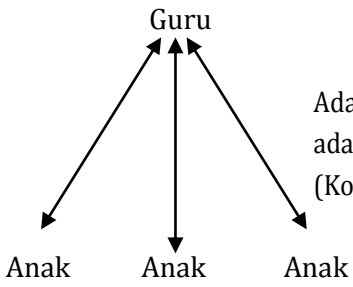
- 1) Komunikasi sebagai aksi
 - a) Komunikasi satu arah.
 - b) Menempatkan guru sebagai pemberi aksi.
 - c) Anak didik sebagai penerima aksi.
 - d) Guru aktif dan anak didik pasif.
- 2) Komunikasi sebagai interaksi
 - a) Komunikasi dua arah
 - b) Guru berperan sebagai pemberi aksi atau penerima aksi
 - c) Anak didik bisa sebagai penerima aksi dan pemberi aksi
 - d) Antara guru dan anak didik terjadi dialog
- 3) Komunikasi sebagai transaksi
 - a) Komunikasi banyak arah
 - b) Anak dituntut lebih aktif daripada guru
 - c) Guru berfungsi sebagai sumber belajar

Hubungan guru dan siswa (murid) yang saling berkomunikasi sebagai aksi, interaksi, dan transaksi di atas dalam pendapat Uzer Usman (1990: 78-79) mengkategorikan interaksi edukatif dalam beberapa bentuk atau pola-pola. Berikut ini pola interaksi edukatif antara guru dan anak didik (siswa):

Pertama, Pola Guru - Anak Didik.

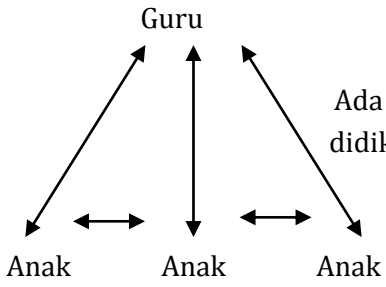


Kedua, Pola Guru - Anak Didik - Guru.



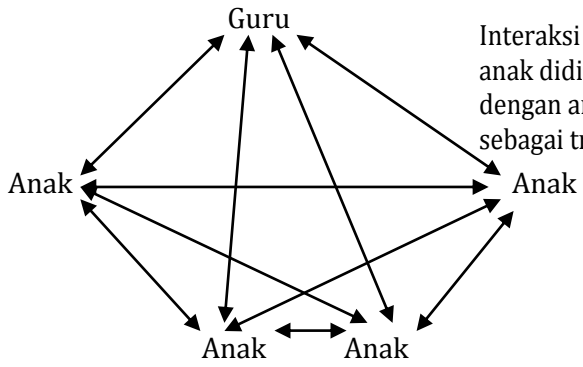
Ada feedback bagi guru, namun, tidak ada interaksi antar siswa (Komunikasi sebagai interaksi).

Ketiga, Pola Guru - Anak Didik - Anak Didik.



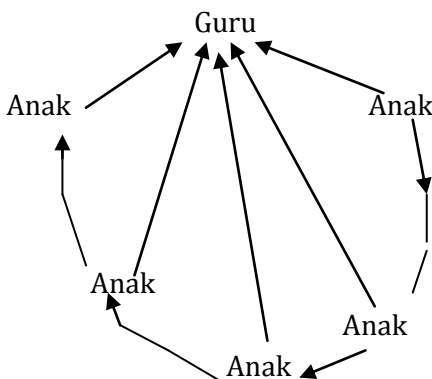
Ada feedback bagi guru dan anak didik saling belajar satu sama lain

Keempat, Pola Guru - Anak Didik - Anak Didik - Guru Anak Didik - Anak Didik.



Interaksi optimal antara guru dan anak didik dan antara anak didik dengan anak didik. (Komunikasi sebagai transaksi/muti arah)

Kelima, Pola Melingkar.



Setiap anak didik mendapat giliran untuk mengemukakan Sambutan atau jawaban Tidak diperkenankan berbicara dua kali apabila setiap anak didik belum mendapat giliran.

D. Tujuan Pendidikan

Menurut Pribadi (1987), pendidikan memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Tujuan umum pendidikan adalah manusia Pancasila.
2. Tujuan khusus pendidikan yaitu pengkhususan dari pada tujuan umum tersebut, yaitu tujuan yang dirumuskan berhubungan dengan situasi dan pandangan hidup suatu masyarakat tertentu, misalnya tujuan pendidikan atas dasar filsafat hidup Pancasila.
3. Tujuan insidental, yaitu tujuan yang tidak selalu jelas hubungannya dengan tujuan umum yang ingin dicapai, misalnya mengajak anak-anak makan bersama.
4. Tujuan sementara, yaitu tujuan yang bertalian dengan perkembangan anak, dimulai dari masa bayi sampai anak itu menjadi dewasa, misalnya anak waktu bayi diurus dan diasuh dengan segala kemesraan dan kecermatan oleh ibunya demi tercapainya tujuan akhir pendidikan, secara tahap demi tahap.

5. Tujuan tidak lengkap, artinya tujuan yang meliputi berbagai aspek dari seluruh kepribadian seutuhnya, seperti tujuan pendidikan jasmani, tujuan pendidikan intelektual, tujuan pendidikan watak, pendidikan kemauan, pendidikan religius, dan sebagainya.
6. Tujuan intermidier, artinya tujuan yang terpotong-potong, yang lebih menitikberatkan pelaksanaan teknisnya, tanpa dihubungkan dengan tujuan umum pendidikan, sehingga melibatkan berbagai pemikiran filsafat. Misalnya tujuan suatu unit pokok bahasan di dalam kelas mengenai satu mata pelajaran.

Sementara itu tercantum dalam UU RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab II Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: (1) tujuan umum pendidikan bahwa "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (2) Tujuan Institusional, yaitu tujuan yang ingin dicapai suatu lembaga tertentu. Tujuan ini harus sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pendidikan menengah, lembaga pendidikan dasar, baik yang kejuruan ataupun umum. (3) Tujuan Kurikuler yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini adalah pengembangan dari tujuan institusional. Setiap lembaga tertentu di bebani oleh suatu tanggung jawab tercapainya tujuan institusional yang bersangkutan. Hal ini dapat dicapai dengan

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

melalui tujuan kurikuler. (4) Tujuan Instruksional yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap tujuan pokok bahasan atau subpokok bahasan yang merupakan bagian dari bidang studi. Tujuan ini merupakan penjabaran dari tujuan kulikuler.

Sedangkan Menurut Bloom (Suwarno, 2006: 35-36) tujuan pendidikan dibagi menjadi tiga yaitu: *pertama*, Domain Kognitif meliputi kemampuan-kemampuan yang diharapkan dapat tercapai setelah dilakukannya proses belajar mengajar. *Kedua*, Domain Afektif yaitu berupa kemampuan untuk menerima, menjawab, membentuk dan mengarakterisasi. *Ketiga*, Domain Psikomotor terdiri dari kemampuan persepsi, kesiapan dan respon terpimpin.

E. Materi Pendidikan.

Pendidikan persekolahan khususnya untuk materi telah diramu dalam kurikulum yang disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi pendidikan (*instructional materials*) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran mempunyai pengaruh dan posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator (Zahara, 1995).

Berkaitan dengan materi pendidikan yang menunjang standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut, pada dasarnya materi pendidikan juga dikategorikan dalam beberapa aspek, antara lain:

Pertama, Fakta.

Fakta adalah segala hal yang bewujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Contoh: Dalam mata pelajaran Sejarah: Peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan Pemerintahan Panduan Pengembangan Materi Pembelajaran Indonesia.

Kedua, Konsep.

Konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti/isi dan sebagainya. Contoh: penyimpangan sosial adalah suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat (Horton & Hunt 1987: 191).

Ketiga, Prinsip.

Prinsip adalah berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antarkonsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contoh: perilaku menyimpang timbul karena tidak adanya nilai atau norma yang dapat ditaati secara teguh, diterima secara luas, dan mampu mengikat serta mengendalikan masyarakat.

Keempat, Prosedur.

Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contoh: praktik penelitian sosial, dan sebagainya.

Kelima, Sikap atau Nilai.

Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, dan bekerja. Contoh: aplikasi sosiologi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sikap toleransi dalam menghadapi fenomena sosial yang bervariasi.

Pembuatan materi pendidikan juga perlu memperhatikan cakupan-cakupan materinya. Berikut ini 3 cakupan materi pendidikan, meliputi:

1. Aspek kognitif (fakta, konsep, prinsip, prosedur) aspek afektif, ataukah aspek psikomotor, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya.
2. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Kedalaman materi menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik.
3. Kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan.

Memadainya cakupan aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Misalnya, jika dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik di bidang jual beli (Zahara,1995: 47-48).

F. Alat dan Metode Pendidikan.

Zakiah Darajat (2006: 35) menyebutkan pengertian alat pendidikan sama dengan media pendidikan sebagai sarana pendidikan. Istilah alat berarti barang yang dipakai untuk mencapai suatu maksud ataupun tujuan. Adapun menurut Bernadib mengemukakan bahwa alat pendidikan ialah tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan, untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat adalah barang sesuatu yang dipakai untuk mencapai sesuatu maksud.

Alat pendidikan mencakup pengertian yang luas, termasuk kedalamnya, yaitu:

1. Alat yang berupa materi (benda), seperti alat peraga, dan perlengkapan belajar lainnya.
2. Alat yang berupa non materi (bukan benda), seperti situasi, pergaulan, perbuatan, nasehat, bimbingan, perintah, pujian, teguran, dan sebagainya.

Menurut Nur Uhbiyati (1997: 28) terdapat berbagai macam metode yang digunakan dalam pengajaran diantaranya:

- a. Metode *Mutual Education*.
- b. Metode Pendidikan dengan menggunakan cara Instruksional.
- c. Metode Pendidikan dengan Bercerita.

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

- d. Metode Bimbingan dan Penyuluhan.
- e. Metode Pemberian Contoh dan Teladan.
- f. Metode Diskusi.
- g. Metode Soal Jawab.
- h. *Methodinstal* (Pemberian Perumpamaan).
- i. Metode *Targieb* dan *Tarhieb*.
- j. Metode Taubat dan Ampunan.
- k. Metode *Acquisition (Self Education)*, *Explanation* dan *Exposition* (Penyajian).

Selain pemilihan beberapa metode pendidikan di atas, berikut ini 3 jenis metode menurut Langeveld (1971: 147-153):

(1) Metode Yang Umum.

Metode ini sudah dikenal dan dikuasai oleh semua pendidik melalui pengalaman dan sudah digunakan tanpa ada pendidikan atau diklat khusus. Metode ini mencakup latihan dan meniru, yaitu, melatih anak didik menguasai tujuan tertentu dengan disertai peniruan. Dalam metode ini pendidik sudah menguasai materi yang akan disampaikan pada peserta didik dan sudah dipraktikkan sendiri. Metode ini digunakan dalam pendidikan di keluarga, lingkungan tetangga, dan juga disekolah dalam rangka pembentukan kebiasaan, pola tingkah laku, keterampilan, sikap, dan keyakinan.

(2) Metode Yang Secara Khusus Dipelajari Oleh Pendidik.

Pendidik harus mempunyai kematangan dalam metode-metode. Dia harus menguasai ilmu pengajaran (didaktik) untuk menguasai metode-metode mengajar seperti ceramah, diskusi, bermain peran dan sebagainya. Seorang pendidik tidak serta-merta bisa mentransformasikan materi pendidikan dengan baik

tanpa menguasai metode-metode khusus, dan dia tidak akan bisa menguasai metode tersebut tanpa adanya spesialisasi sebuah disiplin ilmu, seperti wawancara, studi kasus, dan observasi yang harus dipelajari oleh calon knselor sebagai bimbingan dan konseling.

(3) Metode Yang Khusus Digunakan Untuk Menilai Pelaksanaan Program Pendidikan.

Metode ini disebut dengan metode penelitian pendidikan, jadi metode ini digunakan dalam rangka pengembangan dan kemajuan pendidikan, antara lain dari metode ini adalah survai, eksperimen yang menggunakan alat ukur seperti tes, wawancara, observasi, dan kuesioner.

Penggunaan metode pendidikan yang tepat dalam pengajaran, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode pendidikan yaitu: *pertama*, kemampuan psikologis dalam menerima dan menghayati serta mengamalkan ajaran agama sesuai dengan usia, bakat dan lingkungan hidupnya. *Kedua*, kemampuan pendidikan sendiri yang harus siap, baik dalam ilmu pengetahuan yang akan diajarkan maupun sikap mental serta keguruannya dalam waktu melaksanakan tugas pendidikan benar-benar mantap dan meyakinkan. *Ketiga*, tujuan pendidikan harus dijadikan pegangan sebagai pengarah dalam menggunakan metode karena metoda apapun hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan (Aat Syafaat dan Sahori Sahrani, 2008: 15).

G. Lingkungan Pendidikan.

Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup,

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mehluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial (Hasbullah, 2009: 24).

Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak dalam alam semesta ini yang menjadi wadah atau wahana, badan atau lembaga berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan ialah sesuatu yang berada di luar diri anak dan mempengaruhi perkembangannya (Uhbiyati, 2005: 209).

Setiap manusia pasti memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena adanya interaksi manusia dengan lingkungannya. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak yang memberikan pengaruh terhadap perkembangannya. Dengan kata lain lingkungan pendidikan merupakan latar tempat berlangsungnya pendidikan (Indrakusuma, 1978).

Lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik (Mohammad Arif, 2011: 95). Lingkungan pendidikan ialah latar tempat berlangsungnya pendidikan khususnya pada tiga lingkungan utama pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan Secara umum fungsi lingkungan pendidikan ialah membantu peserta didik dalam interaksi dalam berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagi sumber daya pendidikan yang terjadinya akar dapat mencapai tujuan pendidik yang optimal.

Secara umum fungsi lingkungan pendidikan menurut Tirtarahardja, Umar dan La Sulo (2000: 98) bertujuan untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya (fisik/sosial/budaya) dan mengajarkan tingkah laku umum serta menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu.

Maka dari itu, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya (fisik, sosial, dan budaya), dan utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Selain itu, penataan lingkungan pendidikan tersebut terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif.

Menurut Ki Hajar Dewantara lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolahan, lingkungan masyarakat, yang disebut tripusat pendidikan atau lingkungan pendidikan.

Pertama, Lingkungan Keluarga.

Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan searah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti (ayah, ibu, dan anak). Menurut Ki Hajar Dewantoro, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial.

Fungsi pendidikan pada lingkungan keluarga, antara lain:

- 1) Sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak.
- 2) Menjamin kehidupan emosional anak.
- 3) Menanamkan dasar pendidikan moral.
- 4) Memberikan dasar pendidikan sosial.

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

5) Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak.

Dasar utama orang tua dalam keluarga adalah bertanggung jawab pada pendidikan anak. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan penuh ketergantungan dengan orang lain, tidak mampu berbuat apa-apa bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Ia lahir dalam keadaan suci (*a sheet of white paper avoid of all characters*) atau yang lebih dikenal dengan istilah Tabularasa (Hasbullah, 2009: 40).

Dasar tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan anaknya yang pertama meliputi motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orangtua dengan anak. Cinta kasih ini akan mendorong sikap dan tindakan untuk menerima tanggung jawab dan mengabdikan hidupnya untuk sang anak. Yang kedua yaitu motivasi kewajiban moral orangtua terhadap anak. Tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai religius spiritual untuk memelihara martabat dan kehormatan keluarga. Serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga yang pada gilirannya juga akan menjadi bagian dari masyarakat.

Tanggungjawab moral salah satunya dengan adanya peranan seorang ibu dalam keluarga dalam membimbing anaknya. Hal ini sangat berpengaruh dalam kepribadian seorang anak. Bahkan sejak seorang ibu mengandung, telah terjadi hubungan antara anak dengan ibunya. Proses pertumbuhan anak dalam kandungan sedari dini, telah di tentukan oleh pelayanan dari ibu yang sedang mengandung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan (intelegensi) anak masih dapat di pengaruhi oleh bermutu atau tidaknya makanan ibu pada waktu mengandung, bahkan sampai usia tiga tahun. Dengan

demikian jelaslah bahwa lingkungan keluarga adalah merupakan lingkungan yang pertama dalam membentuk pribadi anak didik, dalam lingkungan ini anak mulai di bina dan di latih fisik, mental, sosial dan bahasa serta ketrampilanya. Semua pendidikan yang di terima oleh anak dari keluarganya merupakan pendidikan informal, tidak terbatas dan melalui tauladan dalam pergaulan keluarga (Muri Yusuf: 26-27).

Oleh sebab itu, lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia. Lingkungan sekolah sebagai bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan sekolah sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri.

Kedua, Lingkungan Sekolah.

Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Dasar tanggung jawab sekolah akan pendidikan meliputi tanggung jawab formal kelembagaan (sesuai ketentuan dan perundangan pendidikan yang berlaku), tanggung jawab keilmuan (isi, tujuan dan jenjang pendidikan yang dipercayakan padanya oleh masyarakat dan pemerintah) serta tanggung jawab fungsional.

Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, lingkungan sekolah memiliki tanggungjawab dalam: (1) Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. (2) Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. (3) Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar serta ilmu-ilmu lain sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. (4) Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya (Tirtarahardja, Umar dan La Sulo, 2000: 99).

Sekolah sebagai lingkungan pendidikan bukan mengambil peranan dan fungsi orang tua dalam mendidik anaknya dalam lingkungan keluarga tetapi sekolah bersama-sama dengan orang tua membantu mendidik anak-anaknya. Di rumah ia mendapatkan pendidikan sesuai dengan batas kemampuan lingkungan keluarga. Hal itu di sebabkan karena kemampuan yang terbatas dan banyaknya tugas dan tanggung jawab lain yang harus dilaksanakan. Apabila kita hubungkan dengan pendidikan dalam lingkungan keluarga, maka bahwa pendidikan di sekolah itu bukan mengambil tanggung jawab orang tua, tetapi melengkapi dan menyempurnakan pendidikan anak-anak dengan pembangunan bangsa dan negara. Di dalam keluarga mereka di bina di sekolah mereka di kembangkan dan di tingkatkan agar lebih mampu melanjutkan kehidupan bangsa (A. Muri Yusuf).

Ketiga, Lingkungan Masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, telah dimulai beberapa waktu ketika anak-anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Lingkungan sekolah disebut juga lingkungan kedua yang didirikan oleh masyarakat

atau negara untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang sudah tidak mampu lagi memberi bekal persiapan hidup bagi anaknya. Sehingga pendidikan di sekolah berperan sebagai bagian dan lanjutan dari pendidikan keluarga, serta merupakan jembatan yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak (Indrakusuma, 1978).

Pada dasarnya masyarakat disebut lingkungan pendidikan non formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya tetapi tidak sistematis dan mengutamakan pengembangan afeksi dan psikomotorik yang sudah tentu juga mengembangkan kognisi sebagai unsur penunjang (Made Pidarta, 1997: 19). Secara fungsional masyarakat menerima semua anggotanya yang pluralistik (majemuk) itu dan mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik untuk tercapainya kesejahteraan sosial para anggotanya.

Masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan perkembangan ilmu pengetahuan akan mewarnai keadaan masyarakat tersebut. Dengan pendidikan di lingkungan masyarakat ini mereka diajarkan konsep-konsep dan sikap tingkah laku dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Kunaryo Hadikusumo).

Lingkungan masyarakat dalam pergaulan hidup manusia senantiasa memiliki dampak atau pengaruh positif dan negatif. Pengaruh yang positif dari masyarakat banyak kita jumpai dalam perkumpulan-perkumpulan pemuda, organisasi-organisasi pelajar atau mahasiswa maupun organisasi yang lain. Baik perkumpulan atau organisasi itu bergerak dalam bidang kesenian, kebudayaan,

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

olahraga, politik, maupun yang merupakan organisasi biasa yang bersifat menghimpun dan menyatukan para anggota, seperti halnya organisasi-organisasi pelajar atau mahasiswa dari sesuatu jenis sekolah atau fakultas. Tetapi perlu ditekankan di sini bahwa organisasi atau perkumpulan pemuda yang memberikan pengaruh positif ini ialah organisasi atau perkumpulan pemuda yang diorganisasi secara baik dan "legal".

Sedang yang di maksud dengan pengaruh yang bersifat negatif ialah segala macam pengaruh yang menuju kepada hal-hal yang tidak baik dan merugikan. Baik, merugikan bagi pendidikan dan perkembangan anak maupun merugikan kepada kehidupan bersama. Pengaruh yang bersifat negatif ini tidak terhitung banyaknya di dalam masyarakat. Dan anehnya, pengaruh yang negatif ini sangat mudah di terima oleh anak, dan sangat kuat meresap di hati anak. Anak yang tadinya baik di rumah, setelah mendapat pengaruh dari temannya, akhirnya bisa menjadi anak brandalan. Oleh karena itu menjadi tugas bagi orang tua untuk selalu mengadakan pengawasan terhadap putra-putrinya. Orang tua harus tahu dan selalu mengawasi dengan siapa anaknya itu bergaul. Bukan maksudnya di sini untuk membeda-bedakan kawan, tetapi justru untuk menjaga agar si anak tidak terlanjur memperoleh pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan.

Contoh: setiap kali anak minta izin untuk belajar di rumah kawannya. Berangkat, membawa buku dan pulang jam 10 atau 11 malam di mana orang tua sudah tidur. Demikian berjalan beberapa lama tetapi apa hasilnya? Anak telah menjadi pecandu ganja (Tirtarahardja, Umar dan La Sulo, 2000: 101-102).

Masyarakat adalah lingkungan sosial (Ngalim Purwanto, 1990: 25). Pengertian lingkungan sosial adalah semua

orang lain yang mempengaruhi orang lain itu sendiri, termasuk cara pergaulan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan. Masyarakat atau lingkungan sosial yang menjadi fokus hubungan sekolah dan masyarakat adalah lingkungan sosial yang mencakup manusia dan kebudayaannya.

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan ketiga dalam proses pembentukan kepribadian anak-anak sesuai dengan keberadaannya. Lingkungan masyarakat akan memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam diri anak, apabila diwujudkan dalam proses dan pola yang tepat. Tidak semua ilmu pengetahuan, sikap, ketrampilan maupun performans dapat dikembangkan oleh sekolah ataupun dalam keluarga.

Karena keterbatasan dana dan kelengkapan lembaga tersebut. Kekurangan yang dirasakan akan dapat diisi dan dilengkapi oleh lingkungan masyarakat dalam membina pribadi anak didik atau individual secara utuh dan terpadu. Pendidikan dalam masyarakat akan berfungsi sebagai:

- a) Pelengkap (*complement*).
- b) Pengganti (*substitute*).
- c) Tambahan (*supplement*) terhadap pendidikan yang diberikan oleh lingkungan yang lain.

Lingkungan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, hanya menyediakan pendidikan bukan sekedar tambahan atau pelengkap, tetapi adalah mengadakan pendidikan yang berfungsi sama dengan lembaga pendidikan formal di sekolah. Hal ini dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan lingkungan sekolah sehingga tidak mampu melayani semua lapisan dan semua anggota masyarakat yang ada. Seperti kursus Pengetahuan Dasar, kursus PKK atau kursus ketrampilan.

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

Lingkungan masyarakat juga mampu menyediakan pendidikan yang berfungsi sebagai tambahan (suplemen) di sekolah-sekolah teknik murid-murid telah mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang penggunaan mesin bubut, tetapi karena jumlah jam yang terbatas, sehingga semua siswa tidak dapat mendalaminya. Untuk memantapkan hal itu, maka diadakan kursus di luar program pendidikan formal yang telah ada. Hal yang sama sering juga dilakukan dalam rangka persiapan untuk memasuki perguruan tinggi, seperti bimbingan tes dan sebagainya. Dengan demikian bentuk dan jenis lingkungan menentukan dan memberi pengaruh terhadap pembentukan pribadi tiap individu dalam masyarakat, dengan mengingat ketiga fungsi tersebut.

Menurut Siswojo (Ngalim Purwanto, 1990) bahwa isi lingkungan sosial atau masyarakat dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

1. Fisik, teknologi, dan sumber manusia.
2. Sistem hubungan keluarga dan masyarakat.
3. Jaringan-jaringan organisasi.
4. Cara-cara berpikir, kepercayaan, dan nilai-nilai yang ada dan dianut oleh masyarakat.

Ketiga lingkungan di atas yang merupakan lingkungan tri pusat pendidikan pada dasarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, akan tetapi saling memberikan pengaruh timbal-balik dan tidak dapat dipilah-pilah. Peningkatan kontribusi setiap pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik memerlukan keserasian serta kerja sama yang erat dan harmonis antar tri pusat pendidikan. Sekolah tidak akan bisa melaksanakan kegiatan pendidikannya dengan lancar tanpa adanya dukungan dan

keterlibatan dari masyarakat. Sehingga pihak sekolah hendaknya mampu menganalisis kelompok masyarakat mana yang bisa dilibatkan dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan di sekolah. Kreativitas pihak sekolah/pengelola pendidikan dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjalin kerjasama sekolah dengan lingkungan keluarga/orang tua siswa dan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah.

Lingkungan keluarga telah diupayakan berbagai hal yang dapat menjadi landasan pengembangan selanjutnya di sekolah dan masyarakat. Lingkungan sekolah diupayakan berbagai hal yang lebih mendekatkan sekolah dengan orang tua siswa, misalnya organisasi orang tua siswa dan kunjungan rumah oleh personel sekolah. Selanjutnya sekolah juga mengupayakan agar programnya berkaitan erat dengan masyarakat di sekitarnya. Tahap akhir, lingkungan masyarakat mengusahakan berbagai kegiatan/program yang menunjang/melengkapi program keluarga dan sekolah. Kontribusi tripusat pendidikan yang saling memperkuat dan saling melengkapi itu akan memberi peluang mewujudkan sumber daya manusia terdidik yang bermutu.

H. Benang Merah Unsur Sosiologi Pendidikan

Unsur-unsur yang terlibat dalam proses pendidikan meliputi:

Pertama, Subjek yang dibimbing (peserta didik) yaitu peserta didik adalah warga belajar secara istilah murid, pelajar, siswa, santri, ataupun mahasiswa yang mengembangkan pendidikan pada jalur jenjang tertentu guna melaksanakan tugas

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

dan kewajiban sebagai makhluk Tuhan, manusia dan sebagai warga negara.

Kedua, Orang yang membimbing (pendidik) yaitu tenaga kependidikan yang profesional sebagai orang tua kedua setelah di rumah dalam mengembang tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing dan mengevaluasi peserta didik.

Ketiga, Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif) adalah hubungan aktif dua arah antara guru dengan siswa, siswa dengan guru dalam suatu ikatan kegiatan belajar mengajar dalam suatu tujuan pendidikan maupun tujuan pengajaran/instruksional.

Keempat, Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan) yang meliputi tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional.

Kelima, Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan) yaitu berkaitan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh peserta didik.

Keenam, Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode) yaitu ialah tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan, untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat adalah barang sesuatu yang dipakai untuk mencapai sesuatu maksud. Sedangkan metode terdiri dari 3 jenis metode, antara lain metode umum, metode khusus pendidik, dan metode bagi pelaksana program pendidikan (satuan pendidikan).

Ketujuh, Tempat dimana peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan) adalah meliputi lingkungan

keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, yang disebut tripusat pendidikan.

I. Uji Kompetensi

Ketujuh unsur pendidikan dalam kajian ilmu sosiologi di atas sebagai gambaran bahwa pendidikan memiliki unsur-unsur yang terlibat di dalamnya khususnya yang berkaitan dengan ranah pendidikan. Berikut ini pengayaan dalam pokok bahasan Unsur-Unsur Sosiologi Pendidikan yaitu:

1. Profesionalitas kerja guru setidaknya memiliki 4 bidang utama, antara lain:
 - a. Guru harus mengenal setiap peserta didik yang dipercayakan kepadanya.
 - b. Guru harus memiliki kecakapan memberi bimbingan, sebab mengajar hakekatnya membimbing.
 - c. Guru harus memiliki dasar pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan/pengajaran.
 - d. Guru harus memiliki pengetahuan bulat dan baru mengenai ilmu yang diajarkan.

Jelaskan alasan Saudara mengapa seorang guru harus melakukan keempat hal tersebut !

2. Interaksi edukatif merupakan pola hubungan timbal balik antara guru dan siswa (murid) yang saling berkomunikasi sebagai aksi, interaksi, dan transaksi. Menurut pendapat Saudara manakah diantara ketiga tersebut yang paling cocok dan sesuai dengan karakter siswa kelas rendah di sekolah dasar?
3. Kontribusi tripusat pendidikan yang saling memperkuat dan saling melengkapi itu akan memberi peluang mewujudkan

Bab II Unsur Pendidikan Dalam Kajian Sosiologi

sumber daya manusia terdidik yang bermutu. Bermula dari lingkungan keluarga yang telah diupayakan berbagai hal yang dapat menjadi landasan pengembangan selanjutnya di sekolah dan masyarakat. Lingkungan sekolah diupayakan berbagai hal yang lebih mendekatkan sekolah dengan orang tua siswa, misalnya organisasi orang tua siswa dan kunjungan rumah oleh personel sekolah. Selanjutnya sekolah juga mengupayakan agar programnya berkaitan erat dengan masyarakat di sekitarnya. Tahap akhir, lingkungan masyarakat mengusahakan berbagai kegiatan/program yang menunjang/melengkapi program keluarga dan sekolah. Jelaskan analisa Saudara mengenai pernyataan tersebut !

BAB III PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

Kompetensi Dasar :

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Memahami konsep Pendidikan informal, formal, dan non-formal.
2. Mengidentifikasi hubungan pendidikan dengan masyarakat.
3. Menjabarkan studi kasus hubungan pendidikan dengan masyarakat.
4. Memaknai hubungan pendidikan dengan masyarakat secara garis besar.
5. Menjawab soal latihan mengenai hubungan pendidikan dengan masyarakat.

A. Konsep Pendidikan

Pada bab I telah dijelaskan secara definitif arti pendidikan bahwa pendidikan merupakan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya yang berlangsung tidak dalam batas usia tertentu tetapi berlangsung sepanjang hidup sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan sepanjang hayat berwadhakan di semua lembaga pendidikan, sesuai dengan kepentingan perorangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Philip H. Commbs mengklasifikasikan pendidikan

kedalam tiga aspek (Fuad Hasan, 2003: 41):

1. Pendidikan informal (pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan) adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak, pada umumnya tidak teratur dan tidak sistematis, sejak orang lahir sampai mati. Seperti di dalam keluarga, tetangga, pekerjaan, hiburan, pasar, atau dalam pergaulan sehari-hari.

2. Pendidikan sekolah adalah pendidikan di sekolah, yang teratur, sistematis, mempunyai jenjang dan yang di bagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak kanak sampai perguruan tinggi.
3. Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah dan berencana di luar kegiatan persekolahan. Dalam hal ini, tentang pelajar, fasilitas, cara penyampaian, dan waktu yang dipakai, serta komponen-komponen lainnya disesuaikan dengan keadaan peserta, atau didik supaya mendapatkan hasil yang memuaskan.

Pendapat serupa dari UU Nomor 20 Tahun 2003, lingkungan pendidikan juga terdiri dari lingkungan pendidikan informal, formal dan non-formal.

1. Pendidikan Informal.

Pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2003). Selain itu, dalam Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1 Pasal 13, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pelaksanaan pendidikan berlangsung tidak dengan cara-cara artifisial, melainkan secara alamiah atau berlangsung secara wajar. Oleh sebab itu, pendidikan dalam keluarga disebut pendidikan informal.

Bab III Pendidikan dan Masyarakat

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik anak dalam kehidupannya. Pengertian keluarga secara etimologi adalah suatu kesatuan (unit) dimana anggota-anggotanya mengabdikan diri kepada kepentingan dan tujuan tersebut (Uyoh Sadulloh, 2006 : 182). Sedangkan keluarga menurut istilah adalah dua orang atau lebih yang tinggal bersama dan terikat karena darah perkawinan dan adopsi.

B.Boston yang dikutip oleh Ishak Sholeh (1983 : 11) mengatakan, keluarga adalah suatu kelompok pertalian nasib keluarga yang dapat dijadikan tempat untuk membina/membimbing anak-anak dan untuk pemenuhan hidup lainnya. Sehingga sangat jelas bahwa pendidikan keluarga adalah bantuan/pertolongan yang diberikan orangtua kepada anak agar anak itu dapat menjadi dewasa dan senantiasa terarah dalam kehidupannya.

Sementara itu, menurut Paul B Houton dan Chester L Hunt (1987:267) mendefinisikan keluarga dalam beberapa makna antara lain:

- a) Suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama.
- b) Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah atau perkawinan.
- c) Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak.
- d) Pasangan tanpa nikah yang mempunyai anak.
- e) Satu orang dengan beberapa anak.

Bentuk keluarga berdasarkan keanggotaannya, menurut Kamanto Sunarto (Wahyudin, 2007: 3.11) dibedakan menjadi keluarga batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Keluarga batih adalah keluarga terkecil yang terdiri dari

ayah, ibu dan anak. Sedangkan keluarga luas adalah keluarga yang terdiri atas beberapa keluarga batih. Secara tersirat dipahami bahwa tujuan pendidikan dalam keluarga pada umumnya adalah agar anak menjadi pribadi yang mantap, beragama, bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik.

Adapun karakteristik/ciri-ciri pendidikan informal antara lain: (a) tujuan pendidikan lebih menekankan pada pengembangan karakter; (b) peserta didiknya bersifat heterogen; (c) isi pendidikan tidak terprogram secara formal; (d) tidak berjenjang; (e) waktu pendidikan tidak terjadwal ketat, relatif lama; (f) cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar (g) evaluasi pendidikan tidak sistematis dan insidental; (h) *credential* tidak ada dan tidak penting (Wahyudin, 2007: 3.6).

Pendapat Umar Tirtarahardja (2005: 163-164) bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui tiga kegiatan yang meliputi kegiatan membimbing, terutama berkaitan dengan pematapan jati diri dan pribadi dari segi-segi periaku umum (aspek kebudayaan), mengajar, terutama berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, melatih, terutama berkaitan dengan keterampilan dan kemahiran (aspek teknologi).

Sementara itu, menurut Ali (2010: 46) ciri-ciri keluarga di Indonesia adalah:

- (1) Mempunyai ikatan keluarga yang sangat erat dilandasi oleh semangat kegotongroyongan.
- (2) Merupakan satu kesatuan utuh yang dijiwai oleh nilai budaya ketimuran yang kental dan mempunyai tanggung jawab besar.
- (3) Umumnya dipimpin oleh suami sebagai kepala rumah tangga yang dominan dalam mengambil keputusan walaupun prosesnya melalui musyawarah dan mufakat.

Bab III Pendidikan dan Masyarakat

(4) Sedikit berbeda antara yang tinggal di pedesaan dan di perkotaan keluarga di pedesaan masih bersifat tradisional, sederhana, saling menghormati satu sama lain dan sedikit sulit menerima inovasi baru.

Merujuk dari ciri-ciri keluarga di atas, maka dasar-dasar tanggung jawab keluarga terhadap anak diuraikan oleh Noor Syam (Kunaryo Hadikusumo: 76) antara lain:

- (1) Dorongan/motivasi cinta kasih sayang yang menumbuhkan sikap rela mengabdikan hidupnya untuk sang anak.
- (2) Dorongan/motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya, meliputi nilai religius yang dijiwai Ketuhanan Yang maha Esa, serta menjaga martabat dan kehormatan keluarga.
- (3) Tanggung jawab sosial berdasarkan kesadaran bahwa keluarga sebagai anggota masyarakat, bangsa, negara, bukan kemanusiaan.

Dasar tanggungjawab keluarga merupakan rasa kasih sayang dan kesadaran orang tua pada sang anak, oleh sebab itu fungsi keluarga MI Soelaeman (1987) dapat dimaknai sebagai berikut:

- (a) Fungsi edukatif adalah yang mengarahkan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya agar dapat menjadi manusia yang sehat, tangguh, maju dan mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi.
- (b) Fungsi sosialisasi anak adalah keluarga memiliki tugas untuk mengantarkan dan membimbing anak agar dapat beradaptasi dengan kehidupan sosial (masyarakat), sehingga kehadirannya akan diterima oleh masyarakat luas.

Sosiologi Pendidikan

- (c) Fungsi proteksi (perlindungan) adalah keluarga berfungsi sebagai wahana atau tempat memperoleh rasa nyaman, damai dan tentram seluruh anggota keluarganya.
- (d) Fungsi afeksi (perasaan) keluarga sebagai wahana untuk menumbuhkan dan membina rasa cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.
- (e) Fungsi religius keluarga sebagai wahana pembangunan insan-insan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berakhlak dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agamanya.
- (f) Fungsi ekonomi adalah keluarga sebagai wahana pemenuhan kebutuhan ekonomi fisik dan materil yang sekaligus mendidik keluarga untuk hidup efisien, ekonomis dan rasional.
- (g) Fungsi rekreasi artinya keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat dan penuh semangat.
- (h) Fungsi biologis artinya keluarga sebagai wahana menyalurkan kebutuhan reproduksi sehat bagi semua anggota keluarganya.

Fungsi pendidikan dalam keluarga menurut Wahyudin (2007: 3.7) adalah (a) sebagai peletak dasar pendidikan anak, dan (b) sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakatnya.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama tempat anak didik (siswa) menerima

pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya atau anggota keluarganya yang lain. Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik, keyakinan agama, bahasa, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan-keterampilan, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan siswa dalam belajar.

2. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah lingkungan pendidikan di sekolah dan dalam suatu kelas tertentu. Kata sekolah berasal dari bahasa latin, yaitu *skhhole*, *scola*, *scolae* atau *skhola* yang berarti waktu luang atau waktu senggang. Sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah kegiatan mereka yang utama, yaitu bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang ialah mempelajari cara berhitung, membaca huruf-huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan sekolah anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan-kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajarannya. Menurut Sunarto (Abdullah, 2011: 23) sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran yang dipimpin oleh kepala sekolah dibantu wakilnya. Bangunan sekolah di susun meninggi dengan memanfaatkan sarana yang tersedia untuk proses pendidikan.

Pendidikan formal menurut Dinn Wahyudin (2007: 3.9) adalah suatu satuan (unit) sosial atau lembaga sosial yang secara

sengaja dibangun dengan kekhususan tugasnya untuk melaksanakan proses pendidikan. Pendidikan formal atau sekolah mempunyai tujuan pendidikan sesuai dengan jenjang bentuk dan jenisnya. Tujuan sekolah dapat ditemukan pada kurikulum sekolah yang bersangkutan. Tujuan sekolah umumnya adalah memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik dalam mengembangkan kehidupannya.

Adapun karakteristik pendidikan formal antara lain (a) lebih menekankan pengembangan intelektual; (b) peserta didik bersifat homogen; (c) isi pendidikan terprogram secara formal/kurikulumnya tertulis; (d) terstruktur, berjenjang dan bersinambungan; (e) waktu pendidikan terjadwal dan relatif lama; (f) cara pelaksanaan pendidikan bersifat formal dan artificial; (g) evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis; (h) credential harus ada dan penting (Wahyudin, 2007: 3.11).

Pendapat dari beberapa ahli dapat kita maknai bahwa sekolah atau pendidikan formal merupakan satuan (unit/ lembaga) pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah dibantu wakilnya yang didalamnya terdapat kegiatan belajar mengajar sebagai bekal dalam mengembangkan kehidupan kelak yang bermula dari kegiatan berhitung, membaca, budi pekerti dan seni.

Jenis pendidikan formal dibedakan secara berjenjang. Akan tetapi sebelum menjelaskan jenjang pendidikan, berikut ini jenis pendidikan sebelum pendidikan dasar yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Contoh bentuk PAUD secara formal seperti Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain

Bab III Pendidikan dan Masyarakat

yang sederajat. Disamping itu, contoh bentuk PAUD non-formal seperti Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 28 UU Nomor 20 Tahun 2003).

Setelah PAUD jenjang dalam pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pertama, pendidikan dasar (pasal 17 ayat 1,2,3):

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kedua, Pendidikan Menengah (pasal 18 ayat 1,2,3,dan 4):

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketiga, pendidikan tinggi (pasal 19): “(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka”.

Ada berbagai pendapat mengenai fungsi pendidikan sekolah. Beberapa pendapat akan dikemukakan di berikut ini menurut Bogardus (Vembriarto, 1978: 50) fungsi pendidikan sekolah ada dua macam, yaitu: (1) memberantas kebodohan, dan (2) memberantas salah pengertian. Secara positif kedua fungsi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) menolong anak untuk menjadi melek-huruf dan mengembangkan kemampuan-kemampuan intelektualnya, (2) mengembangkan pengertian yang luas tentang manusia lain yang berbeda dan kebudayaannya dan interestnya.

David Popenoo (Vembriarto, 1978: 50-51) mengemukakan pendapat yang lebih terperinci mengenai fungsi pendidikan sekolah antara lain:

(1) Transmisi Kebudayaan

Fungsi transmisi kebudayaan masyarakat kepada anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : (a) transmisi pengetahuan dan keterampilan, (b) transmisi sikap, nilai-nilai, dan norma-norma. Transmisi pengetahuan ini mencakup tentang pengetahuan tentang bahasa, sistem matematika, pengetahuan alam dan sosial, dan penemuan-penemuan dan teknologi. Pengertian transmisi kebudayaan tidak

hanya terbatas pada mengajarkan kepada anak bagaimana cara belajar, melainkan juga bagaimana cara menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Sebagai contoh, di sekolah teknik, anak belajar bagaimana caranya memperbaiki mobil. Sedangkan anak dari sekolah teknik, anak belajar bagaimana menjadi montir.

Di sekolah anak tidak hanya mempelajari pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga sikap, nilai-nilai, dan norma-norma. Sebagian besar sikap dan nilai-nilai itu dipelajari secara informal melalui situasi formal di kelas dan di sekolah. Melalui contoh pribadi guru, isi cerita buku-buku bacaan, pelajaran sejarah dan geografi, dan suasana sekolah anak mempelajari sikap, nilai-nilai, dan norma-norma masyarakat.

(2) Memilih dan Mengerjakan Peranan Sosial

Pendidikan sekolah tidak perlu mengajarkan keterampilan-keterampilan yang di masa depan akan dengan mudah diganti oleh mesin. Sekolah hendaknya mengajarkan kepada anak lebih dari satu macam spesialisasi, sehingga mereka mudah berpindah pekerjaan. Pendidikan sekolah berfungsi menyaring dan mengarahkan pilihan anak mengenai spesialisasi pekerjaannya kelak dalam masyarakat. Disamping itu sekolah juga mengajarkan kepada anak peranannya sebagai anak dan sebagai pemuda, sebagai siswa dan sebagai warga negara. Bahkan I.L. Kandel (dalam Vembriarto, 1978:53) berpendapat, bahwa pendidikan sekolah hendaknya bertugas menyiapkan anak sebagai: (a) calon pekerja dalam masyarakat, (b) warga negara, dan (c) manusia.

(3) Integrasi Sosial

Masyarakat yang bersifat heterogen dan pluralistik, menjamin integrasi sosial merupakan fungsi pendidikan sekolah

terpenting, masyarakat Indonesia mengenal bermacam-macam suku bangsa masing-masing dengan adat istiadatnya sendiri, bermacam-macam bahasa daerah, agama, pandangan politik, dan berbeda-beda taraf perkembangannya. Berikut ini cara melakukan integrasi sosial di sekolah misalnya:

- (a) Sekolah mengajarkan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa nasional ini memungkinkan komunikasi antara suku-suku dan golongan-golongan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Pengajaran bahasa nasional ini merupakan cara yang paling efektif untuk menjamin integrasi sosial.
- (b) Sekolah mengajarkan pengalaman-pengalaman yang sama kepada anak melalui keseragaman kurikulum dan buku-buku pelajaran dan buku bacaan di sekolah. dengan pengalaman yang sama itu akan berkembang sikap dan nilai-nilai yang sama dalam diri anak.
- (c) Sekolah mengajarkan kepada anak corak kepribadian nasional (*national identity*) melalui pelajaran sejarah dan geografi nasional, upacara-upacara bendera, peringatan hari besar nasional, lagu-lagu nasional dan sebagainya. Pengenalan kepribadian nasional itu akan menimbulkan perasaan nasionalisme itu akan membangkitkan patriotisme.

4) Inovasi Sosial

Fungsi inovasi sosial di sekolah dasar dan menengah, serta perguruan tinggi agar menemukan hal-hal yang baru yang dapat menimbulkan pembaharuan dalam masyarakat, baik inovasi dalam teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, maupun kehidupan

masyarakat. Agar penemuan-penemuan baru berkembang, maka iklim di sekolah harus dijiwai oleh sikap keterbukaan.

5) Perkembangan Kepribadian Anak

Pendidikan sekolah berfungsi memperkembangkan kepribadian anak secara keseluruhan, yang artinya bahwa sekolah tidak saja mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan mempengaruhi perkembangan intelektual anak, melainkan juga memperhatikan perkembangan jasmaninya melalui program olahraga dan kesehatan. Di samping itu pendidikan sekolah juga memperhatikan perkembangan watak anak melalui latihan kebiasaan dan tata tertib, pendidikan agama dan budi pekerti dan sebagainya.

3. Pendidikan Non-formal

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab I Pasal 12 Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal mempunyai tujuan pendidikan ditentukan oleh bentuk pendidikan formal itu sendiri sesuai dengan jenisnya. Menurut Wahyudin (2007: 3.13) pendidikan non-formal dapat berfungsi sebagai pengganti, pelengkap, penambah, juga pengembang pendidikan formal dan informal.

Pendidikan non-formal adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Fungsi dari pendidikan non-formal yaitu mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan

dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Oleh karena itu, pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Berikut ini contoh dari lembaga pendidikan non-formal seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau ingin melengkapi pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional. Pendidikan non-formal terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian

Bab III Pendidikan dan Masyarakat

penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah dengan mengacu pada standard nasional pendidikan (Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati, 2002: 183-184).

Sesuai dengan rancangan Peraturan Pemerintah sasaran pendidikan non-formal dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni sebagai berikut:

- a. Usia Pra-Sekolah (0-6 tahun)
Fungsi lembaga ini mempersiapkan anak-anak menjelang mereka pergi sekolah (Pendidikan Formal) sehingga mereka telah terbiasa untuk hidup dalam situasi yang berbeda dengan lingkungan keluarga.
- b. Usia Pendidikan Dasar (7-12 tahun)
Usia ini dilaksanakan dengan penyelenggaraan program kejar paket A dan kepramukaan yang diselenggarakan secara sesame dan terpadu.
- c. Usia Pendidikan Menengah (13-18 tahun)
Penyelenggaraan pendidikan non-formal untuk usia semacam ini diarahkan untuk pengganti pendidikan, sebagai pelengkap dan penambah program pendidikan bagi mereka.
- d. Usia Pendidikan Tinggi (19-24 tahun)
Pendidikan non-formal menyiapkan mereka untuk siap bekerja melalui pemberian berbagai keterampilan sehingga mereka menjadi tenaga yang produktif, siap kerja dan siap untuk usaha mandiri (Soelaiman Joesoef dan Slamet Santosa, 1981: 58).

Berdasarkan sistem pengajaran dalam proses penyelenggaraan, pelaksanaan program pendidikan non-formal (Sanapiah, 2007: 91) meliputi:

Sosiologi Pendidikan

- 1) Kelompok, organisasi dan lembaga.
- 2) Mekanisme sosial budaya seperti perlombaan dan pertandingan.
- 3) Kesenian tradisional, seperti wayang, ludruk, ataupun teknologi modern seperti televisi, radio, film, dan sebagainya.
- 4) Prasarana dan sarana seperti balai desa, masjid, gereja, sekolah dan alat-alat pelengkapan kerja.

Keuntungan dari pendidikan non formal adalah sebagai berikut:

1. Biaya yang digunakan untuk suatu program cukup rendah.
2. Waktu yang dipakai tidak lama dan dapat diselesaikan dengan situasi dan kondisi partisipan.
3. Program yang dilaksanakan dapat membantu dan memenuhi kebutuhan langsung dari partisipan (Muri Yusuf, 2005: 63).

Berdasarkan klasifikasi antara pendidikan informal, formal, dan non-formal di atas, maka dapat disajikan perbedaan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Perbedaan Pendidikan Formal, Non-formal, dan Informal

Pendidikan formal	Pendidikan non-formal	Pendidikan informal
✍ Tempat pembelajaran di gedung sekolah.	✍ Tempat pembelajarannya bisa di luar gedung.	✍ Tempat pembelajaran bisa di mana saja.
✍ Ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik.	✍ Kadang tidak ada persyaratan khusus.	✍ Tidak ada persyaratan.
✍ Kurikulumnya jelas.	✍ Umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas.	✍ Tidak berjenjang.
✍ Materi pembelajaran bersifat akademis.	✍ Adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani.	✍ Tidak ada program yang direncanakan secara formal.
✍ Proses pendidikannya memakan waktu yang lama.	✍ Bersifat praktis dan khusus.	✍ Tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal.
✍ Ada ujian formal.	✍ Pendidikannya berlangsung singkat.	✍ Tidak ada ujian.
✍ Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta.	✍ Terkadang ada ujian.	✍ Tidak ada lembaga sebagai penyelenggara.
✍ Tenaga pengajar memiliki klasifikasi tertentu.	✍ Dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta.	
✍ Diselenggarakan dengan administrasi yang seragam.		

Sumber: radityapenton.blogspot.com

B. Konsep Masyarakat

Istilah “masyarakat” setiap kali kita mendengar dengan istilah “sosial”. Istilah “masyarakat” sendiri pada mulanya berasal dari kata *syarikat* dalam bahasa Arab. Kemudian mengalami proses kebahasaan sedemikian rupa sehingga dalam bahasa Indonesia menjadi kata “serikat” yang kurang-lebih berarti “kumpulan” atau “kelompok yang saling berhubungan” (Sidi Gazalba, 1976): 11). Sedang, istilah “sosial” berasal dari bahasa latin, *socius* yang berarti “kawan” (Gordon Marshall, 1998: 628).

Masyarakat juga dapat diartikan sebagai satu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Dalam arti ini masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan; medan kehidupan manusia yang majemuk (plural: suku, agama, kegiatan kerja, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya). Manusia berada dalam multikompleks antarhubungan dan antaraksi di dalam masyarakat (Mohammad Nor Syam, 1988: 15).

Menurut Selo Sumardjan berargumen bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Demikian pula dengan Paul B. Horton & C. Hunt menyatakan bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut. Pitirim A. Sorokin memberikan definisi suatu masyarakat yaitu perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (Soerjono Soekanto, 1981: 88).

Masyarakat yang berperan aktif dalam bidang pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Kelompok ini

Bab III Pendidikan dan Masyarakat

berupa organisasi-organisasi pendidikan, sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan sebagainya. Semua kelompok ini perlu dilibatkan secara aktif dalam membantu dan mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengelola atau pihak sekolah hendaknya mampu menganalisis kelompok masyarakat mana yang bisa dilibatkan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sebagai gambaran dibawah ini disajikan skema tentang keterlibatan berbagai pihak dalam *School District* di Amerika menurut Hoy & Miskel (1987).



Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong masih rendah mutu sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilihat dari laporan UNDP tentang mutu Sumber Daya Manusia, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan 109, jauh dibawah Malaysia (61) dan Brunei (32), disamping itu Indonesia masih kekurangan tenaga kerja berkualitas tinggi dan kurang dimanfaatkannya sebagian besar tenaga kerja karena menganggur atau setengah menganggur. Keadaan ini akan terus berlanjut dimasa yang akan datang mengingat pertumbuhan angkatan kerja

masih akan terus akan meningkat sementara kesempatan kerja yang tersedia akan semakin membutuhkan teknologi padat modal yang hemat tenaga kerja (Syarafuddin dkk, 2012: 11).

Sejalan dengan pemahaman masyarakat di atas maka menurut teori sibernetiknya tentang *General System Of Action* (Ankie M.M.. Hoogvelt: 1985) menjelaskan bahwa suatu masyarakat akan dapat dianalisis dari sudut syarat-syarat fungsionalnya yaitu:

Pertama, fungsi mempertahankan pola (*Pettern Maintenance*). Fungsi ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem kebudayaan. Hal itu berarti mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat, oleh karena diorientasikan realitas yang terakhir.

Kedua, Fungsi integrasi mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusinya pada organisasi dan peranannya dalam keseluruhan sistem.

Ketiga, Fungsi pencapaian tujuan (*Goal Attainment*) yakni berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem aksi kepribadian. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi masyarakat, mobilisasi warga masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut;

Keempat, fungsi adaptasi yakni berkenaan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem organisme perilaku dan dengan dunia fisik organik. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi lingkungan (http://kampus215.blogspot.com/2012/07/pendidikan-dan-masyarakat_2151.html).

Bab III Pendidikan dan Masyarakat

Alvin L. Bertrand (Richard Harker, et al, 2005: xv) mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kelompok yang sama identifikasinya dan teratur yang bertujuan untuk menjalankan segala sesuatu yang diperlukan bagi hidup bersama secara harmonis. Lebih lanjut Alvin L. Bertrand menyebutkan tiga ciri masyarakat; *Pertama* pada masyarakat mesti terdapat sekumpulan individu yang jumlahnya cukup besar. *Kedua* individu-individu tersebut harus mempunyai hubungan yang melahirkan kerjasama diantara mereka, minimal pada suatu tingkatan interaksi. *Ketiga* hubungan individu-individu sedikit banyak harus permanen sifatnya.

Maisyaroh (2003: 45-46) mengelompokkan masyarakat secara umum, yaitu:

(1) Masyarakat orang tua, adalah gabungan dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu; (2) Masyarakat yang terorganisasi dalam organisasi tertentu; dan (3) Masyarakat luas yang terdiri dari individu-individu yang tidak terkait secara langsung terhadap penyelenggaraan program pendidikan.

Dari beberapa pengertian di atas ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa masyarakat sebagai bagian dari suatu kelompok yang terorganisasi dan terjadi interaksi satu individu dengan individu lain yang sifatnya permanen yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu.

Sementara itu, proses terbentuknya suatu masyarakat biasanya berlangsung tanpa disadari yang diikuti oleh hampir sebagian besar anggota masyarakat. Dorongan manusia untuk

bermasyarakat menurut Richard Harker, et al (2005: xv) antara lain:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar biologis, seperti papan (tempat tinggal), sandang, dan pangan yang penyelenggaraannya akan lebih mudah dilaksanakan dengan kerja sama dari pada usaha perorangan.
- 2) Kemungkinan untuk bersatu dengan manusia lain (bermasyarakat).
- 3) Keinginan untuk bersatu dengan lingkungan hidupnya.
- 4) Dengan memasyarakat kemungkinan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi kekuatan alam, binatang dan kelompok lain lebih besar.
- 5) Secara naluriah manusia mengembangkan keturunan melalui keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil.
- 6) Manusia mempunyai kecenderungan sosial, yaitu seluruh tingkah laku yang berkembang akibat interaksi sosial atau hubungan antar manusia. Dalam hidup bermasyarakat, kebutuhan dasar kejiwaan ingin tahu, meniru, dihargai, menyatakan rasaharu dan keindahan, serta memuja tertampung dalam hubungan antar manusia, baik antar individu maupun kelompok.

Perdebatan sekitar awal mula terbentuknya masyarakat telah berlangsung semenjak masa Plato. Pada saat itu, Plato yang berkeyakinan bahwa masyarakat terbentuk secara kodrati, berseberang-pandang dengan kaum sofis yang berargumen bahwa masyarakat merupakan bentukan manusia (Sidi Gazalba, 1976: 11).

Bab III Pendidikan dan Masyarakat

Merujuk pada perspektif terbentuknya masyarakat melalui “manusia” (antroposentris), ditemui bahwa pada mulanya individu yang berlainan jenis bertemu satu sama lain, kemudian membentuk keluarga. Lambat laun, entitas keluarga kian berkembang sehingga membentuk “keluarga besar” atau “suku”. Pada tahapan berikutnya, suku kian berkembang dan terbentuklah “wangsa”. Selanjutnya, wangsa-wangsa dengan ciri fisik dan kebudayaan yang sama membentuk “bangsa”. Tahapan termutakhir dari proses tersebut adalah lahirnya “negara-bangsa” sebagaimana kita temui saat ini (Sidi Gazalba, 1976: 12).

C. Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat

Penggambaran konsep hubungan sekolah dengan masyarakat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Kemudian dalam pasal 9, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan hubungan timbal balik yang saling bersinergi. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab memberi pemahaman pada masyarakat tentang tujuan sekolah, program, serta kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Sebaliknya masyarakat memiliki tanggung jawab menyumbangkan sumber daya dalam hubungan tersebut. Disisi lain masyarakat memiliki otoritas untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Otoritas masyarakat tersebut dimaksudkan untuk memberi ruang pada masyarakat mengkritisi pendidikan di sekolah, sehingga kebutuhan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

Secara singkat pendidikan merupakan produk dari masyarakat, karena apabila kita sadari arti pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda maka seluruh upaya tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat.

Hubungan sekolah dengan masyarakat diartikan sebagai *public relation* dalam yaitu hubungan timbal balik sekolah dengan warga masyarakatnya (Suryo Subroto, 2012: 4). Masyarakat dan pendidikan merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, masyarakat membutuhkan pendidikan begitu pula sebaliknya, tanpa masyarakat pendidikan tidak akan berjalan dengan baik karena di dalam pendidikan terdapat unsur masyarakat seperti guru, peserta didik dan lainnya, begitu pula sebaliknya tanpa ada pendidikan masyarakat akan menjadi bodoh dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan.

Kaitan masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi, yakni:

1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan.
2. Lembaga kemasyarakatan dan kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif.

Bab III Pendidikan dan Masyarakat

3. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan (Mukhlison Effendi, 2008: 47-48).

Selain itu, menurut Abu Ahmadi (2004: 133) masyarakat juga dipandang sebagai “laboratorium dimana anak belajar, menyelidiki dan turut serta dalam usaha-usaha masyarakat yang mengandung unsur masyarakat”. Oleh karena itu, masyarakat berfungsi sebagai “penerus budaya dari generasi selanjutnya secara dinamis sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat melalui pendidikan dan interaksi sosial” (Ary H. Gunawan, 2004: 54). Hubungan kerjasama tersebut sekolah harus mampu memahami kebutuhan pendidikan apa yang diperlukan masyarakat untuk merubah kualitas hidup dan penghidupannya, selain itu sekolah harus memahamkan masyarakat tentang tujuan, proram, dan kebutuhan pendidikan. Disisi lain masyarakat memiliki tanggung jawab memberi aspirasi dan kritisi terhadap sekolah mengenai pendidikan yang diselenggarakan. Agar pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

Sementara itu, menurut Suryosubroto (2012: 70) hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk:

- 1) Membantu dan mengisi kegiatan anak di sekolah yang hanya berkisar 7 jam sementara sisa waktunya dihabiskan di rumah dan di masyarakat.
- 2) Memberikan sumbangan keuangan dan barang.
- 3) Mencegah perbuatan dan tingkah laku yang kurang baik.

Fangerlind dan Saha menjelaskan bahwa pendidikan adalah produk masyarakat, tetapi berpengaruh terhadap masyarakat dengan menumbuhkan perubahan-perubahan, yang

selanjutnya berpengaruh terhadap pendidikan. Dan proses ini bersifat kontinyu dan terus menerus (Imam Barnadib, 1990: 86).

Menurut Ngalim Purwanto (1990: 43-44) terdapat tiga jenis hubungan antara sekolah dan masyarakat, yaitu :

Pertama, Hubungan Edukatif.

Hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru dan orang tua. Hubungan ini mempunyai maksud agar tidak terjadi perbedaan prinsip yang dapat mengakibatkan keragua-raguan dalam kepribadian dan sikap seorang anak. Hubungan kerjasama yang lainnya adalah dengan berusaha memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Cara kerjasama itu dapat direalisasikan dengan pertemuan rutin orangtua murid ke sekolah demi membahas masalah murid yang ada.

Dengan adanya hubungan ini, diharapkan pihak sekolah dan orangtua murid dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi murid sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik.

Kedua, Hubungan Kultural.

Hubungan kultural adalah usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah merupakan suatu lembaga yang seharusnya dapat dijadikan barometer bagi maju-mundurnya kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, kesenian, dan adat-istiadat. Sekolah juga seharusnya dapat dijadikan titik pusat dan

Bab III Pendidikan dan Masyarakat

sumber tempat terpancarnya norma-norma kehidupan yang baik bagi kemajuan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang maju.

Sedangkan secara umum dalam pandangan Hymes (Indrafachrudi, 1994: 3) teknik penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu teknik: (1) Pertemuan kelompok, berupa seminar, lokakarya, dan sarasehan. Ragam unsur masyarakat yang dilibatkan di dalam kegiatan ini tergantung dari tema yang sedang dibahas. (2) Tatap muka, pihak sekolah dapat memanggil orang tua siswa yang bermasalah atau siswa yang memiliki kemampuan lebih, yang perlu pembinaan bersama agar kemampuannya dapat berkembang secara maksimal. (3) Observasi dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah, agar masyarakat tersebut mengetahui secara langsung hambatan dan faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan, mengetahui keberhasilan sekolah, sehingga diharapkan bersedia membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah. dan (4) Surat menyurat dengan berbagai pihak yang dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Seiring dengan perkembangan teknologi, sekolah dapat menerapkan teknik ini dengan menggunakan alat-alat komunikasi berupa telepon, *faximile*, internet, dan *e-mail*.

Pendidikan (sekolah) dan kehidupan masyarakat amat saling pengaruh-mempengaruhi dengan bermacam-macam cara, diantaranya:

- a) Pendidikan dipengaruhi oleh keadaan masyarakat, antara lain keadaan sosial ekonominya: faktor kesenjangan sosial

ekonomi akan mempengaruhi strategi dalam perencanaan pendidikan.

- b) Pendidikan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dengan memberikan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pendidikan akal, budi pekerti dan kerohanian kepada anak didik atau generasi muda yang langsung atau tidak langsung menentukan jenis pekerjaannya di kemudian hari: profesinya akan menempatkan dia pada tingkat sosial ekonomi tertentu dan mempengaruhi perkembangan seterusnya (Ngalim Purwanto, 1990: 50).

Mengatur hubungan pendidikan dengan masyarakat mencerminkan bahwa terselenggaranya pendidikan tidak lepas dari tanggungjawab eksistensi masyarakat. Hubungan pendidikan dengan masyarakat di atas merupakan penjelasan dari simbiosis mutualisme pendidikan dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menyukseskan simbiosis mutualisme pendidikan dan masyarakat perlu adanya pendidikan yang berbasis masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 16, arti dari pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan suatu pendidikan yang memberikan kemandirian dan kebebasan pada masyarakat untuk menentukan bidang pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat.

Bab III Pendidikan dan Masyarakat

Ditambahkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 55 menyebutkan beberapa ketentuan tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber-dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan-yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan kutipan di atas menjabarkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat dapat diselenggarakan dalam jalur formal maupun nonformal, serta dasar dari pendidikan berbasis masyarakat adalah kebutuhan dan kondisi masyarakat,

serta masyarakat diberi kewenangan yang luas untuk mengelolanya.

Oleh sebab itu, dalam pandangan Michael W. Galbraith (Nasution S, 1983: 45-46) bahwa prinsip-prinsip pendidikan berbasis masyarakat meliputi:

- 1) *Self determination* (menentukan sendiri) bahwa semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut.
- 2) *Self help* (menolong diri sendiri) maksudnya adalah anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena mereka beranggapan bahwa tanggung jawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri.
- 3) *Leadership development* (pengembangan kepemimpinan) yaitu para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai ketrampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri secara terus-menerus dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat.
- 4) *Localization* (lokalisasi) artinya potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan,

Bab III Pendidikan dan Masyarakat

program dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup.

- 5) *Integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian pelayanan) yaitu adanya hubungan antaragensi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- 6) *Reduce duplication of service* yaitu pelayanan masyarakat seharusnya memanfaatkan secara penuh sumber-sumber fisik, keuangan dan sumber daya manusia dalam lokalitas mereka dan mengoordinir usaha mereka tanpa duplikasi pelayanan.
- 7) *Accept diversity* (menerima perbedaan) Menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Ini berarti partisipasi warga masyarakat perlu dilakukan seluas mungkin dan mereka dituntut untuk aktif dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan.
- 8) *Institutional responsiveness* (tanggung jawab kelembagaan) yaitu pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani masyarakat. Lembaga harus dapat dengan cepat merespon berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat agar manfaat lembaga akan terus dapat dirasakan.

- 9) *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup) artinya bahwa kesempatan pembelajaran formal dan informal harus tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar belakang masyarakat.

D. Benang Merah Hubungan Pendidikan dan Masyarakat.

Sebelum membicarakan hubungan antara pendidikan dan masyarakat, pada pokok bahasan ini menjelaskan mengenai ketiga jenis pendidikan yang muncul dalam kehidupan manusia.

Pertama, pendidikan informal yang diistilahkan dengan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik anak dalam kehidupannya.

Kedua, pendidikan formal yang diistilahkan dengan sekolah yaitu suatu satuan (unit) sosial atau lembaga sosial yang secara sengaja dibangun dengan kekhususan tugasnya untuk melaksanakan proses pendidikan pada kurikulum sekolah yang bersangkutan untuk memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik dalam mengembangkan kehidupannya.

Ketiga, pendidikan non-formal adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Sementara itu, definisi masyarakat merupakan bagian dari suatu kelompok yang terorganisasi dan terjadi interaksi satu individu dengan individu lain yang sifatnya permanen yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu.

Selanjutnya hubungan antara pendidikan dan masyarakat pada dasarnya mengatur hubungan pendidikan dengan masyarakat yang didalamnya mencerminkan terselenggaranya pendidikan tidak lepas dari tanggungjawab eksistensi masyarakat. Hubungan pendidikan dengan masyarakat merupakan penjelasan dari simbiosis mutualisme pendidikan dan masyarakat. Sebagai upaya menyukkseskan simbiosis mutualisme pendidikan dan masyarakat yaitu perlu adanya pendidikan yang berbasis masyarakat.

E. Fenomenologi Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat.

Apa dan Bagaimana Pendidikan Masyarakat?



Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan memiliki hakikat memanusiakan manusia dengan mewujudkan pribadi yang merdeka. Pendidikan dilatari tiga lingkungan pendidikan utama yang saling berkaitan yang disebut Tripusat Pendidikan yang terdiri atas lingkungan pendidikan yang diselenggarakan oleh: pertama, pemerintah, dalam bentuk persekolahan atau pendidikan formal; kedua, masyarakat, dalam bentuk kelompok belajar, komunitas belajar,

atau pendidikan nonformal dalam hal ini Satuan Pendidikan Nonformal disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); ketiga, keluarga dan lingkungan terdekat, ada yang menyelenggarakan komunitas belajar dan biasanya berkaitan dengan keagamaan, spiritual, seni, olahraga, dan keterampilan lokal. Pembelajaran dalam lingkup keluarga dan ketetanggaaan atau lingkungan terdekat ini disebut dengan pendidikan informal.

Ketiga lingkungan belajar tersebut berperan penting dalam membangun kerangka fisik, mental, dan spiritual seseorang sehingga membentuk kepribadian dan karakter yang mandiri. Sejalan dengan tripusat pendidikan, pembinaan pendidikan masyarakat berperan dalam suatu proses di mana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat secara nonformal dan informal.

Seerti dijelaskan dalam tripusat pendidikan, pendidikan tidak dapat terisolasi dari masyarakat yang semakin berkembang dalam suatu kompleksitas dan keragaman tertentu. Masyarakat menginginkan hal yang sangat sederhana, yaitu punya pendidikan dan dapat meningkatkan penghasilan. Kenyataannya terdapat disparitas dalam pencapaian pendidikan ditinjau dari berbagai aspek, misalnya usia, lokasi geografis, sosial, dan budaya. Dalam kondisi seperti inilah pendidikan masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam mengisi rongga-rongga yang belum sepenuhnya tersentuh.

Sentuhan yang terfokus dapat dilakukan pendidikan masyarakat pada kantong-kantong kemarjinalan di provinsi, kabupaten/kota padat tuna aksara, desa, lokasi kumuh miskin di

Bab III Pendidikan dan Masyarakat

kota, dan kawasan 3 T (terpencil, terluar, dan tertinggal) untuk memenuhi hak orang dewasa terhadap pendidikan. Fokus sasaran dipertajam dengan memberikan layanan yang sesuai potensi dan konteks kelokalan pada kawasan klaster 4 (nelayan), kawasan pertanian, kawasan dengan etnik minoritas, dan kawasan perbatasan.

Hari Aksara Internasional (HAI) tanggal 8 September ditetapkan oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) melalui Konferensi Tingkat Menteri negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 17 November 1965 di Teheran, Iran.

Menyambut peringatan HAI 2015 Indonesia telah membuat capaian luar biasa dalam penuntasan buta aksara. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud) melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang dikeluarkan dalam laporan akuntabilitas kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud tahun 2015, hingga akhir 2014 angka buta aksara nasional hanya tersisa 3,76 persen atau sekitar 6.007.486 orang. Pada 2014 lalu pemerintah telah berhasil mengentaskan buta aksara sebanyak 157.920 penyandang tuna aksara.

Penurunan jumlah buta aksara pada 2014 tersebut melampaui target sisa penyandang buta aksara yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 3,83 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun sebelumnya, jumlah penduduk buta aksara masih mencapai 4,03 persen atau sekitar 6.165.406 orang. Target penurunan 2014 dapat tercapai tidak terlepas dari adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam melaksanakan program Pendidikan Keaksaraan Dasar.

Sosiologi Pendidikan

Pendidikan Keaksaraan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan yang layak, selain itu juga untuk meningkatkan kualitas setiap warga negara dalam kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan mendengarkan serta berbicara untuk mengkomunikasikan teks lisan dan tulisan. Melalui Pendidikan Keaksaraan ini diharapkan kapasitas peserta didik dapat meningkat hingga mencapai kemampuan keaksaraan dasar (*basic literacy*).

Puncak peringatan Hari Aksara Internasional ke-50 tahun ini akan diselenggarakan di Lapangan Karang Pawitan, Karawang, Jawa Barat, pada 24 Oktober 2015 mendatang. Puncak acara dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Perwakilan UNESCO Jakarta, Perwakilan Anggota DPR RI Komisi X, para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemendikbud, Bupati dan Walikota se-Jawa Barat, Kementerian/Lembaga terkait, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia serta Kepala UPT PAUD dan Pendidikan Masyarakat se-Indonesia.

PKBM



Bab III Pendidikan dan Masyarakat

Dalam mewujudkan harapan dan inisiatif masyarakat terhadap layanan pendidikan yang dapat dirasakan oleh semua lapisan, pada tahun 1998, masyarakat banyak mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan kebutuhan akan layanan pendidikan yang mampu menjamin kepastian perolehan layanan pendidikan bagi pemuda dan orang dewasa. Pelaksanaan pendidikan orang dewasa mampu meningkatkan ketersediaan, memperluas keterjangkauan, mewujudkan kesetaraan dan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dalam pelaksanaan hak-hak azasi manusia. Pada masa 2000an, PKBM cukup berperan dalam memperluas akses wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B, termasuk perluasan akses pendidikan menengah melalui Pendidikan Kesetaraan Paket C. Pada tahun 2006, Kelompok Belajar dan PKBM giat berperan dalam pendidikan keaksaraan orang dewasa untuk mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua (PUS). Kini, pendidikan orang dewasa perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien dan relevan dengan mempertimbangkan azas keadilan, kesetaraan yang non diskriminatif sehingga terlaksana pendidikan sepanjang hayat yang memperkokoh pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mampu menghadapi tantangan kemiskinan, kebodohan dan lingkungan (perubahan iklim) dimasa datang demi terwujudnya Indonesia yang berharkat dan bermartabat.

PKBM menawarkan beragam layanan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, hingga pendidikan perempuan dan kecakapan hidup. Semua layanan tersebut terbentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat di bawah jejaring kemitraan dengan

berbagai pihak terkait. Masyarakat berinvestasi dan tidak jarang merelakan sebagian asetnya berupa lahan, tenaga, pikiran, dan anggaran untuk membangun dan menyelenggarakan pendidikan nonformal di PKBM. Dikarenakan hal ini, standar, potensi, dan kompetensi tutor PKBM menjadi beragam dan tidak setara antara satu dengan yang lainnya. Program dan layanan yang ditawarkan juga berbasis konteks dan kebutuhan masyarakat setempat sehingga terkadang ada PKBM yang apabila programnya telah terpenuhi dalam kurun waktu tertentu, PKBM tersebut beralih fungsi. Oleh karena itu diperlukan pendataan untuk mengukur keragaman potensi, mengumpulkan informasi, dan melihat sebaran PKBM. Hingga saat ini jumlah PKBM yang telah mendaftar dan memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM) adalah sebanyak 6.474 unit.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pendidikan masyarakat juga berupaya mencegah kekambuhan ketunaaksaraan penduduk dewasa dan meningkatkan budaya baca dengan 'membacakan masyarakat dan memasyarakatkan membaca' melalui sinergi program pendidikan keaksaraan dengan perluasan akses terhadap bahan bacaan. Layanan ketersediaan bahan bacaan ini diwujudkan dengan perluasan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) pada tingkat kecamatan dan diperluas di ruang publik seperti pasar, mall, terminal, rumah ibadah, rumah sakit, panti sosial, dan ruang publik lainnya. Hingga saat ini terdaftar 6.350 TBM, termasuk TBM ruang publik dan Mobile.



Rumah Pintar

Di samping PKBM dan TBM, terdapat juga Rumah pintar sebagai salah satu Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (SPNF-S) yang didisain dengan strategi pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi para warga belajar, terutama anak-anak berusia 4-15 tahun. Selain daripada itu, terdapat juga program-program kecakapan hidup untuk para ibu dan pemuda, kemampuan keorngtuaan (parenting) bagi para ibu muda dengan anak-anak usia dini, dan ketahanan pangan keluarga melalui pengadaan kemampuan kewirausahaan. Oleh karena itu, semua orang pada semua tingkat kelompok usia berpartisipasi dalam proses pembelajaran sepanjang hayat untuk memberdayakan masyarakat mereka sendiri. Program-program ini dibagi ke dalam 5 sentra, yaitu (i) Setra Buku; (ii) Sentra Komputer; (iii) Sentra Audio Visual; (iv) Sentra Permainan; dan (v) Sentra Kriya. Saat ini terdapat 261 Rumah pintar, 145 Mobil Pintar, 402 Motor Pintar, dan 3 Kapal Pintar yang beroperasi di Indonesia, termasuk 2 Mobil Pintar yang beroperasi di Lebanon.



Revitalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Sebagai perbandingan perlu dicatat bahwa setelah jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirnya Perang Dunia ke II, pemerintah Jepang menganggap rekonstruksi pendidikan melalui sekolah atau pendidikan anak-anak tidaklah cukup untuk mengembalikan kejayaan Jepang. Kemudian diputuskan untuk membangun sebuah sistem pendidikan orang dewasa (pendidikan masyarakat) melalui Kominkan (Citizen's Public Hall) untuk mengakomodasikan, menyatukan, dan melayani seluruh kebutuhan pendidikan bagi masyarakatnya, terutama layanan keterampilan bagi orang dewasa. Saat ini terdapat 17.143 Kominkan, melebihi perpustakaan umum (2.979) dan Sekolah Menengah Pertama (10.915). Kominkan dianggap berperan secara berhasil dalam memberdayakan masyarakat dan berkontribusi sangat signifikan dalam rekonstruksi pendidikan Jepang pada masa restorasi hingga saat ini.

Peran PKBM yang semula berkontribusi cukup signifikan terhadap perluasan akses wajib belajar melalui pendidikan nonformal (kesetaraan), saat ini perannya harus berubah karena wajib belajar sembilan tahun relatif telah dicapai. Untuk itu PKBM perlu direvitalisasi melalui berbagai upaya peningkatan mutu dan

peningkatan kebertahanan atau keberlangsungan (sustainability). PKBM perlu meningkatkan kemandirian dan kebertahanannya agar mampu melakukan analisis kebutuhan dan potensi yang berkembang di masyarakat serta mampu menggerakkan sumber daya/dana yang terdapat di sekitarnya. Keberhasilan PKBM terletak pada kemampuan PKBM dalam memberikan dampak kolektif pada kumpulan individu, keluarga, ketetanggaaan, dan masyarakat sekitar PKBM. Dampak ini dapat berupa penyadaran dan komitmen pengentasan ketunaaksaraan dan pengentasan kemiskinan. Keberhasilan PKBM juga harus ditunjukkan dari tumbuhnya komunitas-komunitas kecil yang sadar dan berbuat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, PKBM perlu direvitalisasi melalui hal-hal sebagai berikut.

1. Peningkatan mutu kelembagaan PKBM termasuk manajemen kelembagaandan alokasi dana untuk membuat outlet PKBM sehingga PKBM dapat memasarkan produknya atau produk PKBM lain untuk menggerakkan dana masyarakat yang bermanfaat bagi keberlangsungan dan kebertahanan PKBM itu sendiri.
2. Pengembangan PKBM Tematik yang menguatkan potensi lokal atau khas masyarakat di sekitar PKBM seperti batik, bordir, kerancang, sutra, anyaman, aneka kuliner, dan manajemen pemasaran kuliner, serta hal-hal berkaitan dengan bisnis busana atau produk gaya hidup lainnya.
3. Pengembangan PKBM diarahkan pada terbentuknya komunitas usaha mandiri, bukan hanya sekedar penyedia jasa pelatihan.

4. Peningkatan peran PKBM dalam pemassalan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sangat mungkin dilakukan mengingat PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal penyelenggara layanan pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal. Layanan PAUD yang diselenggarakan PKBM juga memiliki sisi strategis lainnya karena dapat disinergikan dengan layanan pendidikan kecakapan keorangtwaan (parenting education) bagi para orang tua dengan anak usia dini, pendidikan kecakapan hidup, dan pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
5. Pengembangan sarana PKBM melalui pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Rintisan Balai Belajar Bersama (RB3).
6. Sinergi PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam hal peningkatan kualitas tutor dan penyelenggara pendidikan nonformal.
7. Pendataan PKBM atau satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya berbasis Nomor Induk Lembaga (NILEM) online.

Sumber: <http://www.kemdikbud.go.id>

F. Uji Kompetensi

Pendalaman materi hubungan pendidikan dan masyarakat di atas, tersaji dalam bentuk pendalaman latihan soal berikut ini.

1. Pendidikan informal antara lain: (a) tujuan pendidikan lebih menekankan pada pengembangan karakter; (b) peserta didiknya bersifat heterogen; (c) isi pendidikan tidak terprogram secara formal; (d) tidak berjenjang; (e) waktu pendidikan tidak terjadwal ketat, relatif lama; (f) cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar (g) evaluasi

Bab III Pendidikan dan Masyarakat

pendidikan tidak sistematis dan incidental. Jelaskan ciri pendidikan informal tersebut jika dikaitkan hubungan pendidikan dan masyarakat pada zaman sekarang !

2. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong masih rendah mutu sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilihat dari laporan UNDP tentang mutu Sumber Daya Manusia, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan 109, jauh dibawah Malaysia (61) dan Brunei (32), disamping itu Indonesia masih kekurangan tenaga kerja berkualitas tinggi dan kurang dimanfaatkannya sebagian besar tenaga kerja karena menganggur atau setengah menganggur. Berdasarkan fenomena tersebut, bagaimana pendapat Saudara hubungan pendidikan dan masyarakat yang selama ini telah berlangsung apakah dikategorikan gagal? Jelaskan!
3. Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan suatu pendidikan yang memberikan kemandirian dan kebebasan pada masyarakat untuk menentukan bidang pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Jelaskan pendapat Saudara mengenai pendidikan berbasis masyarakat jika dilakukan dalam jenjang pendidikan informal, formal, dan non formal !

BAB IV

PENDIDIKAN SEBAGAI SALURAN STRATIFIKASI DAN MOBILISASI

Kompetensi Dasar:

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi pendidikan sebagai saluran stratifikasi sosial.
2. Menjabarkan pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial.
3. Memberi gambaran fenomena di masyarakat tentang pendidikan sebagai saluran stratifikasi dan mobilisasi pendidikan.
4. Memaknai pendidikan sebagai saluran stratifikasi dan mobilitas sosial secara garis besar.
5. Menjawab soal latihan mengenai pendidikan sebagai saluran stratifikasi dan mobilitas sosial.

Proses perubahan pendidikan paling tidak memiliki dua peran yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Pendidikan akan berpengaruh terhadap perubahan masyarakat, dan 2) Pendidikan harus memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi menuju terwujudnya masyarakat madani. Proses perubahan sistem pendidikan harus dilakukan secara terencana dengan langkah-langkah yang strategis, yaitu “mengidentifikasi berbagai problem yang menghambat terlaksanya pendidikan dan

merumuskan langkah-langkah pembaharuan yang lebih bersifat strategis dan praktis sehingga dapat diimplementasikan dilapangan” langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan menyentuh semua aspek, mengantisipasi perubahan yang terjadi, mampu merekayasa terbentuknya sumber daya manusia yang cerdas, yang memiliki

kemampuan inovatif dan mampu meningkatkan kualitas manusia. Oleh karena itu, pendidikan betul-betul akan berpengaruh terhadap perubahan kehidupan masyarakat dan dapat memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi ilmu pengetahuan dan pelatihan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia (George Ritzer-Douglas J. Goodman. 2004).

Berbicara tentang perubahan pendidikan, pada materi sebelumnya telah kita bahas mengenai hubungan pendidikan (sekolah) dengan masyarakat. Adanya harapan signifikansi hubungan dua aspek tersebut mewujudkan suatu perubahan tertentu dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini perubahan yang diharapkan adanya hubungan sekolah dan masyarakat melalui beberapa cara, antara lain (Wuradji, 1988: 67-68):

Pertama, Perubahan Teknologi.

Dilihat dari sudut pandang sekolah, perubahan teknologi mempunyai tiga dampak penting, yaitu:

1. Perubahan teknologi dapat menciptakan suatu tuntutan bagi individu untuk memiliki keterampilan baru.
2. Perubahan teknologi menuntut agar sekolah dapat mempersiapkan lulusannya untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.
3. Pengaruh teknologi terhadap sekolah yang terutama adalah pada penggunaan media pembelajaran, komunikasi, transformasi, dan revolusi bioteknologi.

Kedua, Perubahan Demografi.

Perubahan yang terjadi sehubungan dengan ukuran, penyaluran, dan komposisi penduduk. Pengaruhnya terhadap pendidikan antara lain:

Bab IV Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilisasi

1. Pengembangan kebijakan pendidikan.
2. Pembatasan secara ketat penerimaan siswa baru.
3. Ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan fasilitas pendidikan.

Ketiga, Urbanisasi dan Sub-urbanisasi.

1. Tanggung jawab sekolah membantu penyesuaian diri dari berbagai macam kelompok yang sebagian besar merupakan penduduk perkotaan.
2. Sekolah mempunyai peranan yang penting dalam membantu mekanisme kontrol sosial di masyarakat.
3. Sekolah menentukan pengalaman pendidikan khususnya dalam mempersiapkan peserta didik secara tepat untuk hidup dipertanian.

Keempat, Perubahan Politik Masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Dua perubahan utama telah dan akan terus berlangsung yang memiliki dampak terhadap pendidikan, terjadi di dalam struktur pemerintahan dan di dalam masyarakat, yaitu:

1. Meningkatnya keterlibatan pemerintahan di dalam kegiatan-kegiatan anggota masyarakat.
2. Berkembangnya saling ketergantungan antara pemerintah negara yang satu dengan pemerintah negara yang lain, tidak hanya di lingkungan masyarakatnya, tetapi juga antar bangsa.

Perubahan dalam pendidikan di atas merupakan gambaran tentang mengatur hubungan sekolah dan masyarakat yang berdampak pada perubahan teknologi, perubahan demografi, perubahan urbanisasi dan perubahan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain dari keempat perubahan di atas, perubahan yang diharapkan setelah

adanya peningkatan pendidikan menjadikan seseorang bisa meningkat secara status hidupnya dan terjadi perpindahan status dalam hidup seseorang. Perubahan status dalam istilah sosiologi disebut dengan stratifikasi sosial. Sedangkan perpindahan status sosial dalam istilah sosiologi disebut dengan istilah mobilitas sosial. Adapun penjelasan perubahan dan perpindahan status tersebut dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut.

A. Pendidikan dan Stratifikasi Sosial

Sebelum kita membahas hubungan antara pendidikan dengan stratifikasi sosial, terlebih dahulu menjabarkan apa itu arti stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan salah satu istilah dalam ilmu sosiologi. Sejumlah ahli sosiologi mengemukakan definisi stratifikasi sosial sosial. Paul B Horton dan Chester L Hunt (1992: 5) menyatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan system peringkat status dalam masyarakat. Peringkat memberitahukan kepada kita adanya dimensi vertikal dalam status sosial yang ada dalam masyarakat.

Menurut Mosaca bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Pendapat serupa dari Max Weber yang menyatakan definisi stratifikasi sosial merupakan penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu atas lapisan-lapisan hirarki menurut dimensi kekuasaan, *privilege*, dan prestise. Menurut Pitirim A. Sokorin menuliskan stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat/hirarki (Fritz Hotman S. Damanik, 2009: 6).

Bab IV Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilisasi

Soerjono Soekanto (1981:133), menyatakan sosial *stratification* adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau system berlapis-lapis dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan konsep sosiologi, dalam artian kita tidak akan menemukan masyarakat seperti kue lapis; tetapi pelapisan adalah suatu konsep untuk menyatakan bahwa masyarakat dapat dibedakan secara vertikal menjadi kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah berdasarkan kriteria tertentu.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya lapisan dalam masyarakat atau yang sering disebut dengan stratifikasi sosial. Keadaan masyarakat yang majemuk memungkinkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat karena faktor-faktor tertentu. Sistem lapisan sosial dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya atau sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Menurut Soekanto (1982: 199-200) alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Pelapisan sosial ini terjadi karena adanya perkembangan dan perubahan dalam masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Batak dimana marga tanah, yaitu marga pertama-tama membuka tanah dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi. Demikian pula dengan golongan pembuka tanah kalangan orang Jawa di Desa dianggap sebagai pembuka tanah dan pendiri desa yang bersangkutan.

Sedangkan tipe sistem lapisan sosial yang sengaja disusun untuk tujuan bersama atau tertentu menurut Saripudin (2010:

48) terjadi pada organisasi-organisasi formal seperti partai politik, pemerintahan, perusahaan, dan angkatan bersenjata. Hal-hal tersebut berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi yang merupakan unsur khusus dalam sistem lapisan.

Adapun yang mendasari terjadinya stratifikasi sosial adalah sebagai berikut :

Pertama dilihat dari ukuran kekayaan. Kekayaan (materi atau kebendaan) dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak mana ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian pula sebaliknya, yang tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaian, maupun kebiasaannya dalam berbelanja.

Kedua dilihat dari ukuran kekuasaan dan wewenang. Dalam hal ini jika seseorang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar maka, ia akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan.

Ketiga dilihat dari ukuran kehormatan. Disini ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan

Bab IV Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilisasi

menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional, biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur.

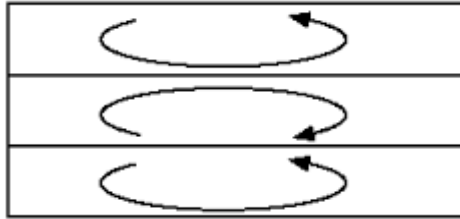
Keempat, dilihat dari ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktorandus, doktor ataupun gelar profesional seperti profesor. Namun sering timbul akibat-akibat negatif dari kondisi ini jika gelar-gelar yang disandang tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya, sehingga banyak orang yang berusaha dengan cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh gelar kesarjanaan, misalnya dengan membeli skripsi, menyuap, ijazah palsu dan seterusnya (Fritz Hotman S. Damanik, 2009: 8-9).

Selain itu, dalam argumennya Saripudin (2010: 48-50) juga menjelaskan bahwa stratifikasi sosial mempunyai beberapa tipe antara lain:

1) Stratifikasi Sosial Tertutup

Stratifikasi tertutup adalah stratifikasi di mana tiap-tiap anggota masyarakat tersebut tidak dapat pindah ke strata atau tingkatan sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh stratifikasi sosial tertutup yaitu seperti sistem kasta di India dan Bali serta di Jawa ada golongan darah biru dan golongan rakyat

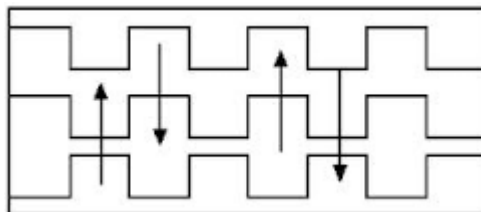
biasa. Tidak mungkin anak keturunan orang biasa seperti petani miskin bisa menjadi keturunan ningrat/bangsawan darah biru.



Gambar 1. Stratifikasi sosial tertutup.

2) Stratifikasi Sosial Terbuka

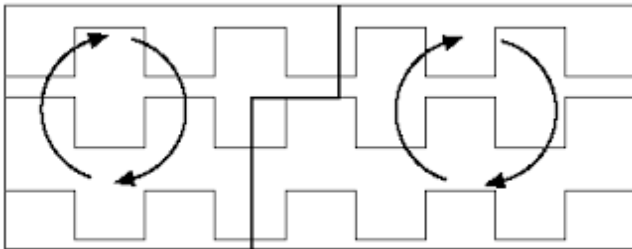
Stratifikasi sosial terbuka adalah sistem stratifikasi di mana setiap anggota masyarakatnya dapat berpindah-pindah dari satu strata/tingkatan yang satu ke tingkatan yang lain. Misalnya seperti tingkat pendidikan, kekayaan, jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Seseorang yang tadinya miskin dan bodoh bisa merubah penampilan serta strata sosialnya menjadi lebih tinggi karena berupaya sekuat tenaga untuk mengubah diri menjadi lebih baik dengan sekolah, kuliah, kursus dan menguasai banyak keterampilan sehingga dia mendapatkan pekerjaan tingkat tinggi dengan bayaran/penghasilan yang tinggi.



Gambar 2. Stratifikasi sosial terbuka

3) Stratifikasi Sosial Campuran

Stratifikasi sosial campuran adalah gabungan dari stratifikasi sistem terbuka dan stratifikasi sistem tertutup dimana masyarakat tersebut dapat untuk pindah kelapisan lebih atas, namun di sisi lain dapat melakukan mobilitas vertical dengan status sama. Contohnya dapat kita temukan pada masyarakat Bali. Misalnya seseorang yang ber kasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali, namun apa bila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, maka ia akan memperoleh kedudukan rendah, maka ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta.



Gambar 3. Stratifikasi Sosial Campuran

Sifat dari sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat ada yang tertutup dan ada yang terbuka (M.Munandar S, 1992: 90). Sistem bersifat tertutup tidak memungkinkan terjadinya perpindahan seseorang dari lapisan sosial yang satu ke yang lain, baik ke bawah maupun ke atas. Keanggotaan dari suatu lapisan tertutup, diperoleh melalui kelahiran atau suatu ideologi. Sistem stratifikasi sosial tertutup dapat dilihat pada masyarakat berkasta, pada masyarakat feodal, pada masyarakat rasial, dan sebagainya. Kemudian pada masyarakat yang sistem stratifikasi sosialnya

terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan skill dan kecakapannya untuk meningkatkan stratifikasi sosial atau turun ke lapisan sosial di bawahnya.

Jadi, suatu masyarakat dinamakan tertutup mana kala setiap anggota masyarakat tetap pada status yang sama dengan orang tuanya. Sedangkan dinamakan terbuka, karena setiap anggota masyarakat menduduki status berbeda dengan orang tuanya, dimana bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Mobilitas sosial yang disebut tadi, berarti berpindah status dalam stratifikasi sosial. Berbagai faktor yang menyebabkan perpindahan status, antara lain pendidikan dan pekerjaan.

Golongan sosial timbul karena adanya perbedaan status dikalangan anggota masyarakat. Untuk menentukan stratifikasi sosial dapat diikuti tiga metode, yaitu :

Pertama, Metode obyektif yaitu stratifikasi yang ditentukan berdasarkan kriteria obyektif antara lain: jumlah pendapatan, lama atau tinggi pendidikan, jenis pekerjaan. Menurut suatu penelitian di Amerika Serikat pada tahun 1954, bahwa dokter menempati kedudukan yang sangat tinggi sama dengan gubernur negara bagian. Juga professor tinggi kedudukannya sama dengan ilmuwan, anggota kongres, Dewan Perwakilan Rakyat. Guru sekolah menduduki tempat yang lebih rendah dari kapten tentara, pemain orkes atau kontraktor, akan tetapi lebih tinggi dari penyiar radio, masinis, polisi. Yang paling rendah kedudukannya adalah tukang semir sepatu.

Kedua, Metode subyektif yaitu dimana dengan menggunakan metode ini kelompok/golongan sosial dirumuskan berdasarkan pandangan menurut anggota masyarakat menilai

Bab IV Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilisasi

dirinya dalam hirarki kedudukan dalam masyarakat itu. Kepada mereka diajukan pertanyaan: “menurut pendapat saudara termasuk golongan manakah saudara di negara ini, golongan atas, golongan menengah, atau golongan rendah?.

Ketiga, Metode reputasi yaitu metode ini dikembangkan oleh W. Lloyd Warner cs. Dalam metode ini golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing stratifikasi masyarakat itu. Kesulitan penggolongan objektif dan subyektif ialah bahwa penggolongan itu sering tidak sesuai dengan tanggapan orang dalam lingkungan sehari-hari yang nyata tentang golongan sosial masing-masing. Oleh sebab itu W.L Warner mengikuti suatu cara yang realistis yakni memberikan kesempatan kepada orang dalam masyarakat itu sendiri menentukan golongan – golongan mana yang terdapat pada masyarakat itu lalu mengidentifikasi anggota masing-masing golongan itu (Nasution,2011: 27-28).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat kriteria yang dipakai untuk menggolongkan orang dalam pelapisan sosial dilihat dari ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan yang dimiliki. dilihat dari ukuran itu, dapat disimpulkan bahwa pelapisan sosial dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti adanya perbedaan gaya hidup dan perlakuan dari masyarakat terhadap orang-orang yang menduduki pelapisan tertentu.

Adanya penghargaan terhadap pendidikan maka adanya harapan peningkatan pendidikan terhadap peningkatan status seseorang. Maka dari itu pendidikan merupakan salah satu dasar stratifikasi sosial. Hal ini terjadi karena dalam stratifikasi sosial

merupakan gejala sosial yang tidak dapat dihindari dan terdapat di setiap masyarakat. Pandangan mengenai pendidikan, dorongan, cita-cita dan hal yang lain bertalian dengan pendidikan, diwarnai stratifikasi sosial. Masyarakat yang menganut system sosial terbuka memiliki kesempatan luas untuk berusaha naik ketangga sosial yang lebih tinggi. Konsekuensinya terbuka pula untuk turun/jatuh dalam tangga sosial yang lebih rendah. Gejala naik dan turunnya tangga pelapisan sosial ini tidak terdapat dalam masyarakat yang menganut system pelapisan sosial yang tertutup (Abdullah Idi, 2013: 179-180).

Ukuran pendidikan atau ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktorandus, doktor ataupun gelar profesional seperti profesor.

Sebagai contoh mereka yang berpendidikan tinggi berada dilapisan atas sedangkan yang tidak sekolah pada lapisan bawah. Dari perbedaan lapisan sosial ini terlihat adanya kesenjangan sosial. Hal ini tentu merupakan masalah sosial dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi alat untuk meningkatkan status sosial masyarakat. Namun pendidikan sendiri dapat menyebabkan stratifikasi sosial dan membuat kesenjangan didalam dunia pendidikan semakin jelas terlihat. Seperti kasus timbulnya label sekolah favorit dan tidak favorit. Pendidikan dengan stratifikasi sosial sangat erat hubungannya. Pada stratifikasi sosial terbuka pendidikan dapat menjadi alat untuk mobilisasi sosial. Pendidikan

Bab IV Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilisasi

sebagai salah satu dasar penentu kelas sosial dapat merubah kelas seseorang.

Secara analisa tingkat pendidikan tertinggi yang didapatkan seseorang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya di dalam masyarakat. Orang yang berkedudukan tinggi, bergelar akademis, yang mempunyai penempatan besar tinggal dirumah elite dan merasa termasuk golongan atas akan mengusahakan anaknya masuk universitas dan memperoleh gelar akademis. Sebaliknya anak yang orangtuanya buta huruf mencari nafkahnya dengan menjadi pemulung, kerja serabutan, kuli panggul, kuli bangunan, tukang becak tidak dapat diharapkan akan mengusahakan anaknya menikmati perguruan tinggi.

B. Pendidikan dan Mobilitas Sosial

Pendidikan telah menjadi sektor strategis dalam perencanaan pembangunan suatu bangsa. Banyak negara menjadikan pendidikan sebagai sektor utama atau unggulan dalam perencanaan program pembangunan. Sebagai contoh negara Jepang menjadi negara maju karena pendidikan (Abd.Muhyi Batubara, 2004: 5).

Faktor pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Terdapat korelasi makin tinggi pendidikan yang diperoleh makin besar harapan untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Dengan demikian terbuka kesempatan untuk meningkat kegolongan yang lebih tinggi. Disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu jalan untuk menuju mobilitas sosial (Nasution, 2011: 38).

Setiap masyarakat senantiasa terjadi proses dinamika atau transformasi, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Dinamika sosial terjadi akibat adanya faktor-faktor tertentu sebagai pendorong melakukan dinamika, dan dinamika inilah biasanya disebut mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah sebuah gerakan masyarakat dalam kegiatan menuju perubahan yang lebih baik. Henry Clay Smith mengatakan mobilitas sosial adalah gerakan dalam struktur sosial atau gerakan antar individu dengan kelompoknya (Ary H Gunawan, 2000: 36).

Mobilitas sosial diartikan sebagai gerak dalam struktur sosial (*social structure*). Mobilitas sosial menunjuk pada pergerakan masyarakat dalam struktur-struktur sosial, seperti pendidikan, ekonomi, pertanian, agama, dan sebagainya (Kimball Young and Raymond W. Mack, 1959: 214).

Haditono menjabarkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain, tetapi sejajar. Paul B Horton dan Chester L Hunt mengatakan mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya (Abdullah Ibi, 2013: 195).

Rangkuman dari beberapa pendapat tokoh di atas disimpulkan bahwa secara definitif arti mobilitas sosial adalah suatu pergerakan atau perpindahan kedudukan dan peran seseorang dalam struktur sosial tertentu dalam perubahan tertentu secara individual maupun kelompok.

Pergerakan atau perpindahan tersebut, baik secara individu maupun kelompok di masyarakat terjadi secara fisik,

Bab IV Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilisasi

sosial dan psikis. *Pertama*, mobilitas fisik atau disebut dengan mobilitas geografis yaitu perpindahan tempat tinggal (menetap/sementara) dari suatu tempat ke tempat yang lain. *Kedua*, mobilitas sosial yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya (Bruce J. Cohen , 1983: 269). *Ketiga*, Mobilitas psikis, yaitu merupakan aspek-aspek sosial-psikologis sebagai akibat dari perubahan sosial. Dalam hal ini adalah mereka yang bersangkutan mengalami perubahan sikap yang disertai tentunya dengan goncangan jiwa (Sarlito Sarwono, 2001: 33).

Mobilitas sosial juga terjadi pergerakan secara naik turun atau tidak terjadi perpindahan sama sekali, artinya bahwa mobilitas bisa bersifat horisontal dan vertikal. Mobilitas sosial horisontal diartikan sebagai gerak perpindahan dari suatu status lain tanpa perubahan kedudukan. Jadi dalam mobilitas sosial horisontal ini, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Sedangkan mobilitas sosial vertikal yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu status sosial ke status sosial lainnya, yang tidak sederajat (Soerjono Soekanto, 1981: 150). Mobilitas sosial vertikal ini jika dilihat dari arahnya, maka dapat dirinci atas dua jenis, yaitu gerak perpindahan status sosial yang naik (*sosial climbing*) dan gerak perpindahan status yang menurun (*sosial sinking*).

Pengertian mobilitas sosial ini mencakup baik mobilitas kelompok maupun individu. Misalnya keberhasilan keluarga Pak A merupakan bukti dari mobilitas individu; sedang arus perpindahan penduduk secara bersama-sama (bedo desa) dari

daerah kantong-kantong kemiskinan di Pulau Jawa ke daerah yang lebih subur sehingga tingkat kesejahteraan mereka relatif lebih baik dibanding di daerah asal, merupakan contoh mobilitas kelompok.

Dalam kedua aspek tersebut, yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterbukaan masyarakat. Secara ekstrim suatu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat dimana hubungan antara pekerjaan orang tua dan pekerjaan anak, umpamanya sama sekali acak sifatnya. Oleh karena itu dalam masyarakat terbuka status dapat diperoleh berdasarkan prestasi atau achievement (Nasution, 2011: 56) Seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang tertentu yang mampu diaktualisasikan dan mendapat pengakuan dari masyarakat akan menempatkan individu pada posisi tertentu. Meskipun dalam kenyataannya anak-anak dari golongan rendah mengalami lebih banyak kesulitan dibanding dari golongan atas. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang menghambat mobilitas sosial seperti, agama, kesukuan, jenis kelamin, dan sebagainya.

Di satu sisi, dalam masyarakat yang tertutup, pendidikan individu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam status sosial anak. Status sosial diperoleh berdasarkan faktor keturunan, atau disebut *ascribed status*. Oleh karenanya, anak pedagang kaki lima akan melahirkan calon pedagang kaki lima, anak kepala desa akan melahirkan calon kepala desa, demikian pula anak seorang priyayi akan melahirkan calon priyayi pula. Dalam masyarakat ini faktor keturunan sangat dominan dalam mempengaruhi status sosial anak.

Bab IV Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilisasi

Pendidikan juga ada kalanya memainkan peranannya untuk membentuk intelektual manusia, sehingga kemampuan intelektual ini menjadi lokomotif mobilitas sosial, ekonomis. Sebab, dalam kehidupan nyata, kekuatan intelektual ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari kekuatan sosial. Akibat dari faktor keterpelajaran, keterdidikan atau intelektualitas ini, citra pendidikan dalam masyarakat kita selalu berada pada lingkaran persoalan konseptual berupa: (1) perbenturan modern dan tradisional, (2) masalah Barat dan Timur, (3) ketegangan antara kaya dan miskin, dan (4) ketegangan dan upaya memperoleh ruang publik dan otonomi (Nurdina, dkk, 2008 : 13).

Oleh karena itu, menurut Bahar (1989: 37) ada beberapa hal hubungan antara sekolah (pendidikan) dengan mobilitas sosial yaitu:

(1) Kesempatan pendidikan.

Kesempatan pendidikan ini banyak ditentukan oleh faktor-faktor tertentu antara lain kedudukan atau status sosial masyarakat.

(2) Mendapatkan pekerjaan.

Artinya kualifikasi pendidikan ada hubungannya dengan jenis pekerjaan, akan tetapi tidak semua orang yang berkualifikasi tinggi dalam pendidikan mendapatkan yang cocok dengan pekerjaannya. Jadi secara singkat hubungan dengan mobilitas sosial dipengaruhi kesempatan memperoleh pendidikan dan kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.

Pendidikan dalam kaitannya dengan mobilitas sosial harus mampu untuk mengubah *mainstream* peserta didik akan realitas sosialnya. Artinya pendidikan secara kritis mengajarkan kita dan berupaya memberi kesempatan yang sama bagi kelas-kelas sosial tertentu untuk memperoleh pendidikan. Maka fungsi pendidikan bukan lagi hanya sekedar usaha sadar yang berkelanjutan. Akan tetapi pendidikan merupakan sebuah alat untuk melakukan perubahan di masyarakat dalam bentuk mobilitas sosial (Ari Perdana, 2009: 66).

Penjabaran mengenai pendidikan sebagai proses stratifikasi dan saluran mobilitas di atas, secara general dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berfungsi untuk menyiapkan peserta didik (seseorang) untuk beradaptasi dalam konteks sosial, maka akan membawa pada stratifikasi dan mobilitas sosial di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan kedudukan yang berbeda-beda mengenai manusia yang merangkaikan suatu sistem sosial yang ada dan perlakuannya sebagai hubungan orang atasan (*superior*) dan orang bawahan (*inferior*) satu sama lain dalam hal-hal tertentu oleh masyarakat dianggap penting. Sementara itu, mobilitas sosial merupakan gerak atau perpindahan dalam struktur sosial, baik bersifat horizontal (fisik) dan vertikal.

C. Benang Merah Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilisasi.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya lapisan dalam masyarakat atau yang sering disebut dengan stratifikasi

Bab IV Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilisasi

sosial. Keadaan masyarakat yang majemuk memungkinkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat karena faktor-faktor tertentu. Sistem lapisan sosial dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya atau sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Kriteria yang dipakai untuk menggolongkan orang dalam pelapisan sosial dilihat dari ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dilihat dari ukuran itu, dapat disimpulkan bahwa pelapisan sosial dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti adanya perbedaan gaya hidup dan perlakuan dari masyarakat terhadap orang-orang yang menduduki pelapisan tertentu.

Adanya penghargaan terhadap pendidikan maka adanya harapan peningkatan pendidikan terhadap peningkatan status seseorang. Maka dari itu pendidikan merupakan salah satu dasar stratifikasi sosial. Hal ini terjadi karena dalam stratifikasi sosial merupakan gejala sosial yang tidak dapat dihindari dan terdapat di setiap masyarakat. Pandangan mengenai pendidikan, dorongan, cita-cita dan hal yang lain bertalian dengan pendidikan, diwarnai stratifikasi sosial. Masyarakat yang menganut system sosial terbuka memiliki kesempatan luas untuk berusaha naik ketangga sosial yang lebih tinggi.

Pendidikan dalam kaitannya dengan mobilitas sosial harus mampu untuk mengubah *mainstream* peserta didik akan realitas sosialnya. Artinya pendidikan secara kritis mengajarkan kita dan berupaya memberi kesempatan yang sama bagi kelas-kelas sosial tertentu untuk memperoleh pendidikan.

Sosiologi Pendidikan

Oleh karena itu, pendidikan merupakan bagian dari saluran atau upaya dalam proses stratifikasi dan saluran mobilitas. Artinya pendidikan yang berfungsi untuk menyiapkan peserta didik (seseorang) untuk beradaptasi dalam konteks sosial akan membawa pada stratifikasi dan mobilitas sosial di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan kedudukan yang berbeda-beda mengenai manusia yang merangkaikan suatu sistem sosial yang ada dan perlakuannya sebagai hubungan orang atasan (*superior*) dan orang bawahan (*inferior*) satu sama lain dalam hal-hal tertentu oleh masyarakat dianggap penting. Sementara itu, mobilitas sosial merupakan gerak atau perpindahan dalam struktur sosial, baik bersifat horizontal (fisik) dan vertikal.

Secara analisa tingkat pendidikan tertinggi yang didapatkan seseorang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya di dalam masyarakat. Orang yang berkedudukan tinggi, bergelar akademis, yang mempunyai penempatan besar tinggal di rumah elite dan merasa termasuk golongan atas akan mengusahakan anaknya masuk universitas dan memperoleh gelar akademis. Sebaliknya anak yang orangtuanya buta huruf mencari nafkahnya dengan menjadi pemulung, kerja serabutan, kuli panggul, kuli bangunan, tukang becak tidak dapat diharapkan akan mengusahakan anaknya menikmati perguruan tinggi.

**D. Fenomenologi tentang Pendidikan sebagai Saluran
Stratifikasi dan Mobilitas Sosial.**

**Wahyudin 'Pemulung Ganteng' Kini Menatap Gelar Doktor di
Luar Negeri**



Jakarta - Hari cerah itu Wahyudin (24) tersenyum bangga bercerita akan perubahan yang dialaminya. Sebuah capaian yang mungkin siapa pun tak akan menyangka, tetapi terbukti benar adanya. Dua tahun lalu Wahyu masih ditemui memanggul karung berisi kardus-kardus bekas yang siap dijual per kilogramnya. Sebuah profesi yang dia lakoni sejak usia 10 tahun dan duduk di bangku kelas IV Sekolah Dasar, pemulung.

Tak seperti kebanyakan anak yang barang tentu didukung orang tua untuk sekolah, Wahyu harus pikir berkali-kali untuk minta restu kedua orang tuanya untuk meneruskan jenjang SD. Saudara-saudaranya bahkan harus putus sekolah dan membantu ayahnya bekerja untuk sekedar mengisi piring.

"Saya waktu kecil SD itu mikir, 'aduh habis deh nih, kalau kakak-kakak enggak sekolah berarti saya enggak sekolah dong? Karena kan satu sumber keuangannya'. (Tapi) saya enggak mau

terima nasib, saya harus keluar dari rantai kemiskinan," ungkap Wahyu saat kembali berbagi cerita di Kantor Redaksi detikcom, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2015).

Wahyu adalah anak sulung dari tiga bersaudara dan ibunya adalah istri kedua dari ayahnya. Dari pernikahan dengan istri pertama, ayahnya memiliki lima orang anak.

Ayahnya bekerja sebagai buruh tani yang juga melayani jasa ojek. Ibunya pun bertani dengan menggarap tanah orang yang hasilnya hanya cukup untuk makan, bukan untuk sekolah. "Saya putus jalan ke tetangga untuk mulung. SD kebutuhan makin besar saya tambah mulung dan gembala kambing, udah SMP tambah jualan gorengan, SMA tambah mulung, gembala kambing, mengajar les disambi on air jadi penyiar, jualan susu murni, dagang asongan di pinggir rel, semua ada 7 profesi di luar sekolah," papar Wahyu penuh semangat.

Memikul 7 profesi itu pun tak lantas membuat prestasinya mengendur. Peringkat di kelas tetap dia sabet hingga akhirnya mendapat jalan untuk berkuliah. "Sekolah tetap dapat ranking, di S1 juga IPK saya 3,85," ujar dia.

Wahyu menempuh jenjang sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka). Dia diwisuda pada tahun 2013 dan masih berprofesi sebagai pemulung.

"Saya lulus dari Uhamka 2013 akhir, di situ saya memang sebelum lulus udah dapet beasiswa S2 duluan karena waktu itu diwawancara detikcom bulan Maret, belum lulus. Dari saya pribadi setelah muncul di detikcom itu saya banyak dikenal orang

Bab IV Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilisasi

dan dari Kemendikbud datang ke rumah saya. Salah satu stafnya bilang, saya dapat beasiswa unggulan walau tanpa tes. Saya boleh kuliah di luar negeri, bebas pilih negara mana saja," tutur pemuda itu.

Waktu yang ada di angan Wahyu hanya satu hal, luar negeri pertama yang ingin dia injak adalah kota Mekah di Arab Saudi untuk beribadah. Selain itu dia tak mau dan akhirnya memutuskan untuk ambil beasiswa di dalam negeri saja.

Berkonsultasilah Wahyu kepada pihak kementerian dan itu dikabulkan. Program Magister of Business Administration (MBA) ITB kampus Jakarta dia tunjuk sebagai kelanjutan dari langkahnya, namun harus melalui tes.

"Waktu saya mau ke ITB ada tes bahasa Inggris dan matematika nilainya 7,8. Toefl-nya harus 475 kalau tidak salah. Saya belum pernah tes karena orang tua sederhana, enggak pernah kursus bahasa Inggris sama sekali tiba-tiba mau S2 pelajarannya full English," kata dia.

Tapi tak ada halangan yang tak bisa dilalui, pikir dia. Mulailah Wahyu belajar bahasa Inggris di dapur dan ditemani oleh temannya yang bernama Rizky Yusuf.

Awalnya dia hanya belajar tulisan saja, sementara di perkuliahan dia butuh untuk lancar berkomunikasi. Kursus English Conversation? Mahal!

Akhirnya ketika sedang ke Pasar Jatinegara, Jakarta Timur dia melihat ada orang asing sedang berjalan-jalan dan dipandu seorang tour guide perempuan. Dia tinggalkan dulu karung

memulung dan dagangan lainnya untuk 'merayu' sang tour guide agar bisa menggantikan.

"Saya bilang sama Mbak tour guide-nya kalau saya mau kuliah, saya pemulung, saya enggak punya uang buat kursus jadi saya mau jadi tour guide biar praktik langsung buat tes wawancara. Sambil becek-becek nyeker (tak beralas kaki, -red) saya keliling-keliling dan jelaskan tentang Jatinegara," kenang Wahyu.

"Bagaimana, Mister? Bahasa Inggris saya jelas enggak?" tanya dia waktu itu dan dijawab, "Oh iya, jelas," dalam bahasa Inggris pula.

Rasa percaya diri sedikit meningkat saat itu, tetapi Wahyu masih belum puas. Sedikit berdandan rapi, Wahyu pun memberanikan diri untuk menginjakkan kaki ke Pondok Indah Mall dan ke arena ice skating di Mall Taman Anggrek. Sekedar untuk bertemu bule.

Akhirnya dengan modal berbincamg dengan 3 orang asing, Wahyu lolos tes. Sukseslah dia menyangang status sebagai mahasiswa magister ITB.

Sejak kecil dia mengumpulkan uang untuk sekolah, dan kini dia sudah merengkuh magister. Semua itu berawal dari semangat dan karung yang selalu dipikul saat memulung.

"Ketika S2 ini pun prosesnya hampir sama, saya menyamar, saya sembunyikan identitas pemulung saya. Saya pakai baju bagus dibeliin kakak angkat saya, kak Muhammad Habsyi. Pas semester 2 baru mereka tahu saya pemulung dan mereka semua pada kaget," tutur Wahyu.

Bab IV Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilisasi

"Saya terbiasa dari kecil itu walau pun saya miskin, saya gembel, saya enggak mau orang-orang itu ngerendahin saya. Saya selalu menyembunyikan identitas saya, kalau saya sedih saya simpan sendiri kalau bahagia saya share ke orang-orang," ungkap dia melanjutkan.

Berceritalah dia bagaimana dahulu selalu menyembunyikan kartu tagihan SPP hingga S1 dari orang tua kandungnya. Disembunyikannya kartu itu di bawah bantal agar ibunya tak tahu bahwa biaya kuliah per semester adalah Rp 5.250.000.

"Kalau kartu bayaran itu enggak boleh kasih tahu orang tua, harus taruh di bawah bantal sendiri, bayaran saya harus pusing sendiri, nangis sendiri, laporan ke guru BP izin setiap semester itu sudah biasa waktu kuliah di Uhamka. Tapi kalau saya dapat ranking, juara, terpilih jadi pemuda pelopor kota Bekasi itu saya share saya kasih tau Emak. 'Saya ranking loh, saya dapat juara ini loh Mak'," kata pemuda tersebut.

Ya, buah dari niat membahagiakan orang tua itu pun amat manis dikecapnya. Kini Wahyu hampir menyelesaikan jenjang magister di ITB.

Masih ingat dia ketika dahulu harus memulung mulai pukul 01.00 WIB sampai waktu subuh. Usai mandi dan berpakaian seragam, dia berjualan gorengan dan dititipkan di pos satpam.

Sepulang sekolah setelah istirahat sebentar dia kembali memulung hingga pukul 22.00 atau 23.00 WIB. Tak jarang Wahyu tidur hanya 2-3 jam di tumpukan karung hasil memulung.

"Setiap ke sekolah saya bawa balsam atau minyak kayu putih. Saya oleskan dekat mata supaya panas dan tidak

mengantuk. Saya tidak mau ketinggalan pelajaran hanya karena tertidur. Saksinya adalah teman-teman SMA dan kebiasaan itu terus sampai saya kuliah S1," tutur Wahyu.

Di akhir 2013 bisa dibilang karier sebagai pemulung hampir berakhir. Dia mendapat modal dari seorang WNI di Australia sebesar Rp 4 juta yang kemudian dipakai untuk merintis usaha ternak entok (sejenis itik, -red).

"Setelah S2 saya mau ambil S3 gelar PhD ke luar negeri," ucap Wahyu sambil menyunggingkan senyumnya. **(bpn/van)**

Sumber: <http://news.detik.com>

E. Uji Kompetensi

Pengayaan pokok bahasan pendidikan sebagai saluran stratifikasi dan mobilisasi, adalah sebagai berikut.

1. Ukuran pendidikan atau ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktorandus, doktor ataupun gelar profesional seperti profesor. Jika berbicara ilmu pengetahuan atau pendidikan tersebut, bagaimana menurut pendapat Saudara mengenai orang miskin dilarang sekolah?

Bab IV Pendidikan sebagai Saluran Stratifikasi dan Mobilisasi

2. Mobilitas sosial merupakan gerak atau perpindahan dalam struktur sosial, baik bersifat horizontal (fisik) dan vertikal. Secara analisa tingkat pendidikan tertinggi yang didapatkan seseorang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya di dalam masyarakat. Orang yang berkedudukan tinggi, bergelar akademis, yang mempunyai penempatan besar tinggal dirumah elite dan merasa termasuk golongan atas akan mengusahakan anaknya masuk universitas dan memperoleh gelar akademis. Sebaliknya anak yang orangtuanya buta huruf mencari nafkahnya dengan menjadi pemulung dan kerja serabutan. Jelaskan asumsi Saudara mengenai pendidikan yang merupakan saluran (jembatan) untuk pindah status (mobilitas) jika dikaitkan dengan istilah nasib?

BAB V PENDIDIKAN DAN EKONOMI

Kompetensi Dasar:

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Memahami pendidikan sebagai investasi Sumber Daya Manusia.
2. Mengidentifikasi fungsi laten pendidikan dan kenyataan.
3. Menyebutkan contoh fenomena hubungan pendidikan dan ekonomi.
4. Memaknai hubungan pendidikan dan ekonomi secara sosiologi secara garis besar.
5. Menjawab soal latihan mengenai hubungan pendidikan dengan ekonomi.

A. Pendidikan sebagai Investasi Sumber Daya Manusia (SDM)

M elihat kenyataan yang ada di negara Indonesia tercermin pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 amanatkan tentang besarnya anggaran pendidikan di berbagai level pemerintahan minimal 20%. Disisi lain juga dihasilkan data dari lapangan bahwa partisipasi pendidikan menurut data Susenas 2004, APS penduduk usia 7 s/d 12 tahun meningkat dari 92,83% pada 1993 menjadi 96,775

pada 2004. Dalam rentang waktu yang sama APS penduduk usia 13–15 tahun meningkat dari 68,74% menjadi 83,49%. Sedangkan APS penduduk usia 16–18 tahun meningkat dari 40,23% menjadi 53,48%. Data tersebut menunjukkan adanya masalah kesenjangan partisipasi pendidikan, sehingga pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran pendidikan agar masyarakat lebih banyak lagi yang mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan (<http://zaifbio.wordpress.com>).

Sosiologi Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan sengaja dalam kehidupan manusia dan berlangsung sepanjang hayat. Seperti dalam tulisan Psacharopoulos, George and Maureen Woodhall (1985: 16-17) pendidikan sebagai kegiatan atau tindakan untuk mengerti, memahami (*learning to know*), dan melakukan (*learning to do*) apa yang dipelajarinya untuk hidup bermasyarakat (*learning to live together*) demi kemaslahatan bersama, dan akhirnya menjadi seseorang (*learning to be*).

Selanjutnya Psacharopoulos, George and Maureen Woodhall (1985: 20) menambahkan bahwa pendidikan sebagai bagian dari upaya negara untuk membangun bangsa agar menjadi cerdas dalam kehidupannya, mampu berpikir kreatif dan menghasilkan inovasi bagi kehidupan sebagai wujud pengabdian kepada Sang Pencipta. Salah satu hubungannya dengan ekonomi khususnya era globalisasi dijelaskan bahwa pendidikan seperti investasi human capital yang dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan khususnya pendapatan yang berekonomi lemah. Sehingga muncul perspektif adanya nilai ekonomisnya suatu pendidikan. Artinya bahwa untuk mengukur kontribusi pendidikan pada pertumbuhan ekonomi adalah sama saja dengan menguji konsep investasi SDM. Hal ini menjadi seperti hukum ekonomi yang tegak lurus, semakin tinggi pendidikan dengan harapan semakin tinggi tingkat perekonomian seseorang.

Oleh sebab itu, sebuah istilah mengatakan ada keyakinan bahwa seseorang yang memiliki bekal pendidikan formal akan cenderung menuai hasil berupa kesuksesan di bidang ekonomi. Melalui pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh

pengetahuan, dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik.

Menurut Udik Budi Wibowo (2011: 7) semakin tinggi derajat pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula derajat kehidupan ekonominya. Untuk menunjang pembangunan ekonomi, pendidikan memiliki dua peranan, yakni sebagai gejala penawaran dan gejala permintaan. Sebagai gejala penawaran atau produksi, pendidikan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan (kesejahteraan masyarakat). Sebagai gejala permintaan, pendidikan diperlukan untuk meningkatkan rata-rata pendidikan anggota masyarakat yang berarti pula dapat menambah jumlah konsumen potensial yang bersedia dan mampu mengkonsumsi produk-produk yang mengandung teknologi maju.

Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas tingkat perkenomian seseorang. Seperti dikemukakan di atas memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, maka implikasinya pendidikan juga memiliki hubungan positif dengan produktivitas atau pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu ada sebuah persepsi mengatakan bahwa dengan semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

Hubungan timbal balik tersebut merupakan investasi di bidang pendidikan secara nyata memberi kontribusi yang relatif berarti terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Psacharopoulos dan Woodhal (1997) menunjukkan kontribusi pendidikan, secara relatif terhadap pertumbuhan

ekonomi dengan tingkat variasi yang beragam. Di kawasan Amerika Utara, persentase kontribusi per tahun cukup tinggi, yakni 25,0 persen di Amerika Serikat dan 15 persen di Kanada. Sementara di kawasan Eropa yang tertinggi mencapai 14,0 persen di Belgia dan 12,0 persen di Inggris; namun ada juga yang amat kecil seperti di Jerman dan Yunani, masing-masing 2,0 persen dan 3,0 persen (Amich Alhumami, 2014).

Adapun di kawasan Amerika Latin, persentase tertinggi mencapai 16,5 persen di Argentina, 6,0 persen di Honduras, dan yang paling rendah yakni hanya 0,8 persen di Meksiko. Sedangkan di kawasan Asia, juga terbilang relatif tinggi yakni 15,9 persen di Korea Selatan, 14,7 di Malaysia, dan 10,5 persen di Filipina. Kecuali di Jepang yang hanya 3,3 persen. Demikian pula di kawasan Afrika seperti Ghana, Nigeria, dan Kenya, masing-masing 23,2 persen, 16,0 persen, dan 12,4 persen (Amich Alhumami, 2014).

Pendidikan dalam kaitannya dengan investasi Sumber Daya Manusia (*human capital*) merupakan input pembangunan ekonomi. Hal tersebut sudah dikaji oleh Adam Smith tahun 1776 dengan pemikiran bahwa penyebab kesejahteraan suatu negara berupa dua faktor, yaitu; 1) pentingnya skala ekonomi; dan 2) pembentukan keahlian dan kualitas manusia.

Menurut World Bank (1980) juga berpendapat serupa berupa anggapan adanya hubungan pendidikan dengan penyiapan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga yang siap bekerja. Namun demikian pada kenyataannya tingkat pengangguran di hampir seluruh negara bertambah sekitar 2 % setiap tahunnya.

Salah satu fungsi sekolah adalah mempersiapkan atau menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Namun disisi lain, sekolah tidak menjadi satu-satunya tempat dimana keterampilan seseorang dapat tercapai. Munculnya pengangguran tidak serta merta menyalahkan proses pendidikan. Disamping itu pendidikan juga tidak selalu harus menghasilkan lulusan dengan jenis pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, terdapat ukuran-ukuran tertentu dalam menimbang pertumbuhan ekonomi tanpa melibatkan sisi pendidikan (Boediono, 1997: 34), antara lain:

1. Pendapatan per-kapita.
2. Perubahan peta ketenagakerjaan dari pertanian ke industri.
3. Konsumsi energi atau pemakaian barang berteknologi tinggi seperti mobil, telepon, televisi Dengan demikian kriteria untuk menilai keberhasilan pembangunan:
4. Peningkatan dalam efisiensi sistem produksi masyarakat yang diukur dengan GDP dan GNP.
5. Kepuasan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,
6. Pencapaian tujuan-tujuan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat, yang dikaitkan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Pola keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan berbeda sesuai dengan karakteristik khas setiap negara.

B. Fungsi Laten Pendidikan, Ekonomi, dan Kenyataan.

Berbicara hubungan antara pendidikan dengan ekonomi, mengarahkan kita pada pembahasan apa itu fungsi utama dari institusi pendidikan. Institusi atau lembaga pendidikan seperti sudah dijelaskan di atas bahwa dalam kaitan dengan kehidupan

Sosiologi Pendidikan

ekonomi, fungsi satuan pendidikan adalah mempersiapkan generasi penerus untuk mengisi lapangan pekerjaan produktif.

Analisa yang ditunjukkan oleh Adiwikarta (1988: 43) memberikan asumsi bahwa antara pendidikan dengan ekonomi terdapat hubungan saling mempengaruhi, yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Keduanya saling mempengaruhi khususnya pada pola perilaku dan tatnan hidup masyarakat yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman.

Sehingga tidak heran dalam pandangan Adiwikarta (1988: 46-47) bahwa hubungan pendidikan dan ekonomi tersusun dalam suatu masa, yaitu masa sekarang dan masa lampau. Masa sekarang diasumsikan ekonomi modern dan masa lampau diasumsikan ekonomi tradisional. Berikut ini perbedaan dalam hubungan pendidikan dan ekonomi pada masa tradisional dan masa modern.

Tabel 5.1. Perbedaan Ekonomi tradisional dan modern dalam tripusat pendidikan.

Lingkungan Pendidikan	Ekonomi Tradisional	Ekonomi Modern
Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memegang peran utama dalam menyiapkan anak agar secepat mungkin mampu melaksanakan ekonomi orang dewasa (keterampilan, mental, nilai, sikap). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan pengasuhan dasar. ○ Menyerahkan pendidikan pada saat anak berusia tertentu kepada sekolah. ○ Mendorong, membantu, mengawasi anak pada sistem sekolah.
Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mempersiapkan golongan elite dengan kemampuan dasar (baca, tulis, hitung). ○ Fungsi selektif 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyaipkan ahli dalam berbagai bidang kehidupan ○ Fungsi Selektif. ○ Fungsi Alokatif.
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyediakan model untuk ditiru. ○ Menyelenggarakan latihan magang. ○ Menyelenggarakan upacara inisiasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyelenggarakan pendidikan orang dewasa secara terorganisir ○ Menyediakan media komunikasi. ○ Menyediakan arena kompetisi.

Ketiga lembaga penyelenggara pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat, masing-masing melakukan peran yang berlainan tetapi saling melengkapi. Fungsi tiap lembaga tersebut pada masyarakat yang masih tradisional tentu berbeda pula pada masyarakat yang telah maju, karena tuntutan masyarakat yang dilayaninya telah lain pula.

Pada masyarakat tradisional, keluarga memegang peranan utama dalam menyiapkan generasi muda untuk menjadi manusia mandiri. Orang tua dan orang dewasa lain dalam keluarga tradisional berfungsi mengasuh berbagai keterampilan dan berbagai tradisi. Pada masyarakat modern, keluarga menyerahkan sejumlah fungsinya dalam pendidikan kepada lembaga-lembaga lain yang khusus bertugas menangani tugas itu. Orang tua dan keluarga membatasi kegiatannya pada pengasuhan dasar dan kerjasama dengan sekolah dalam mendorong anak dan mengawasi pendidikan mereka.

Sementara itu, pada masyarakat modern, sekolah berperan mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus untuk menjawab tantangan spesialisasi yang semakin luas dan tajam. Sekolah menjadi terbuka untuk masyarakat luas. Prinsip "*equal opportunity*" dalam pendidikan merupakan kenyataan, meskipun masih mengandung banyak persoalan yang hangat. Sekolah yang elitis berubah menjadi "populis" melalui program wajib belajar. Dengan sendirinya materi pengajaran dan metode mengajar yang diselenggarakan pada masyarakat modern akan berlainan dengan yang diselenggarakan pada masyarakat dengan sistem ekonomi

tradisional. Dalam pada itu, fungsi selektif dan alokatifnya pun tentu memiliki perbedaan-perbedaan pula. Sekolah bersama keluarga berperan menyiapkan anak dan pemuda untuk memangku jabatan dan lapangan kerja yang bervariasi.

Selain itu, dalam pendapat Boediono (1997: 67-71) hubungan antara pendidikan dengan ekonomi dituliskan bahwa pendidikan dianggap memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Lewat pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Ini adalah anggapan umum, yang secara teoretis akan diuraikan lebih detail. Ditekankan bahwa dalam ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan. Dengan demikian, orang berpendidikan rendah tetapi mendapat pelatihan (yang memakan periode jauh lebih pendek dan sifatnya nonformal) akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggi dan formal. Teori persaingan status ini memperlakukan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial yang salah satu fungsinya mengalokasikan personil secara sosial menurut strata pendidikan.

Keinginan mencapai status lebih tinggi menggiring orang untuk mengambil pendidikan lebih tinggi.

Meskipun orang-orang berpendidikan tinggi memiliki proporsi lebih tinggi dalam pendapatan nasional, tetapi peningkatan proporsi orang yang berpendidikan lebih tinggi dalam suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan ekspansi ataupun pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan kelas atau strata sosial berargumen bahwa fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan struktur kelas dan ketidakseimbangan sosial. Pendidikan pada kelompok elit lebih menekankan studi-studi tentang hal-hal klasik, kemanusiaan dan pengetahuan lain yang tidak relevan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pendidikan adalah satu cara di mana individu meningkatkan modal manusianya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan stok modal manusianya semakin tinggi.

Oleh karena modal manusia, seperti dikemukakan di atas memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, maka implikasinya pendidikan juga memiliki hubungan positif dengan produktivitas atau pertumbuhan ekonomi. Secara implisit, pendidikan menyumbang pada penggalan pengetahuan. Ini sebetulnya tidak hanya diperoleh dari pendidikan tetapi juga lewat penelitian dan pengembangan ide-ide, karena pada hakikatnya, pengetahuan yang sama sekali tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia akan mubazir (www.kompasiana.com).

Robert K Merton (Miffen, 1986) menyatakan bahwa, setiap lembaga sosial tidak sekadar memelihara sebuah tujuan dan

fungsi yang manifes, yakni sebuah fungsi yang mencerminkan kegunaan dari terbentuknya sebuah pranata. Namun karena realitas sosial semenjak ilmu pengetahuan telah menguasai iklim kehidupan manusia bukanlah sebuah *kredo monolog* yang tugasnya meminimalisasi perubahan-perubahan. Justru realitas itu kini lebih bersifat acak, dinamis, dan membias keseluruhan segi maka fungsi latenlah yang mengambil alih pola gerak maupun hubungan lintas lembaga sosial.

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Bisa dilihat dari data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia di Indonesia semakin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia (<http://zaifbio.wordpress.com>).

Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara

Sosiologi Pendidikan

lain: Meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia yang dapat dilihat dari angka partisipasi. Menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti di kota dan di desa. Meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional. Pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan sekolah-sekolah. Pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan. Pemerintah telah melaksanakan kewajibannya terhadap rakyatnya dengan menyelenggarakan pendidikan, apalagi dengan adanya dogma “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Pendidikan model pemerintah yang ditawarkan kepada rakyat melalui lembaga-lembaga pendidikan, sudah memberikan kontribusi banyak terhadap bangsa, mulai dari jenjang paling bawah sampai paling tinggi. Anggaran pendidikan pun menjadi fokus utama usaha pemerintah dalam penataan anggaran belanja negara, kualitas guru ditingkatkan, dan dilakukannya pembenahan-pembenahan lain agar pendidikan di Indonesia dapat membuahkan hasil yang diharapkan (<http://zaifbio.wordpress.com>).

Peningkatan alokasi anggaran ini terutama dimaksudkan untuk mencapai dua sasaran utama, yakni (1) peningkatan mutu, dan (2) pemerataan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan berkaitan dengan ketersediaan sarana yang baik, fasilitas laboratorium, peralatan, perpustakaan, serta buku yang memadai, dan yang amat vital adalah ketersediaan tenaga pengajar (guru) yang berkualitas. Sedangkan pemerataan pendidikan bertujuan untuk memperluas akses, agar seluruh masyarakat dapat memperoleh kesempatan pendidikan. Pemerataan pendidikan berkaitan dengan ketersediaan prasarana (gedung sekolah, ruang kelas/belajar) yang mencukupi. Dalam hal ini, program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun merupakan upaya untuk melakukan pemerataan dan memperluas akses pendidikan tersebut (Amich Alhumami, 2014).

C. Benang Merah Hubungan Pendidikan dan Ekonomi.

Hubungannya dengan ekonomi khususnya era globalisasi dijelaskan bahwa pendidikan seperti investasi human capital yang dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan khususnya pendapatan yang berekonomi lemah. mengatakan ada keyakinan bahwa seseorang yang memiliki bekal pendidikan formal akan cenderung menuai hasil berupa kesuksesan di bidang ekonomi. Melalui pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik.

Maka dari itu, semakin tinggi derajat pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula derajat kehidupan ekonominya. antara pendidikan dengan ekonomi terdapat hubungan saling mempengaruhi, yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Keduanya saling mempengaruhi khususnya pada pola perilaku dan tatnan hidup masyarakat yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman.

D. Fenomenologi Hubungan Pendidikan dengan Ekonomi.

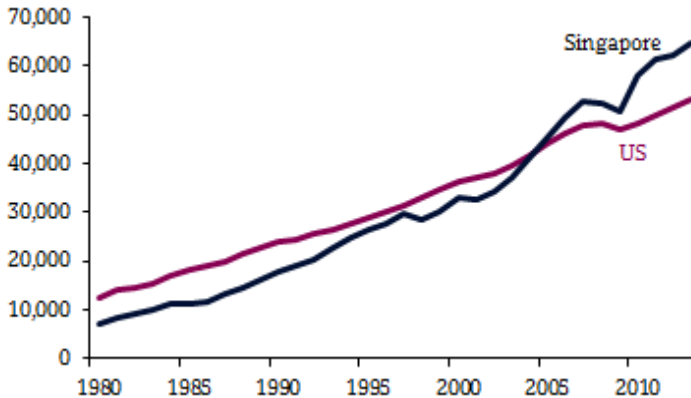
Pelajaran dalam Pembangunan Ekonomi dari Singapura

Singapura adalah cerita pertumbuhan yang luar biasa. Kembali pada tahun 1960, itu adalah salah satu negara termiskin di Asia. Sejak saat itu, telah mengubah dirinya menjadi salah satu dari sebagian besar negara maju, dengan tertinggi GDP per kapita ketiga di dunia setelah Qatar dan Luxemburg. Singapura pergi melalui beberapa tahap dalam perkembangan menakjubkan ini. Ini awalnya dimulai dengan industrialisasi dasar, kemudian pindah ke industri yang lebih canggih sebelum berkembang sebagai pusat regional untuk perdagangan dan jasa keuangan. Fase terbaru dari perkembangan adalah membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Perkembangan yang luar biasa di Singapura memberikan pelajaran yang berguna bagi negara-negara GCC, yang berusaha untuk diversifikasi ekonomi mereka jauh dari minyak ke model yang lebih berkelanjutan pertumbuhan dan perkembangan.

Bab V Pendidikan dan Ekonomi

Pada tahun 1960, Singapura adalah koloni Inggris yang ekonominya terutama menjabat sebagai pos perdagangan regional. Pangkalan militer Inggris menyumbang hampir seperlima dari PDB nominal dan populasi setidaknya 75% tidak memiliki pendidikan dasar. Sejak itu, perekonomian telah berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Antara 1966 dan 2013, PDB riil per kapita tumbuh lima belas kali lipat, tiga kali lebih cepat pertumbuhannya di Amerika Serikat. Transformasi dramatis terjadi dalam fase yang berbeda, hampir menyusul buku teks ekonomi. Perekonomian tumbuh baik karena peningkatan input (tenaga kerja, modal atau sumber daya alam) atau karena masukan mereka menjadi lebih produktif. Dalam kasus Singapura, sebagian besar pertumbuhan awal berasal dari peningkatan pesat dalam tenaga kerja dan modal. Baru-baru ini, bagaimanapun, sebagian besar kisah pertumbuhan Singapura telah datang dari peningkatan produktivitas lebih sebagai ekonomi telah menjadi lebih berbasis pengetahuan.

PDB per Kapita di AS dan Singapura
(USD, PPP)



Sumber: Dana Moneter Internasional dan analisis QNB Grup

Tahap pertama pembangunan Singapura melibatkan mobilisasi besar masukan untuk mengubah perekonomian menjadi basis manufaktur yang dipimpin ekspor. Hal ini didorong oleh kebijakan industri pemerintah sengaja dibiayai oleh tabungan dan arus masuk investasi asing nasional. Akibatnya, investasi sebagai bagian dari output naik dari kurang dari 10% di tahun 1960 menjadi lebih dari 40% pada pertengahan 1980-an, yang menyebabkan akumulasi besar modal dan tenaga kerja terampil. Selain itu, Singapura memperluas kolam tenaga kerja melalui imigrasi dan partisipasi yang lebih tinggi dari penduduk dalam angkatan kerja.

Dengan demikian, Singapura memanjat rantai nilai tambah, bergerak dari industri dasar seperti tekstil, pakaian dan

plastik untuk yang canggih seperti elektronik, kimia, rekayasa presisi dan ilmu biomedis. Selain itu, perkembangan ini pergi tangan-di-tangan dengan peningkatan besar dalam layanan, khususnya perbankan. Namun, model pembangunan berbasis hanya pada perluasan input akhirnya hits dinding sebagai pengembalian marginal untuk input yang menurun dan populasi menjadi bekerja penuh.

Mengingat sehingga batas-batas model pembangunan sebelumnya, Singapura harus pindah ke tahap baru pembangunan yang mengandalkan keuntungan produktivitas dari input yang ada daripada ekspansi mereka. Untuk melakukannya, Singapura mengadopsi dua strategi. Yang pertama bergantung pada impor kemajuan teknologi global terbaru untuk meningkatkan produktivitas modal dan tenaga kerja dengan mendorong investasi asing langsung dan mempekerjakan bakat asing sebagai sarana transfer pengetahuan. Yang kedua terletak pada penyediaan hukum, pemerintahan dan lingkungan intelektual hak untuk tumbuh dan memelihara bakat yang diperoleh dalam rangka untuk berinovasi dan menciptakan kemajuan teknologi baru. Dalam hal ini, Singapura menempati urutan pertama dalam rezim insentif ekonomi untuk ekonomi berbasis pengetahuan dan keempat di dunia dalam hal inovasi di Index Bank Dunia Knowledge Economy. Bank Dunia juga menempatkan Singapura pertama di dunia dalam Surat Melakukan Laporan Bisnis.

Qatar bisa menarik pelajaran berharga dari pengalaman Singapura dalam pelaksanaan Qatar National Visi 2030. Keduanya adalah negara-negara kecil dengan perekonomian terbuka ke

seluruh dunia. Meskipun Qatar diberkati dengan sumber daya yang jauh lebih alami daripada Singapura, produksi di sektor hidrokarbon yang telah plateaued dan ekonomi sedang mengalami fase diversifikasi.

Tahap diversifikasi ditandai dengan ekspansi yang cepat dalam pengeluaran investasi ke dalam infrastruktur dan industri yang mengarah ke build-up besar dalam modal fisik seperti jalan, mesin dan bangunan. Hal ini disertai dengan peningkatan pesat dalam tenaga kerja terampil melalui imigrasi. Hal ini mirip di alam untuk tahap pertama pertumbuhan yang cepat Singapura. Namun, seperti negara-negara lain, proses perluasan input produksi pada akhirnya ajalnya, membutuhkan sebuah model baru pembangunan sejalan dengan Visi Nasional Qatar 2030. Faktor kunci dalam mengubah model pertumbuhan akan kemampuan Qatar untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia dalam cara yang sama seperti Singapura melakukannya hari ini.

Dalam jangka panjang, pertumbuhan ini terutama disebabkan peningkatan pengetahuan dan peningkatan produktivitas. Pengalaman menunjukkan bahwa Singapura menawarkan pendidikan yang sangat baik, menarik pekerja berkualitas tinggi dan menciptakan lingkungan yang tepat dan infrastruktur untuk berinovasi dan maju adalah kondisi yang diperlukan untuk menciptakan tingkat tinggi secara berkelanjutan dari pertumbuhan ekonomi. Qatar National Visi 2030 menetapkan roadmap untuk tahap ini perkembangan baru.

Sumber: <http://qnb.co.id/lang/id/newsroom/?id=474>

E. Uji Kompetensi

Sebagai tindak lanjut mempelajari pokok bahasan hubungan antara pendidikan dengan masyarakat, materi pengayaan disajikan dalam bentuk pertanyaan di bawah ini.

1. Ada keyakinan bahwa seseorang yang memiliki bekal pendidikan formal akan cenderung menuai hasil berupa kesuksesan di bidang ekonomi. Melalui pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik. Jelaskan argumen Saudara jika dikaitkan dengan fenomena pada pendidikan dan ekonomi di Indonesia saat ini!
2. Jelaskan hubungan pendidikan dan ekonomi dikaitkan dengan masa tradisional dan masa modern !
3. Antara pendidikan dengan ekonomi terdapat hubungan saling mempengaruhi yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Keduanya saling mempengaruhi khususnya pada pola perilaku dan tatnan hidup masyarakat yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Berikan tanggapan Saudara mengenai masa depan pendidikan dan ekonomi di Indonesia?

BAB VI PENDIDIKAN DAN MODERNISASI

Kompetensi Dasar:

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Memahami konsep modernisasi.
2. Menjabarkan hubungan pendidikan dan modernisasi.
3. Memaknai hubungan pendidikan dan modernisasi secara garis besar.
4. Memahami fenomena kasus hubungan pendidikan dengan modernisasi.
5. Menjawab soal latihan mengenai analisis hubungan pendidikan dan modernisasi.

A. Konsep Modernisasi

Secara sadar kita ketahui bahwa pendidikan selalu mengalami dinamika mengikuti perkembangan zaman, maka dari itu perlu adanya persiapan yang lebih intens terhadap Sumber Daya Manusia (SDM). Kebutuhan kualitas SDM menjadi suatu yang pokok bagi kemajuan suatu wilayah. Kemajuan wilayah ataupun masyarakat senantiasa diikuti adanya dinamisnya zaman khususnya era globalisasi dan modernisasi. Modernisasi

adalah wujud dari suatu kondisi masyarakat yang melaju dengan pesat dan cepat sesuai dengan semakin modern (canggih) nya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Adanya kemajuan yang melaju begitu cepat terdapat ketakutan tersendiri pada diri manusia jika suatu saat akan terbawa arus.

Kata modern digunakan untuk menunjukkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dalam arti lebih menyenangkan, lebih meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan

cara baru (modern) sesuatu akan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Misalnya dalam perkembangan transportasi, karena kuda lebih modern daripada gerobak yang ditarik orang, tetapi mobil lebih modern daripada kereta kuda, pesawat lebih modern daripada mobil. Jadi “modern” dari satu segi dapat diartikan sesuatu yang baru dalam arti lebih maju atau lebih baik daripada yang sudah ada. Baik dalam arti lebih memberikan kesejahteraan atau kesenangan bagi kehidupan (Yasmadi, 2002: 16).

Menurut Hasan Nasution, kata “*modern*”, “*modernisme*” dan “*modernisasi*” mengandung arti pikiran, aliran gerakan dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan lain sebagainya agar menjadi sesuai dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Harun Nasution, 1991: 181).

Selain itu, arti modernisasi juga dituliskan oleh beberapa tokoh seperti berikut ini. Dalam argumen Everett Rogers menyatakan bahwa modernisasi adalah proses individu yang berubah dari cara hidup tradisional dengan gaya yang lebih kompleks, berteknologi maju, dan cepat berubah dari kehidupan. Hal serupa dituliskan oleh Lerner, secara definisi bahwa modernisasi merupakan suatu hanya arah tertentu pada trend dari tradisional ke cara hidup lebih baik (Syaefudin Sa’ud, 2009: 15).

Penggambaran modernisasi menurut Belling dan Totten (1985: 23) melakukan pembedaan antara masyarakat modern dengan masyarakat tradisional (sederhana). Berikut ini pembedaan kedua masyarakat tersebut.

Tabel 6.1 Perbedaan Masyarakat Modern dan Tradisional

No	Masyarakat Modern	Masyarakat Sederhana/Tradisional
1.	Masyarakat modern industri kompleks, terspesialisasi dan rapat penduduknya dan banyak inforamsi yang terkumpul.	Masyarakat sederhana sangat homogen; sebagian besar anggota-anggotanya memiliki pengetahuan dan perhatian yang sama dan biasa dengan pemikiran, sikap-sikap dan aktivitas dari seluruh anggota masyarakat
2.	Masyarakat modern unit keluarga yang tipikal adalah keluarga batin, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak.	Masyarakat sederhana unit keluarganya adalah keluarga luas, atau kelompok kekerabatan yang terdiri dari generasi yang diikat bersama melalui garis laki-laki
3.	Masyarakat modern meyakini akan kemajuan dan bersifat terbuka,ia berpendapat bahwa kondisi kemanusiaan,fisik dan spritual dapat diperbaiki.	Masyarakat sederhana semuanya itu tidak bisa dirobah, manusia dan lingkungannya membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dibagi.
4..	Masyarakat modern mesti harus terus menerus menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru untuk menggerakkan roda ekonomi.	Sederhana dalam memenuhi kebutuhannya relatif tetap dan dikenal semua

Sosiologi Pendidikan

Persepsi modernisasi dari Lucian W. Pye (Aqiel Siradj, 1999: 34) mengemukakan bahwa modernisasi adalah budaya dunia. Menurutnya, proses kebudayaan modern didasarkan berupa :

1. Teknologi yang maju dan semangat dunia ilmiah.
2. Pandangan hidup yang rasional.
3. Pendekatan sekuler dalam hubungan-hubungan sosial.
4. Rasa keadilan sosial dalam masalah-masalah umum, terutama dalam bidang politik.
5. Menerima keyakinan bahwa unit utama politik mesti berupa negara-kebangsaan.

Dari beberapa definisi atau pendapat tentang modernisasi yang dikemukakan oleh para tokoh di atas dapat kita garis bawahi bahwa modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional (belum modern) ke masyarakat yang lebih maju (sudah modern) yang ditandai dengan perubahan cepat dan canggih menuju kearah kemajuan ilmiah, ekonomi, politik, kebangsaan, sosial, teknologi, pola pikir rasional.

Selanjutnya dalam pendapat Alex Inkeles dan David H. Smith mengemukakan ciri-ciri manusia modern ada 11 aspek, yaitu:

- a. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru
- b. Selalu siap menghadapi perubahan sosial
- c. Berpandangan yang luas
- d. Mempunyai dorongan ingin tahu yang kuat
- e. Manusia modern lebih berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang daripada masa yang lampau.
- f. Manusia modern berorientasi dan juga percaya pada perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek

Bab VI Pendidikan dan Modernisasi

- g. Manusia modern lebih percaya pada hasil perhitungan manusia dan pemikiran manusia daripada takdir atau pembawaan.
- h. Manusia modern menghargai keterampilan teknik dan juga menggunakannya sebagai dasar pemberian imbalan.
- i. Manusia modern memiliki wawasan yang lebih maju tentang pendidikan dan pekerjaan.
- j. Manusia modern menyadari dan menghargai kemuliaan orang lain terutama orang yang lemah seperti wanita, anak-anak, dan bawahannya.
- k. Manusia modern dalam mengambil keputusan akan mempertimbangkan juga sejauh mana dampak terhadap hasil produksi dari suatu industri (Syaefudin Sa'ud, 2009: 15).

Black dalam Manan (1989: 56) menjabarkan proses modernisasi mengandung lima ciri pokok, antara lain: **Pertama**, modernisasi merupakan proses bertahap, dari tatanan hidup yang primitif-sederhana menuju kepada tatanan yang lebih maju dan kompleks. **Kedua**, modernisasi sebagai proses homogenisasi. Modernisasi membentuk struktur dan kecenderungan yang serupa pada banyak masyarakat. Penyebab utama proses homogenisasi ini adalah perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. **Ketiga**, modernisasi merupakan proses yang tidak bergerak mundur, tidak dapat dihindarkan dan tidak dapat dihentikan. **Keempat** modernisasi adalah proses progresif (ke arah kemajuan), meskipun tidak dapat dihindari adanya dampak (samping). **Kelima**, modernisasi sebagai proses evolusioner, bukan revolusioner; hanya waktu dan sejarah yang

dapat mencatat seluruh proses, hasil maupun akibat-akibat serta dampaknya.

Ketidakeimbangan berupa dampak ataupun akibat modernisasi dalam kehidupan masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua dampak, yaitu dampak positif dan negatifnya dari tindakan modernisasi itu sendiri. Berikut ini dampak positif dan negatif adanya modernisasi menurut Schoorl, J.W (1982: 45-48).

Pertama, Dampak Positif Modernisasi.

- 1) Perubahan Tata Nilai dan Sikap artinya bahwa adanya modernisasi dalam zaman sekarang ini bisa dilihat dari cara berpikir masyarakat yang irasional menjadi rasional.
- 2) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi artinya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pula yang membentuk masa modernisasi yang terus kian berkembang dan maju di waktu sekarang ini.
- 3) Tingkat Kehidupan yang lebih Baik yaitu dibukanya industri atau industrialisasi berdasarkan teknologi yang sudah maju menjadikan nilai dalam memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, dan juga merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal ini juga dipengaruhi tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu perkembangan modernisasi.

Kedua, Dampak Negatif Modernisasi.

- 1) Pola Hidup Konsumtif adalah perkembangan teknologi industri yang sudah modern dan semakin pesat membuat

Bab VI Pendidikan dan Modernisasi

penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

- 2) Sikap Individualistik adalah masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial.
- 3) Gaya Hidup Kebarat-baratan artinya tidak semua budaya Barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain.
- 4) Kesenjangan Sosial artinya apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lainnya. Dengan kata lain individu yang dapat terus mengikuti perkembangan jaman memiliki kesenjangan tersendiri terhadap individu yang tidak dapat mengikuti suatu proses modernisasi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara individu satu dengan lainnya, yang bisa disangkutkan sebagai sikap individualistik.
- 5) Kriminalitas artinya kriminalitas sering terjadi di kota-kota besar karena menipisnya rasa kekeluargaan, sikap yang individualisme, adanya tingkat persaingan yang tinggi dan pola hidup yang konsumtif.

B. Pendidikan dan Modernisasi.

Kondisi masa ke masa khususnya menuju ke arah modernisasi tercipta dalam keadaan dimana masyarakat mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan membantu manusia memecahkan semua masalah dengan tujuan kearah kemakmuran ataupun kesejahteraan hidup manusia. Hidup di dunia sekarang dan di masa depan dengan semakin berkembangnya masa dan peradaban manusia sehingga manusia perlu dituntut untuk penguasaan ilmu dan teknologi khususnya dalam ilmu pendidikan. Perencanaan dan pembangunan pendidikan memerlukan biaya yang besar, dukungan sosial dan pengarahan. Biaya pendidikan yang besar hanya dapat diperoleh dalam ekonomi yang bertumbuh. Hal ini memperlihatkan hubungan dan ketergantungan antara berbagai kehidupan dan berbagai institusi sosial dalam proses perubahan sosial budaya atau proses pembangunan suatu masyarakat.

Secara konsep perencanaan dan pembangunan khususnya bidang pendidikan meliputi dua paradigma, yaitu paradigma modernisasi dan paradigma ketergantungan (Manan, 1989: 60).

***Pertama*, Paradigma Modernisasi.**

Paradigma ini berbicara tentang pembangunan menjadi suatu proses yang spontan, tidak dapat dibalikkan dan menjadi sifat dari masing-masing negara. Pembangunan yang telah direncanakan kemudian secara tersirat menuju ke differensiasi struktural dan spesialisasi fungsional. Maka, proses pembangunan juga terbagi dalam tahapan yang berbeda, yang menunjukkan tingkat pembangunan yang dicapai oleh setiap masyarakat. Pembangunan akan tercapai jika adanya rangsangan oleh

persaingan ekstern atau ancaman militer dan intern serta modernisasi sektor-sektor tradisional.

Kedua, Paradigma Ketergantungan.

Paradigma ini beragumen bahwa adanya rintangan-rintangan menjadi pokok paling penting bagi pembangunan, hal ini tidak disebabkan tidak adanya modal atau kecekatan kewiraswastaan. Akan tetapi disebabkan pokok masalah yang bersifat eksternal bagi perekonomian yang kurang berkembang. Proses yang dikembangkan dalam paradigma ketergantungan ini yaitu pembangunan dianalisa dalam arti hubungan antara kawasan-kawasan, yaitu pusat dan pinggiran. Pada kenyataan secara kondisi real di kawasan pinggiran kehilangan hak atas surplusnya, pembangunan di pusat secara tersirat. Sehingga terjadi keterbelakangan di daerah pinggiran. Di samping itu, manfaat bagi suatu negara pinggiran perlu memisahkan diri dan berjuang untuk mandiri.

Munculnya stigma khususnya pada paradigma modernisasi di atas, mengarahkan kita pada sisi perencanaan pembangunan bidang pendidikan yang sudah adanya diferensiasi (pembedaan) struktural dan fungsional dalam bentuk persaingan. Persaingan tersebut dari arus tradisional menuju arus modern yang bertahap. Maka berbicara tentang hubungan antara pendidikan dengan modernisasi maka tidak lepas dari pengaruh perubahan (dinamisme) suatu masyarakat itu sendiri. Arti kata bahwa masyarakat yang senantiasa mengikuti alur dan arus massa menjadi pendidikan juga tidak luput dari pengaruhnya.

Pendidikan merupakan salah satu cara dalam membuka pintu menuju ke dunia modern. Modern dalam dunia pendidikan difaktori oleh perubahan sosial budaya. Perubahan ini mencakup

perubahan ilmu pengetahuan, penyesuaian nilai-nilai dan sikap-sikap yang mendukung pembangunan dan penguasaan berbagai keterampilan dalam menggunakan teknologi maju untuk mempercepat proses pembangunan dalam modernisasi di masyarakat.

Seerti yang tulis oleh Abdullah Idi (2011: 59) pendidikan yang muncul disebabkan oleh adanya perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk: (1)Melakukan reproduksi budaya. (2)Difusi budaya. (3) Mengembangkan analisis kultur terhadap kelembagaan-kelembagaan tradisional. (4) Melakukan perubahan-perubahan dan modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional. (5) Melakukan perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan.

Perubahan sosial budaya tersebut mengindikasikan pada proses perubahan modernisasi pendidikan yang melalui proses penyebaran (difusi) budaya dari institusi yang tradisional untuk direproduksi kembali dengan modifikasi yang lebih baik atau modern. Sehingga fungsi pendidikan sebagai upaya manusia untuk aspek dan hasil budaya terbaik yang mampu disediakan setiap generasi manusia untuk kepentingan generasi muda agar melanjutkan kehidupan dan cara mereka dalam konteks sosio budaya.

Perubahan sosial budaya juga berkaitan dengan perubahan struktural masyarakat seperti pola-pola perilaku dan pola interaksi antar anggota masyarakat, perubahan pada segi kultural masyarakat seperti nilai-nilai, sikap-sikap, serta norma-norma sosial masyarakat. Selain itu, perubahan juga meliputi perubahan di berbagai tingkat kehidupan manusia mulai dari tingkat individual, keluarga, masyarakat hingga ke tingkat masyarakat dunia, perubahan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam suatu sistem masyarakat.

Bab VI Pendidikan dan Modernisasi

Sebelum membahas bagaimana hubungan pendidikan dengan modernisasi, terlebih dahulu kita jabarkan contoh modernisasi di bidang pendidikan. Miles mencontohkan modernisasi pendidikan adalah sebagai berikut.

Pertama, contoh dalam aspek personalia. Pendidikan tidak lepas dari faktor guru atau pendidik yang mentransfer ilmu pengetahuan pada peserta didik (siswa). Hal demikian menjadikan peran pendidik khususnya sebagai sisi personalia untuk berkualitas dalam mendidik peserta didik. Harapan tersebut sesuai dengan konsep modernisasi bahwa personalia menjadi bagian penting sebagai peningkatan mutu pendidikan. Sehingga terkait semakin terkini atau modern pola pikir manusia bahwa ada kewajiban guru untuk Sarjana strata satu, adanya sistem kepengkatan, adanya sertifikasi guru, dan adanya beasiswa studi lanjut.

Kedua, dilihat dari sarana prasarana secara fisik. Telah kita ketahui penatan ruang kelas, tempat duduk, ruang laboratorium, perpustakaan, fasilitas pembelajaran, dan pengaturan wilayah sekolah sudah dimaksimalkan secara sarana dan prasarana demi terciptanya kelancaran dan keberhasilan pendidikan.







Ketiga, dilihat dari pengaturan waktu. Perencanaan penggunaan waktu memberi kesempatan pada peserta didik semakin mengembangkan kreatifitas dan keaktifan di kelas. Ruang dan waktu yang diberikan pada peserta didik, memodernkan mereka pada proses pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran dan cara berpikir untuk lebih kritis terhadap kemajuan pendidikan.

Berdasarkan contoh modernisasi pendidikan di atas, pada dasarnya berbicara mengenai hubungan antara pendidikan dan modernisasi yaitu dengan melihat dari peranan dalam pendidikan itu sendiri Pendidikan berperan sebagai *conservative agent*






(Alwasilah, 2008: 59), berfungsi menyiapkan masinis-masinis untuk menjalankan lokomotif penarik gerbong modernisasi. Karena itu, pendidikan sangat berperan dalam proses pergeseran sikap dan mentalitas.

Selain itu, dalam pandangan (www.kompasiana.com) hubungan pendidikan dengan modernisasi dikategorikan dalam pendidikan di era modern dan pendidikan di era sebelum modern (sederhana).

Pendidikan Era Sederhana (Sebelum Modern)

-  Masyarakat modern guru –guru tidak bisa sekaligus menjadi eksekutif karena tidak mempunyai lagi yang di ajarkan.
-  Masyarakat modern tidak terlibat secara langsung dengan sukses atau gagal muridnya, kurang merasakan insentif hidup atau mati untuk mengajar secara efektif.
-  Masyarakat modern pada umumnya sulit didapatkan.
-  masyarakat modern lebih banyak metode mengajar dan menggunakan waktu lebih banyak dalam pengajaran formal.
-  Agen pendidikan formalnya adalah termasuk keluarga,kerabat dan upacara inisiasi.
-  Anak-anak masyarakat sederhana selalu dalam hubungan yang intim dengan visi orang dewasa terhadap keterampilan yang sedang dipelajarinya.

Pendidikan Era Modern

-  Masyarakat sederhana guru-guru mempraktekkan apa yang mereka ajarkan
-  Guru-guru dalam masyarakat sederhana sangat terikat pada murid-muridnya, anggota kerabatnya dan juga pada apa yang diajarkannya.
-  Mengajarkan dan belajar menjadi lebih mudah sebab objek pengajaran selalu dapat diperoleh.
-  Masyarakat sederhana mengajarkan anak-anak mereka lebih banyak pengetahuan daripada masyarakat modern.
-  Masyarakat modern pada umumnya terpisah secara fisik dan psikologi dari pekerjaan-pekerjaan yang akan menggunakan pengetahuannya.

C. Benang Merah Hubungan Pendidikan dan Modernisasi.

Modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional (belum modern) ke masyarakat yang lebih maju (sudah modern) yang ditandai dengan perubahan cepat dan canggih menuju kearah kemajuan ilmiah, ekonomi, politik, kebangsaan, sosial, teknologi, pola pikir rasional.

Pendidikan merupakan salah satu cara dalam membuka pintu menuju ke dunia modern. Modern dalam dunia pendidikan difaktori oleh perubahan sosial budaya. Perubahan ini mencakup perubahan ilmu pengetahuan, penyesuaian nilai-nilai dan sikap-sikap yang mendukung pembangunan dan penguasaan berbagai keterampilan dalam menggunakan teknologi maju untuk

Sosiologi Pendidikan

mempercepat proses pembangunan dalam modernisasi di masyarakat.

Contoh hubungan modernisasi dalam ranah pendidikan adalah sebagai berikut.

Pertama, contoh dalam aspek personalia. Peran pendidik khususnya sebagai sisi personalia untuk berkualitas dalam mendidik peserta didik. Harapan tersebut sesuai dengan konsep modernisasi bahwa personalia menjadi bagian penting sebagai peningkatan mutu pendidikan. Seperti adanya sistem kepegangatan, adanya sertifikasi guru, dan adanya beasiswa studi lanjut. *Kedua*, dilihat dari sarana prasarana secara fisik. Telah kita ketahui penatan ruang kelas, tempat duduk, ruang laboratorium, perpustakaan, fasilitas pembelajaran, dan pengaturan wilayah sekolah sudah dimaksimalkan secara sarana dan prasarana demi terciptanya kelancaran dan keberhasilan pendidikan. *Ketiga*, dilihat dari pengaturan waktu yang memodernkan siswa pada proses pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran dan cara berpikir untuk lebih kritis terhadap kemajuan pendidikan.

Berbicara tentang hubungan antara pendidikan dengan modernisasi maka tidak lepas dari pengaruh perubahan (dinamisme) suatu masyarakat itu sendiri. Arti kata bahwa masyarakat yang senantiasa mengikuti alur dan arus massa menjadi pendidikan juga tidak luput dari pengaruhnya.

D. Fenomenologi Hubungan Pendidikan dan Modernisasi.

Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Anak

Oleh: Silvester Nusa *)



Foto: Ibu Ignasia Gradiana Nona Tince sedang membimbing anaknya Keiza saat bermain.

Lingkungan pertama yang sangat dekat dengan kehidupan anak adalah rumah. Lingkungan rumah menjadi tempat tumbuh dan berkembang serta tempat belajar bagi anak. Seperti yang diungkapkan oleh Thomas Armstrong, anak memperoleh pengetahuan melalui pengalaman mereka dalam melihat, mendengar, merasakan dan merespon orang-orang dewasa di sekitarnya dengan tanpa sadar. Kualitas interaksi orang tua dan orang-orang sekitar akan sangat menentukan masa depan seorang anak.

Jika perkembangan seorang anak manusia diibaratkan dengan membangun sebuah rumah, maka fondasi rumah sangat menentukan kekuatan dari tiang-tiang penopang rumah. Fondasi rumah adalah suatu keadaan di mana seorang anak masih berstatus usia dini. Usia dini biasa disebut dengan usia emas. Usia dini menurut definisi global adalah anak-anak usia 0 – 8 tahun. Namun, konsep ini direduksi oleh Pemerintah Indonesia menjadi usia 0 – 6 tahun. Anak usia dini adalah setiap anak mulai dari dalam kandungan atau rahim ibu hingga anak yang berusia 6 tahun. Pada masa usia dini, tingkat pertumbuhan dan perkembangan otak sangat pesat, miliaran sel otak akan saling berangkai satu sama lain bila orang tua memberikan stimulasi yang tepat guna menunjang perkembangan syaraf otak. Jika salah menstimulasi maka akan mempengaruhi perkembangan seorang anak selanjutnya. Karena itu, sejak anak masih berada dalam kandungan, orang tua sudah memiliki tanggung jawab terhadap anak. Seorang anak diibaratkan juga sebagai gelas kosong. Ia belum berisi apapun dan ia siap menerima segala sesuatu yang akan dituangkan kepadanya. Oleh karena itu, orang tua yang memiliki peran besar untuk mendidik anak, yaitu, mulai dari yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu. Jika sebelumnya anak belum bisa diharapkan akan menjadi bisa.

Untuk mendorong anak menjadi bisa dari yang sebelumnya belum bisa, maka yang perlu diperhatikan adalah pendidikan anak harus dimulai sejak dini, karena usia dua tahun pertama bagi anak merupakan usia yang sangat menentukan. Menurut Amini, pada masa itu kepribadian anak belum terbentuk. Anak siap menerima segala macam bentuk pendidikan. Menurutny, pada periode ini, seorang anak berada dalam

pelukan kasih sayang ibu dan pengawasan ayah. Selain itu, pada masa ini, berbagai potensi yang dimiliki anak mulai berkembang di bawah pengaruh perilaku dan ucapan orang tuanya. Dengan kata lain, perkembangan potensi anak pada usia itu berada di bawah bimbingan orang tua. Seperti apa pendidikan yang diberikan orang tua pada anak di usia ini akan menentukan kepribadian anak di masa depan.

Hal yang harus selalu diingat ketika mendidik anak adalah pengertian bahwa mendidik seorang anak bukan merupakan pekerjaan yang menghabiskan waktu. Terkadang para orang tua yang memiliki kesibukan ekstra dalam hal pekerjaan akan merasa kesulitan. Tidak jarang orang tua merasa bahwa kegiatan mendidik dan membesarkan hanya menjadi penghambat rutinitas. Pengertian itu harus dihilangkan. Keluhan-keluhan dalam mendidik anak tidak akan terjadi jika orang tua mampu membuat kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang menyenangkan.

Selanjutnya, Fauzia Azwin, menyatakan, antara orang tua dan anak perlu dibina suatu hubungan yang erat. Hubungan yang erat antara anak dan orang tua sangat dibutuhkan setiap anak untuk mengoptimalkan perkembangan *cognitive modifiability*, yaitu hubungan antara pengasuh (orang tua) dan anak dapat menjadi usaha untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Maksud dari mengoptimalkan perkembangan *cognitive modifiability* adalah sebagai berikut; Pertama, memperhatikan seluruh perkembanganyang ada pada anak. Catatlah keunikan-keunikan dan aspek-aspek yang tidak sesuai dengan perkembangan anak pada umumnya. Selain itu, cermati juga perkembangannya secara umum, cara bicara, cara bertingkah, cara berpikir dan sebagainya. Kedua, mengamati hambatan yang

dialami anak dalam perkembangannya. Ketiga, jangan segan untuk mendiskusikan masalah anak dengan orang yang lebih tua dan berpengalaman, yakni dengan guru atau pendamping anak anda di sekolah. Keempat, konsultasikan dengan pakar, dokter anak, atau orang yang terpercaya dan dianggap memahami persoalan anak.

Di dalam rumah, orang tua juga harus berperan sebagai model bagi anak. Pada usia dua dan tiga tahun, anak melakukan upaya-upaya peniruan tingkah laku. Peniruan tersebut dilakukan anak dengan melihat model yang ada di sekelilingnya. Orang tua yang merupakan orang terdekat bagi anak, merupakan contoh yang akan ditiru oleh anak. Dalam proses psikologis, peniruan ini disebut dengan identifikasi. Orang tua dapat menjadikan rumah sebagai tempat pembelajaran yang efektif. Selain dengan meniru perilaku orang tua, anak juga bisa memperoleh pembelajaran dari hal-hal lain. Orang tua dapat memberikan pelajaran hidup dengan cara menceritakan sesuatu pengalaman hidup yang bermanfaat pada anak. Orang tua juga dapat mengajak anak untuk menyelesaikan suatu kegiatan bersama-sama. Dengan adanya interaksi antara orang tua dengan anak, maka akan terjalin suatu hubungan harmonis di dalam keluarga. Sebisa mungkin, orang tua harus menciptakan iklim yang positif dan ramah. Dalam studi ilmiah yang diungkapkan Dr. Malak Jurjis, suasana rumah sangat berpengaruh terhadap gejala emosional anak dan tingkah laku anak. Orang tua memiliki peranan besar dalam membentuk perasaan anak. Menurutnya, orang tua yang temperamental secara tidak langsung telah mendidik anak untuk mudah emosi dan bersikap sembrono. Sementara itu, orang tua yang berjiwa tenang akan mampu mengajari anak menghadapi hidup dengan indah

tanpa emosi yang berlebihan. Lebih lanjut, Dr. Malak Jurjis, menyatakan, bahwa gejala emosional anak merupakan perilaku yang didapat atau dipelajari dari orang tuanya. Semua gejala emosional anak menunjukkan bahwa mereka merupakan korban perlakuan orang tua dan pengaruh tempat mereka tumbuh.

Belajar Sejak Dini

Periode usia balita, merupakan masa yang sangat menentukan bagi pembentukan kecerdasan anak. Masa usia ini biasa disebut dengan istilah *golden years period* atau *golden age* yang artinya usia emas. Orang tua diharapkan dapat memanfaatkan masa usia ini dengan sebaik-baiknya. Yaitu, dengan cara membantu perkembangan seluruh potensi yang dimiliki anak. Belajar pada usia dini dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Mengingat usia anak masih dini, maka kegiatan belajar pada usia ini sebaiknya dilakukan melalui permainan. Hal itu tidak terlepas dari segi keamanan dan kenyamanan anak. Selain itu, belajar sejak dini, juga bisa dilakukan dengan cara menceritakan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Tema cerita dibuat sesederhana mungkin agar anak lebih mudah memahami. Di sela-sela cerita, biarkan anak mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang menarik perhatiannya. Tanya jawab antara anak dengan orang tua merupakan sebuah interaksi yang sangat baik bagi perkembangan anak.

Belajar sejak dini juga bisa dilakukan dengan cara membuat hasil karya sederhana. Jika anak mampu menyelesaikan hasil karyanya, hendaknya orang tua memberikan apresiasi. Hal itu akan menumbuhkan rasa percaya diri anak. Di samping itu, yang perlu diperhatikan adalah perlunya menstimulasi

rangsangan sejak dini. Dalam hal menstimulasi, orang tua harus menyadari perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, orang tua didorong untuk mengembangkan kemampuan bayinya untuk berbicara. Hal ini membutuhkan cara dan pendekatan tersendiri karena tidak semua orang tua bisa mengetahui cara pengasuhan yang baik yang diberikan kepada anaknya. Untuk mendorong setiap orang tua menyadari perannya tersebut maka sangat penting dilakukan pendidikan keorangtuaan atau yang biasa disebut dengan Pendidikan Pengasuhan sebagaimana yang akhir-akhir ini dilakukan oleh Plan Indonesia Unit Sikka di 40 Posyandu yang tersebar di 13 desa plot Kabupaten Sikka sejak bulan April 2011 lalu. Melalui Pendidikan Pengasuhan atau Parenting ini, sebanyak 30 orang tua bayi balita di setiap posyandu melakukan diskusi atau sharing pengalaman bagaimana mengasuh anak sejak dalam kandungan hingga berusia 6 tahun bahkan hingga 18 tahun. Karena kualitas atau mutu anak sangat ditentukan oleh seberapa besar kualitas pengasuhan di rumah. Melalui Program Parenting ini, orang tua bayi balita usia 0 – 6 tahun saling berdiskusi tentang pola asuh yang bisa mendukung anak untuk sukses di sekolah dan kehidupan selanjutnya karena pada dasarnya anak adalah anugerah dari sang pencipta. Orang tua yang melahirkan anak harus bertanggung jawab terutama dalam soal mendidiknya, baik ayah sebagai kepala keluarga maupun ibu sebagai pengurus rumah tangga. Keikutsertaan orang tua dalam mendidik anak merupakan awal keberhasilan orang tua dalam keluarganya apabila sang anak menuruti perintah orang tuanya terlebih lagi sang anak menjalani didikan sesuai dengan perintah agama dan adat.

Pendidikan Moral

Kita perlu mengetahui bahwa bobroknya moral seorang anak dan remaja bisa diakibatkan salah satu kesalahan dari orangtuanya seperti dalam hal mendidik anak terlalu keras. keluarga yang sedang bermasalah (*broken home*). Hal tersebut dapat membuat anak menjadi orang yang temperamental. Kebanyakan dari orang tua tidak memikirkan hal ini, mereka berasumsi jika mereka menjalani hidup sebagaimana yang sedang mereka jalani, peran pengasuhan akan terus dengan sendirinya.

Dalam era modernisasi sekarang ini, peran penting orang tua sangat dibutuhkan. Berkenaan dengan perkembangan kecanggihan teknologi. Sesuatu yang tidak dapat dihindari bahwa teknologi berkembang dengan pesat sehingga penggunaannya banyak digunakan tidak semestinya, Teknologi IT yang paling sering digunakan para anak muda sekarang adalah akses internet yang mudah ditemui, padahal pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang anti pornoaksi dan pornografi tapi masih saja mereka kerap mengakses konten yang berbau negatif. Yang jelas dapat merusak moral sang anak. Teknologi canggih yang semestinya diciptakan untuk menambah wawasan malah berakibat pada moral yang jelek.

Pergaulan merupakan interaksi antara beberapa orang baik berupa kekeluargaan, organisasi, ataupun masyarakat. Melalui pergaulan kita akan berkembang karena jadi tahu tentang tata cara bergaul. Sehingga menjadikan individu yang bersosial karena pada dasarnya manusia memang makhluk sosial. Namun pergaulan di era modernisasi ini telah banyak disalah artikan terutama di kalangan anak muda. Sekarang kata-kata pergaulan

bebas sudah tidak asing lagi didengar oleh siapapun dan jelas termasuk dalam kategori pergaulan yang negatif.

Pergaulan yang negatif adalah salah satu dari sekian banyak penyebab kehancuran sang anak. Saat ini dapat kita lihat banyaknya sistem pergaulan kawula muda yang mengadopsi gaya ala barat (*westernisasi*) dimana etika pergaulan ketimuran telah pupus, mungkin anda pernah atau bahkan sering mendengar kata-kata MBA (*married by accident*). MBA tampaknya sudah menjadi tren di kalangan remaja dimana melakukan hubungan seks sebelum menikah banyak dilakukan pada saat pacaran. Anak-anak muda sudah menganggap tradisi ini hal yang biasa dilakukan pada saat pacaran bahkan ada yang tidak segan-segan untuk merekam adegan mesum tersebut untuk disebar dan ditonton di khalayak ramai. Apakah ini bukan kehancuran bagi sang anak?. Jawabannya tentu saja iya.

Satu lagi permasalahan yang sering ditakuti oleh orang tua yaitu narkoba, sudah jelas barang haram ini dikategorikan sebagai barang berbahaya dan terlarang yang bisa merusak generasi muda. Narkoba menjadi jurang kehancuran bagi sang anak. Ironisnya memakai barang haram ini juga sudah menjadi tren remaja sekarang dengan anggapan bila mengkonsumsi barang ini akan menjadi senang atau yang dikenal dengan bahasa gaulnya (*fly*). Padahal sudah jelas menurut kesehatan mengkonsumsi barang-barang sejenis narkoba sangat merusak kesehatan terutama pada sistem syaraf apalagi dengan mengkonsumsi barang ini akan membuat ketagihan dan ketergantungan, ini sungguh menakutkan.

Apakah kita sebagai orang tua ingin melihat anak hancur masa depannya karena kesalahan yang tidak semestinya terjadi?

Bab VI Pendidikan dan Modernisasi

Di sinilah peran penting orang tua dalam mengontrol dan mengawasi sang buah hati. Menjadi orang tua bukan soal siapa kita, tetapi apa yang dilakukan. Pengasuhan tidak hanya mencakup tindakan tetapi mencakup pula apa yang kita kehendaki agar sang buah hati kita mengerti akan hidup. Apa artinya hidup dan bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik.

Semua pasti ingin menghendaki hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Orang tua ingin mendisiplinkan, mendorong, dan menasihati agar mereka berhasil menjalani kehidupan sedari kanak-kanak hingga sampai dewasa. Orang tua harus menjadi yang terbaik dalam hal apapun. Banyak orang tua ingin mendorong anaknya untuk melakukan hal yang terbaik dalam kehidupannya. Termasuk ingin membuat buah hatinya untuk bebas mengeluarkan dan menggali bakat dan minat yang dimiliki sang anak.

Hal yang semestinya dipahami adalah banyak anak mengalami kesulitan untuk membedakan antara menerima atau menolak tindakan atas apa yang mereka lakukan. Misalnya saja penerimaan orang tua terhadap prestasi yang dimiliki atau dicapai anak bisa dianggap anak sebagai rasa cinta orangtua kepadanya, tetapi penolakan yang dilakukan orang tua terhadap tindakan yang dilakukan anak membuat anak beranggapan mereka tidak dicintai dan disayangi lagi. Setiap anak perlu tahu kalau mereka disayangi dan dicintai orang tua dengan sepenuh hati, meskipun sebaliknya, setiap orang tua harus mencintai dan menyayangi sang buah hati tanpa syarat apapun, baik buruknya sifat maupun sikap yang dimiliki sang buah hati, mereka harus menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh anak.

Semua anak ingin diperhatikan kedua orang tuanya. Pernyataan ini sangat sederhana bagi kita semua, tetapi sifatnya fundamental bagi kedua orang dalam mengasuh buah hati mereka. Karenanya dalam pola pengasuhan sebaiknya setiap orang tua tidak boleh membedakan anak satu sama lain.

Kita juga tidak semestinya membedakan buah hati mereka, baik dalam mendidik maupun memberikan perhatian kepada sang anak. Harus ada rasa keadilan, tidak boleh pilih kasih, karena akan menimbulkan kecemburuan diantara anak. Yang ditakutkan nanti akan membuat anak menjadi rusak, bahkan berpikir kalau mereka tidak disayangi lagi, bahkan ada anak yang beranggapan kalau mereka itu bukan anak dari orang tua mereka sendiri, karena selalu dibeda-bedakan dengan yang lainnya.

Orang tua tidak seharusnya memperlihatkan emosi yang negatif kepada anak-ananya. Ketidakmampuan setiap orang tua dalam mengontrol emosi membuat anak menjadi temperamental dan mempunyai sifat maupun sikap yang buruk yaitu mudah emosional. Akibatnya orang tua yang demikian tidak bisa menjadi model atau peran yang baik untuk anak-anaknya dalam mengontrol anak dan mengasuh buah hatinya. Tujuan orang tua sebenarnya untuk mengkomunikasikan kepada buah hatinya bahwa mereka memiliki hak untuk merasakan apapun yang mereka rasakan, Mengajari sang buah hati untuk menghargai dan menikmati setiap saat dalam kehidupan sehingga mampu memberi motivasi kepada anak dalam mencegah serta menghadapi masalah yang mereka hadapi kedepan.

Terkadang orang tua sering lupa untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Ada diantara mereka yang lebih mementingkan pekerjaan dari pada melakukan hal itu. Bagi

mereka hal itu tidak perlu dilakukan. Mereka beranggapan bahwa materi yang dibutuhkan anak, Padahal seorang anak tidak hanya membutuhkan materi namun juga perhatian dan interaksi dengan orangtuanya. Mereka membutuhkan komunikasi dengan orang tuanya, mereka juga ingin bertukar pikiran dengan orang tuanya. Mereka ingin menceritakan pengalaman apa yang mereka rasakan sehari-hari baik itu pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk.

Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang siapakah anak, mari kita merenungi puisi yang ditulis oleh Dorothy berikut ini; *Jika anak hidup dengan kritikan, ia akan belajar untuk mengutuk. Jika anak hidup dengan kekerasan, ia akan belajar untuk melawan. Jika anak hidup dengan ejekan, ia akan belajar untuk menjadi pemalu. Jika anak hidup dengan dipermalukan, ia akan belajar merasa bersalah. Jika anak hidup dengan toleransi, ia akan belajar bersabar. Jika anak hidup dengan dorongan, ia akan belajar percaya diri. Jika anak hidup dengan pujian, ia akan belajar untuk menghargai. Jika anak hidup dengan tindakan yang jujur, ia akan belajar tentang keadilan. Jika anak hidup dengan rasa aman, ia akan belajar untuk mempercayai. Jika anak hidup dengan persetujuan, ia akan belajar untuk menghargai dirinya. Jika anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan, ia akan belajar untuk menemukan cinta di muka bumi ini.*

Anak-anak usia dini adalah peniru yang luarbiasa. Apapun yang mereka lihat, yang mereka dengar dan mereka rasakan akan terekam kuat di kepala mereka. Mereka selalu berusaha untuk mengulang kembali pengalaman yang mereka alami. Dibalik wajah polos dan lugu mereka, tersimpan banyak sekali potensi untuk berkembang menjadi orang yang baik dan juga potensi

untuk berkembang menjadi orang yang jahat. Guru PAUD adalah salah satu peran yang sangat penting dalam masa-masa awal hidup seorang anak, seberapa kuat pembentukan karakter dan kepribadian yang bisa dilakukan oleh Guru PAUD akan menjadi landasan untuk perkembangan anak selanjutnya baik di sekolah maupun di kehidupannya. (***)

Sumber: <http://flores-file.blogspot.co.id>

E. Uji Kompetensi.

Masyarakat yang dinamis dari masyarakat tradisional ke arah modern sehingga diharapkan adanya hubungan linear antara pendidikan dengan modernitas terhadap peningkatan kualitas dan kreatifitas pendidikan yang ada di Indonesia Berikut ini uji kompetensi sebagai analisis lanjutan mengenai hubungan pendidikan dan modernisasi.

1. Kata modern digunakan untuk menunjukkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dalam arti lebih menyenangkan, lebih meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan cara baru (modern) sesuatu akan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Misalnya dalam perkembangan transportasi, karena kuda lebih modern daripada gerobak yang ditarik orang, tetapi mobil lebih modern daripada kereta kuda, pesawat lebih modern daripada mobil. Jelaskan asumsi Saudara, apakah modernisasi tersebut sama artinya dengan istilah globalisasi!
2. Perencanaan penggunaan waktu memberi kesempatan pada peserta didik semakin mengembangkan kreatifitas dan

Bab VI Pendidikan dan Modernisasi

keaktifan di kelas. Ruang dan waktu yang diberikan pada peserta didik, memodernkan mereka pada proses pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran dan cara berpikir untuk lebih kritis terhadap kemajuan pendidikan. Berikan argumen Saudara mengenai pernyataan tersebut !

3. Perubahan sosial budaya tersebut mengindikasikan pada proses perubahan modernisasi pendidikan yang melalui proses penyebaran (difusi) budaya dari institusi yang tradisional untuk direproduksi kembali dengan modifikasi yang lebih baik atau modern. Sehingga fungsi pendidikan sebagai upaya manusia untuk aspek dan hasil budaya terbaik yang mampu disediakan setiap generasi manusia untuk kepentingan generasi muda agar melanjutkan kehidupan dan cara mereka dalam konteks sosio budaya. Bagaimana pendapat Saudara mengenai perubahan sosial budaya yang berdampak pada hubungan antara pendidikan dengan ekonomi ?

DAFTAR PUSTAKA

- Aat Syafaat dan Sahori Sahrani. 2008. *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abu Ahmadi. 2007. *Sosiologi Pendidikan*, cet. II. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. 2002. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdullah Idi dan Toto Suharto. 2006. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abdullah Idi. 2011. *Sosiologi Pendidikan (individu, Masyarakat, dan Pendidikan)*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Abdullah Muhyi Batubara. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Ciputat Press.
- Ahmad Rohani. 2004. *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Z. 2006. *Pengantar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: Bumi Aksara.
- Ary H. Gunawan. 2000. *Sosiologi Pendidikan, Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amich Alhumami. *Peneliti Research Institute for Culture and Development, Jakarta*.
- Aqiel Siradj, Said. 1999. *Islam Kebangsaan (Fiqh Demokratik Kaum Santri)*. Jakarta: Pustaka Ciganjur Fatma Press.

Sosiologi Pendidikan

- Belling dan Totten. 1985. *Modernisasi Masalah Model Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Boediono. 1997. *Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Bruce J. Cohen, "*Theory and Problems of Introduction to Sociology*", diterjemahkan oleh Sahat Simamora dengan judul *Sosiologi – Suatu Pengantar*, (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Damanik. S. Fritz Hotman. 2009. *Sosiologi*. Klaten: Intan Pariwara,
- Darajat dkk. 1996. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwi Siswoyo dkk. 2008. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- E.Mulyasa. 2007. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- E.Mulyasa. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosdakarya.
- Fuad Ihsan. 2003. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fritz Hotman S. Damanik 2009. *Sosiologi*. Klaten: Intan Pariwara.
- Gordon Marshall. 1998. *A Dictionary of Sociology*. New York: Oxford University Press.
- Ghillin and Ghillin. 1948. *An Introduction to Sociology*. New York: The Macmillan Company.
- Hamalik, Oemar. 2005. *Perencanaan Pegajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harun Nasution. 1996. *Islam Rasional; Gagasan dan pemikiran Cet.IV*. Bandung: Mizan.

- Hasibuan. 1992. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hill, Lilian H. 2005. *Community Education, Lifelong Learning, and Social Inclusion*. *Adult Education Quarterly*, volume 5 nomor 2, February 2005.
- Ibrahim dan Nana Syaodih. 2003. *Perencanaan Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Idris Zahara. 1995. *Pangantar Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Indrakusuma, A.D. 1978. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Malang: FIP IKIP Malang.
- Indrafachrudi, Soekarto. 1994 *Bagaimana Mengakrabkan Sekolah Dengan OrangTua Murid dan Masyarakat*. Malang: IKIP Malang.
- Maisyaroh. 2003. *Manajemen Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Dalam, Imron, A., Maisyaroh, dan Burhanuddin (Eds.), *Manajemen Pendidikan: Analisis Substansi dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*. Malang: UM Press.
- Matondang, M. 2008. *Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manan, Imran. 1989. *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- _____. 1989. *Anthropologi Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Mudyahardjo. 2002. *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sosiologi Pendidikan

- Muri Yusuf. 2005. *Evaluasi Pendidikan*. Padang: UNP Press.
- Moh. Padil Triyo dan Supriyatno. 2010. *Sosiologi Pendidikan, cet.II*. Malang: UIN-Maliki Press.
- M. Munandar Soelaeman. 1992. *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Eresco.
- Ngainun Naim. 2009. *Menjadi Guru Inspiratif*. Yogyakarta: Pustaka Pustakdjamaraha.
- Ngalim Purwanto. 1990. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Nurdina, dkk. 2008. *Sosiologi untuk Sekolah Menengah Keatas*. Nganjuk: Temprina Media Grafika.
- Nasution, S. 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Permen Dikdas RI Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.
- Perdana, Ari A. *Pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan* (www. CSIS.com).
- Purwanto, M.N. 2002. *Ilmu Pendidikan, Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Psacharopoulos, George and Maureen Woodhall. 1985. *Education for Development, An Analysis of Investment Choices*. USA : A World Bank Publication.
- Pribadi, Sikun. 1987. *Mutiara Mutiara Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesi*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramayulis. 2004. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Daftar Pustaka

- Rochman Natawidjaja dan Moein Moesa, 2004. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramly dan E.Triyulianti. 2006. *Pumping Teaching, Memompa Teknik Pengajaran Menjadi Guru Kays*. Depok: Kawan Pustaka.
- Rusyan Tabrani. 1999. *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Nine Karya Jaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Ravik Karsidi. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Surakarta: UNS Press.
- Richard Harker (et al.). 2005. *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktek*, (Yogyakarta: Jalasutra.
- Samsul Nizar. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Sadirman A.M. 2010. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satori Djam'an. 2007. *Profesi Keguruan*. Jakarta: UT.
- Sarlito Sarwono. 2001. *Psikologi Sosial -Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saripudin, Didin. 2010. *Interpretasi Sosiologis dalam Pendidikan*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Suparlan Suhartono. 2009. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press.

Sosiologi Pendidikan

- Sidi Gazalba. 1976. *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi & Sosiografi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Suryosubroto, B. 2010. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryosubroto, B. 2012. *Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public Relations)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudharsono Saliman. 1993. *Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sanapiah Faisal. 2007. *Strategi Pembelajaran Dalam Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung.
- Sudarwan. 2010. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan. 2006. *Guru Sebagai Profesi*. Yogyakarta: Hikayat Publisng.
- Suwarno. 1992. *Pengantar Umum Pendidikan*, Surabaya: Rineka Cipta.
- Syarafuddin dkk, 2012. *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Sumatera Utara: Perdana Publishing.
- Soelaiman Joesoef dan Slamet Santosa. 1981. *Pendidikan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Schoorl, J.W. 1982. *Modernisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Tim Dosen FIP-IKIP Malang. 1987. *Pengantar Dasar-dasar Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Tirtarahardja, dkk. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Tirtarahardja, Umar dan La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Udik Budi Wibowo. 2011. Kumpulan Bahan Kulian Pendidikan Makro. FIP UNY
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Uzer Usman. 2003. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Uus Ruswandi dan Badrudin. 2010. *Pengembangan Kepribadian Guru*. Bandung: Insan Mandiri.
- Unruh, A. & Willer, R.A. 1974. *Public Relations for School*. Belmont California: Liar Siagler Inc./ Fearon Publishers.
- Uzer Usman. 2003. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Vembriarto, ST. 1985. *Pengantar Perencanaan Pendidikan*. Jogyakarta: Yayasan Pendidikan "Paramita".
- Wuradji. 1988. *Sosiologi Pendidikan Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologi*. Jakarta:
- Wahyudin, Dinn. 2007. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Yasmadi. 2002. *Modernisasi Pesantren, Kritik Nur Cholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press.
- Zakiah Darajat. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sosiologi Pendidikan

<http://flores-file.blogspot.co.id> (diunduh pada tanggal 16 Desember 2015, pukul 20.30 WIB).

<http://www.kemdikbud.go.id> (diunduh pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 21.30 WIB).

www.kompasiana.com (diunduh pada tanggal 5 Januari 2016, pukul 13.40 WIB).

<http://renizulianti.blogspot.com/2010/12/artikel-tentang-peserta-didik.html> (diunduh pada tanggal 5 Januari 2016, pukul 16.00 WIB).

Tentang Penulis

MEIDAWATI SUSWANDARI, S.Pd, M.Pd.

Lahir di Purbalingga, 12 Mei 1987. Penulis memperoleh gelar Sarjana Pendidikan jurusan S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi di Universitas Sebelas Maret Surakarta/UNS (2009) dengan judul skripsi "*Identitas Dialek Banyumasan Sebagai Sebuah Konstruksi Budaya (Studi Kasus Penggunaan Dialek Banyumasan di Kalangan Mahasiswa Asli Banyumasan yang Belajar di UNS Surakarta)*".

Gelar Magister Pendidikan diperoleh dari S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS di UNY Yogyakarta (2012) dengan judul tesis "*Evaluasi Program Kota Layak Anak di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta*".

Sementara itu, penulis mulai tahun 2016 melanjutkan studi S3 Ilmu Pendidikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).

Mengawali karir sebagai pengajar pada tahun 2013 di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo dengan mengampu mata kuliah Konsep Dasar IPS, Pembelajaran IPS, Perspektif Global, Inovasi dan Analisis Kebijakan Pendidikan serta Sosiologi Pendidikan. Penulis mulai mengawali kegiatan

Sosiologi Pendidikan

pena semenjak SMP. Beberapa tulisan yang pernah dimuat seperti puisi dan artikel yaitu di Majalah PD Sahabat (2004) dan Majalah Orientasi Pelajar/MOP (2005). Buku yang pernah ditulis yaitu Kewirausahaan, Filsafat Ilmu, serta Inovasi dan Analisis Kebijakan Pendidikan. Tempat tinggal penulis di Asrama Militer Yonif 413, Palur, Mojolaban, Sukoharjo.